

SAMBUTAN KEPALA DISKOMINFO

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, publikas Indikator Statistik Makro Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Buku ini kiranya dapat memberikan informasi berbagai macam data Statistik yang dapat digunakan untuk dasar penentuan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi.

Dari buku ini disamping dapat dijadikan referensi data statistik, juga dapat dijadikan ukuran kuantitas, yang diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan masa lalu dan masa kini serta untuk mencapai sasaran di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap dengan terbitnya buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, untuk berbagai kepentingan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam rangka untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo.

Wonosobo, Desember 2017
KEPALA DISKOMINFO
KABUPATEN WONOSOBO

EKO SUTRISNO S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19631026199103004

DAFTAR ISI

Sambutan Kepala Diskominfo.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	xi
I Pendahuluan.....	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Tujuan	3
1.3. Sumber Data	3
1.4. Sistematika Penyajian.....	3
II Pendidikan.....	7
2.1. Penduduk Usia Sekolah	8
2.2. Keadaan Sarana Pendidikan	10
2.3. Angka Partisipasi Kasar (APK).....	11
2.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	13
2.5. Angka Partisipasi Murni (APM).....	16
2.6. Kemampuan Membaca dan Menulis	18
2.7. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	22
III Kesehatan	27
3.1. Anak Lahir Hidup	27
3.2. Anak Kematian Bayi.....	29
3.3. Anak Kematian Ibu.....	31
3.4. Prevalensi Balita Gizi Buruk	33
3.5. Angka Penyebab Kesakitan	33
3.6. Sarana dan Prasarana Kesehatan	42
3.7. Fasilitas Kesehatan dan Cara Berobat	43
3.8. Sumber dan Kesehatan	52
IV Perumahan dan Lingkungan Hidup	55
4.1. Berbagai Unsur Rumah/Tempat Tinggal.....	57
4.1.1. Status Penguasaan Rumah Tinggal.....	57
4.1.2. Luas Lantai Rumah.....	61
4.1.3. Atap dan Dinding Rumah	64
4.2. Fasilitas Perumahan	66
V Penduduk.....	69
5.1. Jumlah Penduduk.....	69

5.2. Tingkat Kepadatan penduduk	74
5.3. Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>).....	77
5.4. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	79
VI Ketenagakerjaan.....	86
6.1. Konsep dan Definisi	87
6.2. Indikator Ketenagakerjaan.....	91
VII Transportasi dan Telekomunikasi	106
7.1. Transportasi	106
7.1.1. Jaringan Jalan.....	106
7.1.2. Jembatan	111
7.1.3. Terminal.....	113
7.1.4. Prasarana Pendukung Transportasi Lainnya.....	114
7.2. Telekomunikasi.....	116
7.2.1. Telepon Rumah.....	117
7.2.2. Menara Telekomunikasi	117
VIII Agama dan Sosial.....	120
8.1. Penduduk Menurut Agama	120
8.2. Tempat Ibadah	120
8.3. Jamaah Haji	121
8.4. Kasus Kejahatan dan Pelanggaran Lalu Lintas	122
8.5. Napi yang Menghuni Rutan Wonosobo	124
IX Kemiskinan.....	127
9.1. Konsep Penduduk Miskin.....	128
9.2. Sumber Data	129
9.3. Kemiskinan Makro <i>versus</i> Kemiskinan Mikro.....	128
9.4. Konsep Garis Kemiskinan (GK).....	130
9.5. Teknik Penghitungan GKM.....	131
9.6. Persentase Penduduk Miskin	135
9.7. Indeks Kedalaman Kemiskinan	135
9.8. Indeks Keparahan Kemiskinan	136
9.9. Perkembangan Tingkat kemiskinan Kab. Wonosobo, Tahun 2010 - 2017	137
9.10. Perubahan Garis Kemiskinan 2010-2017	139
9.11. Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	140

X	Indeks Pembangunan Manusia	143
	10.1. Konsep	143
	10.2. Perubahan Metodologi IPM.....	144
	10.3. Implementasi IPM Metode Baru di Indonesia	148
	10.4. Perkembangan IPM Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 - 2014.....	153
XI	PDRB Kabupaten Wonosobo	158
	11.1. Nilai Nominal PDRB	164
	11.2. Peranan/Kontribusi Sektor Ekonomi.....	167
	11.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi	171
	11.4. Tingkat Perubahan Harga (Inflasi/Deflasi).....	172
	11.5. PDRB Perkapita.....	176
XII	Inflasi	179
	12.1. Pengantar	179
	12.2. Pemilihan Komoditi.....	180
	12.3. Formulasi Penghitungan Inflasi.....	181
XIII	PDRB Kabupaten Wonosobo Menurut Pengeluaran	190
	13.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	190
	13.2. Agregat PDRB Kabupaten Wonosobo Menurut Pengeluaran	192
	13.3. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	194
	13.4. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	195
	13.5. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah.....	197
	13.6. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)..	199
	13.7. Perkembangan Perubahan Inventori	201
	13.8. Perkembangan Ekspor – Impor Barang dan Jasa	202
XIV	Statistik Akomodasi.....	207
	14.1. Pariwisata.....	207
	14.2. Hotel	209
XV	Keuangan Daerah	217
	15.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	217
	15.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	219

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Persentase Wanita 15–49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Rata–rata Anak Lahir Hidup di Kabupaten Wonosobo, 2010-2014.....	29
Tabel 3.2	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Wonosobo, 2010–2014	43
Tabel 4.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal di Kabupaten Wonosobo, 2014-2016.....	60
Tabel 4.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Kualitas Perumahan di Kabupaten Wonosobo, 2015 – 2016.....	63
Tabel 5.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2012 – 2016.....	70
Tabel 5.2	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2017	76
Tabel 5.3	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Wonosobo, Tahun 2017	78
Tabel 5.4	PresentaseKomposisi Umur Penduduk dan <i>Dependency Ratio</i> (DR) di Kabupaten Wonosobo,2012-2016.....	83
Tabel 6.1	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Seminggu yang lalu, 2013-2014 ...	92
Tabel 6.2	Persentase TPAK, Tingkat Kesempatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Wonosobo, 2012–2017.....	94
Tabel 6.3	Persentase Penduduk Laki-laki Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2012-2017	99
Tabel 6.4	Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan, 2012-2017	100
Tabel 6.5	Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2012-2017	101
Tabel 6.6	Persentase Penduduk Laki-laki Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status, 2012-2017	102

Tabel 6.7	Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status, 2012-2017	103
Tabel 6.8	Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2012-2017	104
Tabel 7.1	Panjang Jalan Per Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-2016.....	107
Tabel 7.2	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-2016	108
Tabel 7.3	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-2016	110
Tabel 7.4	Jumlah dan Kondisi Jembatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-2016.....	112
Tabel 7.5	Jumlah Terminal Berdasarkan Tipe Terminal di Kabupaten Wonosobo, 2014-2016.....	114
Tabel 7.6	Jumlah Rambu Jalan di Kabupaten Wonosobo, 2014-2016.....	115
Tabel 7.7	Jumlah Menara Telekomunikasi di Kabupaten Wonosobo, 2014-2016	118
Tabel 8.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo Menurut Agama Tahun 2013-2016	120
Tabel 8.2	Banyaknya Tempat Ibadah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2013-2016	121
Tabel 9.1	Persentase Penduduk Miskin di 5 Kabupaten/Kota Peringkat Terendah di Provinsi Jawa Tengah, 2015-2017	138
Tabel 9.2	Garis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo, 2010-2017.....	139
Tabel 10.1	Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru	149
Tabel 10.2	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wonosobo, 2012-2016	153
Tabel 10.3	IPM Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu, 2012-2016.....	155
Tabel 11.1	Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB	162

Tabel 11.2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2012-2016	165
Tabel 11.3	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah), 2012-2016.....	167
Tabel 11.4	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku (persen), Tahun 2012-2016	170
Tabel 11.5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Konstan (persen), 2012-2016	172
Tabel 11.6	Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo (persen), 2012-2016	174
Tabel 11.7	Inflasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo (persen), 2012-2016.....	175
Tabel 11.8	Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah), 2012-2016	176
Tabel 12.1	Inflasi Wonosobo dan Jawa Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran 2017 (persen).....	186
Tabel 12.2	Inflasi Bulanan Kabupaten Wonosobo, 2016-2017	187
Tabel 13.1	Trade Balance dan Rasio Perdagangan Luar Kabupaten Wonosobo	192
Tabel 13.2	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2010-2016.....	195
Tabel 13.3	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRRT Tahun 2010-2016	196
Tabel 13.4	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2010-2016.....	198
Tabel 13.5	Perkembangan dan Struktur PMTB Tahun 2010-2016	200
Tabel 13.6	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Tahun 2010-2016	202
Tabel 13.7	Perkembangan dan Struktur Export Barang dan Jasa Tahun 2010-2016.....	203

Tabel 13.8	Perkembangan dan Struktur Import Barang dan Jasa Luar Daerah Tahun 2010-2016	204
Tabel 13.9	Net Ekspor Antar Daerah Tahun 2010-2016	204
Tabel 14.1	Jumlah Hotel di Kabupaten Wonosobo, 2013-2016.....	210
Tabel 14.2	RLM Menurut Bulan Tahun 2016	214
Tabel 15.1	Realisasi APBD di Kabupaten Wonosobo, 2014-2016	218
Tabel 15.2	PADS Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-2016	222

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Tingkat Sekolah, 2012 – 2014.....	11
Gambar 2.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Wonosobo, 2006-2015	13
Gambar 2.3	Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wonosobo, 2007-2015.....	16
Gambar 2.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Wonosobo, 2012-2016	17
Gambar 2.5	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf Menurut Jenis kelamin di Kabupaten Wonosobo, 2010-2016.....	22
Gambar 2.6	Grafik Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo, 2012-2016	24
Gambar 3.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2016 Berdasarkan Penyebab Kematian	30
Gambar 3.2	Angka Kematian Ibu Tahun 2016 Berdasarkan Penyebab Kematian	32
Gambar 3.3	Kasus HIV/AIDS Tahun 2016 Menurut Golongan Umur	36
Gambar 3.4	Kepesertaan KB pada PUS Tahun 2016	49
Gambar 4.1	Persentase Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Wonosobo, 2016.....	62
Gambar 4.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terlulus di Kabupaten Wonosobo, 2016.....	65
Gambar 5.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2012-2016.....	73
Gambar 5.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2012-2016.....	73
Gambar 5.3	Perkembangan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kab. Wonosobo Tahun 2012-2016....	75
Gambar 5.4	Perkembangan Kepadatan Penduduk di Kab. Wonosobo Tahun 2012-2016.....	75

Gambar 5.5	Perkembangan Rasio Jenis Kelamin di Kab. Wonosobo Tahun 2012-2016.....	79
Gambar 5.6	Piramida Penduduk Kabupaten Wonosobo, 2016	82
Gambar 5.7	Perkembangan DR di Kab. Wonosobo Tahun, 2012-2016	84
Gambar 6.1	Perkembangan TPAK Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2017	95
Gambar 6.2	Perkembangan TKK Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2017	96
Gambar 6.3	Perkembangan TPT Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2017	97
Gambar 7.1	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-2016	108
Gambar 7.2	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan Tahun 2014-2016.....	110
Gambar 7.3	Jumlah Jembatan Menurut Kondisi Jembatan di Kabupaten Wonosobo, 2014-2016.....	113
Gambar 7.4	Jumlah Rambu-Rambu yang Terpasang di Kabupaten Wonosobo, 2014-2016.....	115
Gambar 7.5	Jumlah Pelanggan Telepon Rumah di Kabupaten Wonosobo, 2014-2016.....	117
Gambar 8.1	Jumlah Jamaah Haji Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo, 2013-2016.....	122
Gambar 8.2	Jumlah Kasus Kejahatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2013-2016.....	123
Gambar 8.3	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Wonosobo, 2013-2016.....	124
Gambar 8.4	Jumlah Narapidana yang Menghuni Rumah Tahanan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2013-2016	125
Gambar 9.1	Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Wonosobo, 2010-2017	137
Gambar 9.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kabupaten Wonosobo, 2010-2017	140
Gambar 10.1	Roadmap Perubahan Metodologi IPM.....	144
Gambar 10.2	Grafik Metode Baru IPM	147
Gambar 10.3	Mengukur Kecepatan IPM.....	152

Gambar 10.4	IPM Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu, 2012-2016	155
Gambar 11.1	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Kategori Tahun Dasar 2000 dan 2010	163
Gambar 12.1	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo, 2013-2017 (persen).....	185
Gambar 12.2	IHK Bulanan Kabupaten Wonosobo, 2016-2017	188
Gambar 13.1	Perubahan Struktur Komponen PDRB Pengeluaran Tahun 2010 ke 2016.....	193
Gambar 13.2	Rata-rata Laju Pertumbuhan Komponen PDRB Pengeluaran Tahun 2010 Ke 2016.....	194
Gambar 14.1	Jumlah Pengunjung Objek Wisata Dataran Tinggi Dieng yang Berasal dari Jawa Tengah, Luar Jawa Tengah, dan Mancanegara, 2014 dan 2016	208
Gambar 14.2	TPK Tahunan Hotel di Kabupaten Wonosobo, 2012-2016.....	211
Gambar 14.3	RLM Tahunan Hotel di Kabupaten Wonosobo, 2012-2016	213
Gambar 14.4	Rata-rata Lama Menginap Pada Akomodasi Hotel Menurut Bulan di Hotel di Kabupaten Wonosobo, 2016.....	214
Gambar 14.5	Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2016.....	215

Bab 1

Pendahuluan

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah, memerlukan bermacam-macam data statistik untuk dasar penentuan strategi dan kebijaksanaan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang telah diambil pada masa-masa yang lalu perlu dimonitor dan dilihat hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang merupakan ukuran kuantitas mutlak diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap, dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Pemerintah Daerah menaruh perhatian besar dalam pengembangan sistem data untuk memonitor perkembangan kemajuan disegala bidang, khususnya dibidang ekonomi, baik untuk tingkat Provinsi maupun untuk wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tekad pemerintah untuk memberikan otonomi penuh kepada pemerintah kabupaten sudah bulat dan akan segera dilaksanakan. Dengan demikian tuntutan akan tersedianya data statistik ekonomi makro sudah sangat mendesak.

1.2. Tujuan

Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi social ekonomi masyarakat di Kabupaten Wonosobo secara umum. Dalam publikasi ini dapat diperoleh gambaran pencapaian status sosial ekonomi masyarakat Wonosobo melalui berbagi indikator kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, agama dan sosial lain, serta perumahan dan lingkungan hidup. Selain itu juga dapat diperoleh berbagai indikator lain seperti Pendidikan, Kesehatan, IPM, Kemiskinan, Inflasi, Akomodasi, Keuangan Daerah, Transportasi, PDRB, Pemerataan Pendapatan dan Pembangunan Gender.

1.3. Sumber Data

Data yang disajikan dalam publikasi ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2016, Buku Wonosobo Dalam Angka Tahun 2017, kompilasi data dari instansi terkait, serta perhitungan dari berbagai survey Tahun 2017.

1.4. Sistematika Penyajian

Penyajian publikasi ini selain uraian singkat dan tabel juga disajikan konsep serta definisi dan juga cara penghitungannya, hal ini untuk memudahkan pengguna buku ini untuk memahami isinya.

Publikasi ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

I Pendahuluan

II Pendidikan

Penduduk Usia Sekolah, Keadaan Sarana Pendidikan,Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Kemampuan Membaca dan Menulis, Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.

III Kesehatan

Anak Lahir Hidup, Angka Penyebab Kesakitan, Sarana dan Prasarana Kesehatan, Fasilitas Kesehatan dan Cara Berobat, Status Kesehatan.

IV Perumahan dan Lingkungan Hidup

Berbagai Unsur Rumah/Tempat Tinggal, Fasilitas Perumahan.

V Penduduk

Jumlah Penduduk, Tingkat Kepadatan penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*), Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.

VI Ketenagakerjaan

Konsep dan Definisi, Indikator Ketenagakerjaan.

VII Transportasi dan Komunikasi

Transportasi, Komunikasi

VIII Agama dan Sosial

Penduduk Menurut Agama, Tempat Ibadah, Jamaah haji, Kasus Kejahatan dan Pelanggaran Lalu Lintas, Napi yang Menghuni Rutan Wonosobo.

IX Kemiskinan

Konsep Penduduk Miskin, Sumber Data, Kemiskinan Makro *versus* Kemiskinan Mikro, Konsep Garis Kemiskinan (GK), Teknik

- Penghitungan GKM, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, Perkembangan Tingkat kemiskinan Kabupaten Wonosobo, 2012-2017, Perubahan Garis Kemiskinan 2012-2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
- X Indeks Pembangunan Manusia
Konsep, Komponen IPM, Cara penghitungan IPM, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah, Paritas Daya Beli, Perkembangan IPM kabupaten Wonosobo Tahun 2012-2016
- XI PDRB Kabupaten
Nilai Nominal PDRB, Peranan/Kontribusi Sektor Ekonomi, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Perubahan Harga (Inflasi/Deflasi), PDRB per Kapita
- XII Inflasi
Pengantar, Pemilihan Komoditi, Formulasi Penghitungan Inflasi,
- XIII PDRB Pengeluaran
(1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).
- XIV Statistik Akomodasi
Pariwisata, Hotel
- XV Keuangan Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pendapatan Asli Daerah.

Bab 2

Pendidikan

PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu hak yang paling asasi yang harus dimiliki oleh setiap orang sehingga negara wajib memenuhi hak atas pendidikan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya. Pemenuhan hak atas pendidikan juga menjadi salah satu indikator apakah suatu negara dikategorikan negara maju, negara berkembang atau bahkan negara miskin. Sekaya apapun sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara tanpa didukung dari sumber daya manusianya yang berpendidikan tinggi, maka negara tersebut tidak akan bisa mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan sebaik-baiknya.

Pengaturan hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pasal tersebut bermakna bahwa negara berkewajiban memenuhi hak atas pendidikan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali tanpa membedakan suku, ras, agama, atau bahkan keadaan sosial dan ekonominya. Dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, dijelaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi layanan dasar khususnya pendidikan tertuang dalam salah satu misi RPJMD 2016-2021 yaitu Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata., Berdasarkan misi tersebut, beberapa kebijakan yang akan ditempuh adalah meningkatkan dan pemeratakan akses layanan

pendidikan formal dan non formal secara berkeadilan, meningkatkan mutu layanan pendidikan, meningkatkan mutu layanan pendidikan, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan sekolah inklusi.

2.1. Penduduk Usia Sekolah

Komitmen pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa antara lain terlihat dari semakin meningkatnya jumlah sekolah yang dibangun, dan pengangkatan tenaga guru dari tahun ketahun. Peningkatan tersebut agaknya merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari untuk menampung jumlah penduduk usia sekolah yang selalu meningkat terus sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk. Penduduk usia sekolah (7-24 tahun) di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2014 sebanyak 32,03 persen penduduk. Penyediaan dan pemerataan kesempatan belajar bagi penduduk usia sekolah perlu dipikirkan, disamping perlunya peningkatan mutu dan profesi tenaga pendidiknya. Program pendidikan dasar bertujuan untuk membina pendidikan pra sekolah pada Taman Kanak-Kanak (TK), upaya penyediaan kesempatan belajar bagi anak berkelainan (SDLB dan SLB), dan sebagai pendidikan semua anak usia 7–12 tahun melalui pembinaan Sekolah Dasar (SD).

Upaya pemerintah daerah pada sektor pendidikan juga dilaksanakan dengan model kelas jauh di daerah terpencil atau pada kantong-kantong pemukiman yang tidak dapat diselenggarakan dengan SD konvensional. Peningkatan pembinaan bagi tamatan pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Tingkat Atas (baik umum maupun kejuruan) untuk pengembangan kepribadian

sesuai dengan perkembangan lingkungan. Program pembinaan pendidikan tinggi bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli untuk mengisi jaringan teknostruktur masyarakat melalui pendidikan, penelitian dan karya ilmiah, informasi dan jasa dengan kelompok sasaran para tamatan SLTA.

Dikaitkan dengan struktur pembangunan lainnya seperti tenaga kerja, kesehatan dan lingkungan, maka keberhasilan pendidikan dengan mutu yang baik akan memberikan dampak positif. Misalnya sektor tenaga kerja, pendidikan dengan mutu yang baik setidaknya memberikan bekal pengetahuan dasar secara umum. Hal ini, akan mempermudah pengembangan keahlian lanjutan oleh pihak tertentu atau Departemen Tenaga Kerja melalui kegiatan-kegiatan latihan di Balai Latihan Kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja.

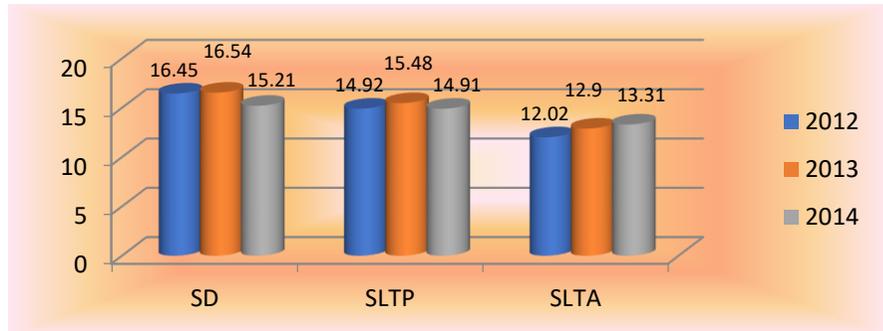
Dari sektor kesehatan dan lingkungan misalnya, keberhasilan pendidikan dengan mutu yang baik, paling tidak setiap penduduk yang telah mengenyam pendidikan akan mengetahui prinsip dasar hidup sehat yang berwawasan lingkungan, demikian juga halnya pembangunan di sektor lain akan merasakan dampak positif dari hasil pembangunan pendidikan yang mutunya lebih baik. Sebaliknya apabila mutu pendidikan rendah atau rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia akan berdampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Jadi peningkatan mutu pendidikan atau kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Wonosobo mutlak menjadi perhatian demi suksesnya pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya.

2.2. Keadaan Sarana Pendidikan

Rasio murid-guru dan murid-kelas merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingkat ketersediaan sarana pendidikan. Semakin kecil rasio, berarti semakin baik keadaan fasilitas pendidikan yang tersedia. Selain itu rasio murid-guru menggambarkan kepadatan kelas sebagai ruang belajar.

Sebagai gambaran umum, perkembangan prasarana dan sarana pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk jumlah sekolah, murid dan guru, serta rasio antara murid-sekolah, murid-guru, dan guru-sekolah pada tahun 2014 memperlihatkan adanya kenaikan secara kuantitas dan kualitas. Pengadaan/pengangkatan guru secara umum dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang dibandingkan dengan peningkatan jumlah murid serta penambahan sekolah pada ke tiga jenjang pendidikan (SD, SLTP dan SLTA), yang semakin merata sampai ke pelosok pedesaan terutama di daerah terpencil dan kantong-kantong pemukiman yang terpencar. Oleh sebab itu jumlah sekolah yang ada dibandingkan dengan guru yang tersedia makin seimbang, khususnya daerah yang terpencil. Sementara penambahan jumlah murid relatif meningkat, penambahan guru maupun jumlah sekolahnya juga bertambah. Rasio murid-guru pada masing-masing tingkatan sekolah pada tahun 2012 adalah SD = 16,45, SLTP = 14,92, dan SLTA = 12,02, pada tahun 2014 menjadi : SD = 15,21, SLTP = 14,91 dan SLTA = 13,31. Ini berarti bahwa satu orang guru mengajar 13 – 15 murid. Keadaan ini menggambarkan bahwa mutu pendidikan semakin ditingkatkan dengan menambah jumlah guru, terutama pada pendidikan dasar. Program wajib belajar 9 tahun juga meningkatkan

kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sampai 9 tahun.



Sumber : Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Wonosobo 2015

Gambar 2.1 Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Tingkat Sekolah, 2012 - 2014

2.3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Indikator ini menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

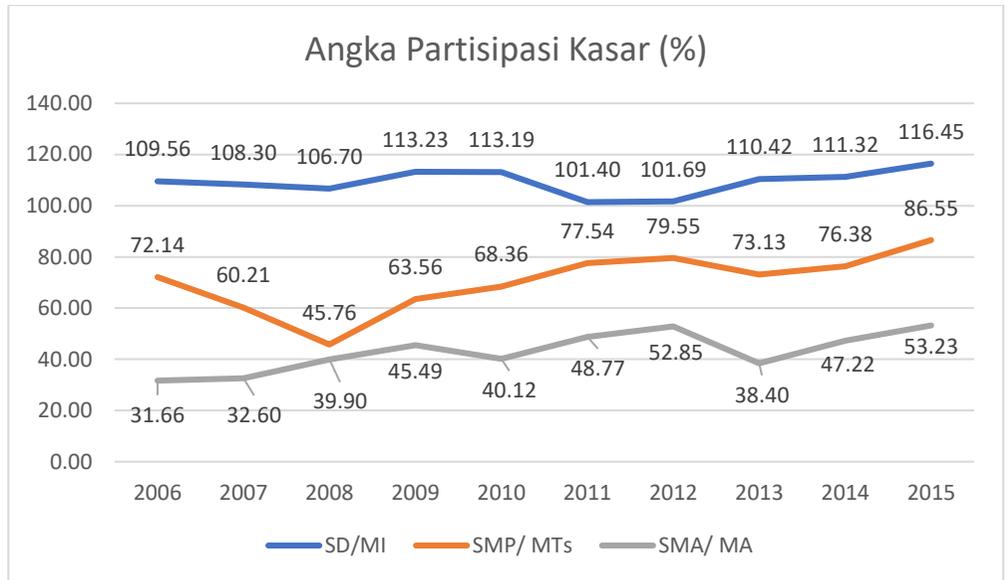
Rumus yang digunakan untuk menghitung APK adalah :

$$\text{APK SD} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah diSD}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK SLTP} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah di SLTP}}{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK SLTA} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah diSLTA}}{\text{Jumlah penduduk umur 16-18 tahun}} \times 100\%$$

Secara umum, tingkat partisipasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Wonosobo mengalami kenaikan selama sepuluh tahun terakhir. Demikian pula partisipasi sekolah baik pada laki-laki maupun perempuan, selama sepuluh tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Sektor pendidikan masih perlu ditingkatkan terus, karena pendidikan merupakan dasar dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin luas pola pikir masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya.



Sumber : Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Wonosobo 2016

Gambar 2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Wonosobo, 2006-2015

Gambar 2.2. menunjukkan APK SD/MI tahun 2015 sebesar 116,5 persen. Sedangkan untuk APK tingkat SMP/MTs dan SMA/MA masing-masing sebesar 86,55 persen dan 53,23 persen.

2.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama penduduk usia muda. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 7 – 12 tahun menggambarkan persentase penduduk berumur 7 – 12 tahun yang masih sekolah baik di SD maupun SLTP.

$$APS_{(7-12)} = \frac{\text{Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun yang masih sekolah}}{\text{Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun}} \times 100$$

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 13–15 tahun menggambarkan persentase penduduk berumur 13–15 tahun yang masih sekolah baik di SD, SLTP maupun SLTA.

$$APS_{(13-15)} = \frac{\text{Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun yang masih sekolah}}{\text{Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun}} \times 100$$

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 16–18 tahun menggambarkan persentase penduduk berumur 16–18 tahun yang masih sekolah baik di SLTP, SLTA maupun Perguruan Tinggi.

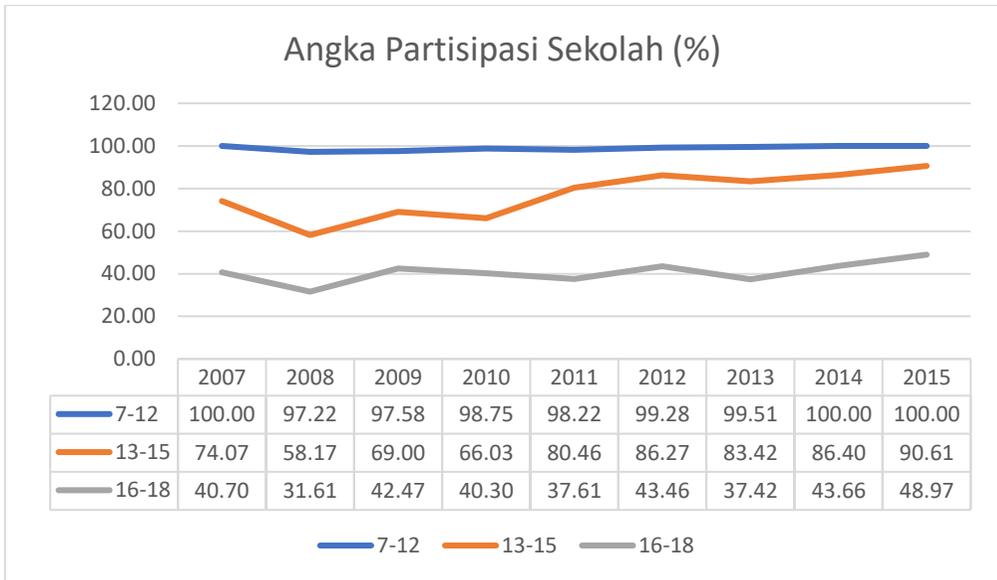
$$APS_{(16-18)} = \frac{\text{Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun yang masih sekolah}}{\text{Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun}} \times 100$$

Pengkajian partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Wonosobo pada setiap jenjang pendidikan (Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah), diharapkan dapat memberikan gambaran kualitas Sumber Daya Manusia yang potensial di masa datang. Dalam hal ini, salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat tingkat partisipasi pendidikan adalah GER (*Gross Enrollment Ratio*), berdasarkan data Sensus Penduduk dan Survei Sosial Ekonomi Nasional. Definisi GER

adalah penduduk yang masih sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan penduduk usia sekolah yang bersangkutan.

Dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, tingkat partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Wonosobo telah meningkat, baik perempuan maupun laki-laki. Keadaan ini cukup menggembirakan karena partisipasi sekolah memang diharapkan dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Peningkatan penduduk yang bersekolah selama tahun 2007-2015 merupakan keberhasilan Kabupaten Wonosobo dalam upaya memperluas pelayanan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah penduduk di Kabupaten Wonosobo yang cenderung semakin meningkat. Perbandingan antara kelompok usia penduduk tingkat pendidikan tampak bahwa APS anak usia tingkat pendidikan SD (7-12 tahun) lebih tinggi dibandingkan APS usia SLTP (13-15 tahun). Pada tahun 2015 APS usia 7-12 tahun mencapai 100,00 persen dan APS usia SLTP sebesar 90,61 persen. APS usia penduduk tingkat pendidikan SLTP yang lebih rendah dibanding APS usia SD dapat dipahami karena kondisi geografis wilayah Kabupaten Wonosobo yang berbukit-bukit dan sulit ditempuh dan juga jarak rumah ke sekolah tingkat SLTP yang jauh, sehingga belum meliputi seluruh anak usia 13-15 tahun yang ada.



Sumber : BPS Kab. Wonosobo, 2017

Gambar 2.3 Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wonosobo, 2007-2015

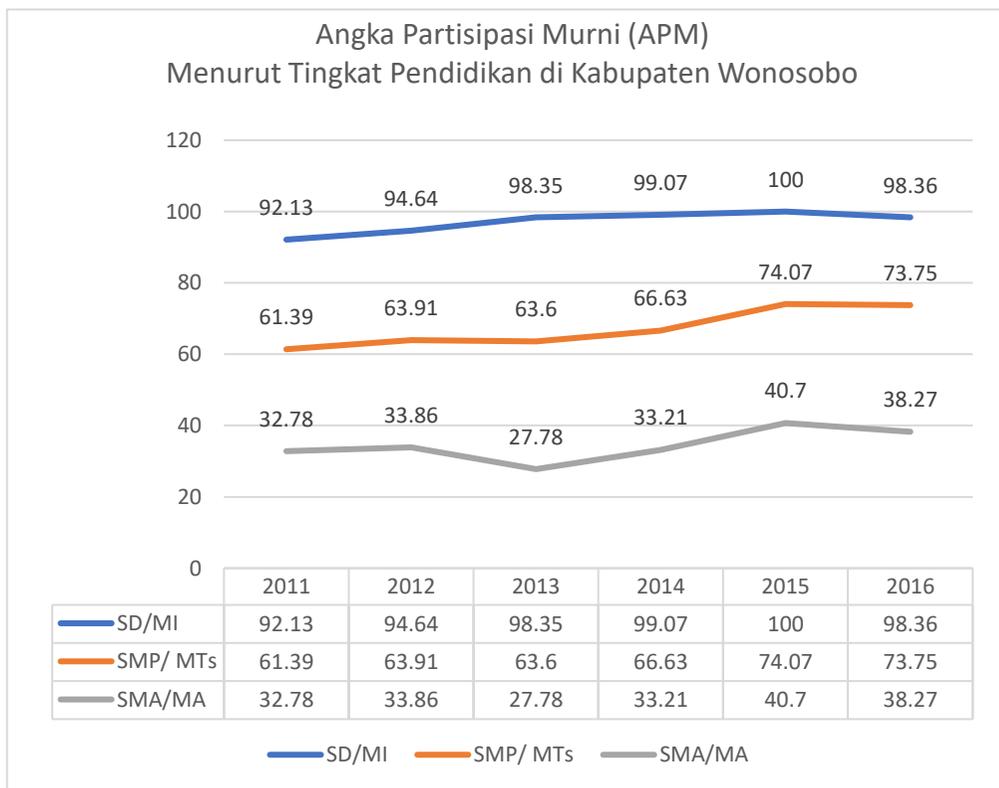
2.5. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi jumlah anak yang bersekolah tepat waktu. Bila semua anak bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

$$\text{APM SD} = \frac{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 tahun yang sekolah diSD}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APM SLTP} = \frac{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun yang sekolah diSLTP}}{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APMSLTA} = \frac{\text{Jumlah penduduk umur 16-18 tahun yang sekolah diSLTA}}{\text{Jumlah penduduk umur 16-18 tahun}} \times 100\%$$



Sumber : BPS Kab. Wonosobo, 2017

Gambar 2.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Wonosobo, 2012-2016

Pada Gambar 2.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sebesar 98,36 persen penduduk berumur 7-12 tahun sedang bersekolah di Sekolah Dasar. Sementara itu, penduduk umur 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTs sebesar 73,75 persen, dan penduduk umur 16-18 tahun yang sekolah di SMA/MA sebesar 38,27. Selama kurun waktu 2015-2016 APM di Kabupaten Wonosobo menunjukkan penurunan pada semua jenjang pendidikan dasar. Angka partisipasi sekolah untuk SD/MI menurun yaitu dari 100,00 persen menjadi 98,36 persen. Sedangkan angka partisipasi sekolah untuk SMP/MTs juga mengalami penurunan dari 74,07 persen menjadi 73,75 persen. Demikian juga pada tingkat SMA/MA, angka partisipasi sekolah menurun dari 40,70 persen menjadi 38,27 persen.

2.6. Kemampuan Membaca dan Menulis

Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH)

Kegiatan membaca merupakan proses awal memasuki dunia pengetahuan yang begitu luas menuju masyarakat maju. Membaca akan mempermudah seseorang untuk memahami informasi terkait bidang kerja dan berbagi aspek yang menyangkut peningkatan kualitas hidup. Kemampuan baca tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuan hidupnya, hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Angka Melek Huruf adalah tolok ukur penting dalam mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah.

AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan.

Indikator Melek Huruf dapat digunakan untuk

- Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD masih tinggi.
- Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
- Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Angka melek huruf dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk dewasa (usia 10 tahun keatas) yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 10 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan seratus.

$$\text{AMH} = \frac{\text{Penduduk umur 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis}}{\text{Jumlah penduduk umur 10 tahun ke atas}} \times 100$$

Kebalikan angka melek huruf adalah angka buta huruf yang menunjukkan ketertinggalan sekelompok penduduk tertentu dalam mencapai pendidikan. Buta huruf dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan membaca dan menulis. Secara konsep Angka Buta Huruf dihitung dari persentase populasi dewasa yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

Buta huruf sangat terkait dengan kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, serta ketidakberdayaan masyarakat. Tingginya angka buta huruf disebabkan karena:

- a. Tingginya angka putus sekolah SD
- b. Beratnya kondisi geografis di Kabupaten Wonosobo
- c. Munculnya penyandang buta huruf baru
- d. Pengaruh faktor sosiologis masyarakat

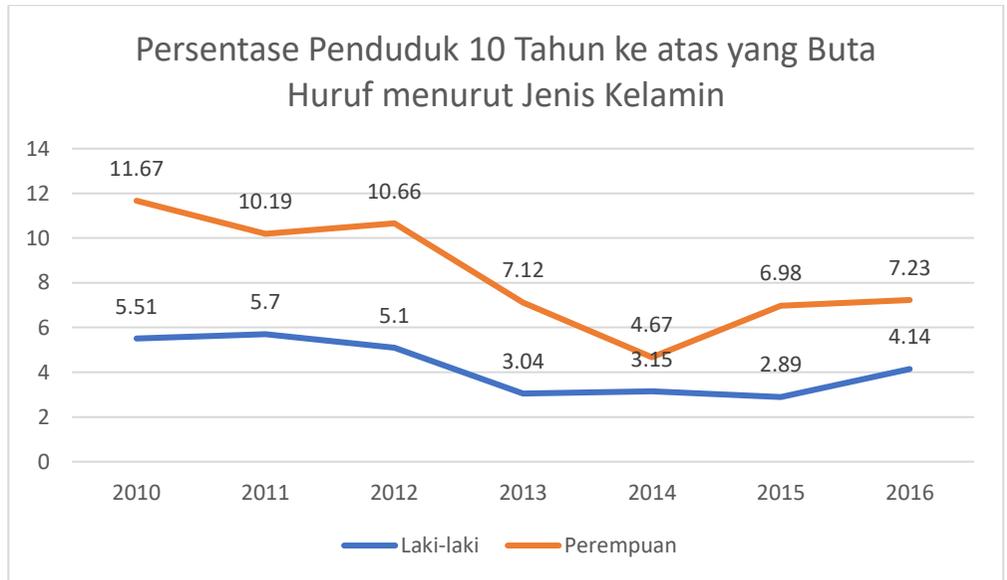
Angka Buta Huruf biasanya dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk dewasa (usia 10 tahun keatas) yang tidak dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 10 tahun keatas dikalikan seratus.

$$\text{ABH} = \frac{\text{Penduduk umur 10 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis}}{\text{Jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas}} \times 100$$

Salah satu keberhasilan program pendidikan ditunjukkan dengan semakin berkurangnya tingkat buta huruf penduduk yang berumur 10 tahun keatas. Tingkat buta huruf merupakan bagian dari indicator kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis. Kemampuan baca tulis merupakan pengetahuan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk mencapai hidup sejahtera. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah berusaha agar penduduk laki-laki maupun perempuan disegala lapisan masyarakat dapat terbebaskan dari buta aksara. Usaha pemerintah selama ini antara lain diwujudkan dengan program wajib belajar 9 tahun dan program kejar paket A dan B.

Dampak dari gerakan wajib belajar di tingkat dasar (penduduk usia 7-15 tahun) yang telah dilancarkan sejak tiga dasawarsa terakhir dapat terlihat melalui penurunan jumlah penduduk baik perkotaan maupun perdesaan yang tidak bisa baca tulis (Tabel 2.4.). Dari profil angka buta huruf penduduk Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 diketahui bahwa persentase penduduk perempuan berumur 10 tahun keatas yang buta huruf sebesar 7,23 % dan penduduk laki-laki berumur 10 tahun keatas yang buta huruf sebesar 4,14%. Tingginya angka buta huruf perempuan dibanding laki-laki menunjukkan, bahwa jumlah perempuan yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan lebih banyak dibanding laki-laki. Penyebab dari keadaan ini diduga terkait dengan kemampuan ekonomi keluarga yang kurang memadai dan keadaan geografis yang kurang menguntungkan di mana fasilitas yang tersedia berlokasi di tempat yang jauh dari jangkauan penduduk setempat.

Keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat buta huruf penduduk Kabupaten Wonosobo sebagian besar dipengaruhi oleh tingkat buta huruf penduduk perempuan yang lebih besar tersebut. Meskipun rendah, namun diferensiasi angka buta huruf laki-laki dan perempuan di atas memperlihatkan kesenjangan apakah sosial budaya maupun kesempatan antara kedua populasi itu masih ada.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Wonosobo, 2017

Gambar 2.5 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo, 2010–2016

Dari gambaran yang dikemukakan di atas kiranya jelas bahwa perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk pemberantasan buta huruf di Kabupaten Wonosobo, dan upaya tersebut perlu diprioritaskan pada penduduk perempuan khususnya di daerah perdesaan. Hal ini mengingat bahwa akselerasi pemberantasan buta huruf masih berjalan cukup lambat walaupun ini telah dilancarkan sejak satu dasawarsa terakhir.

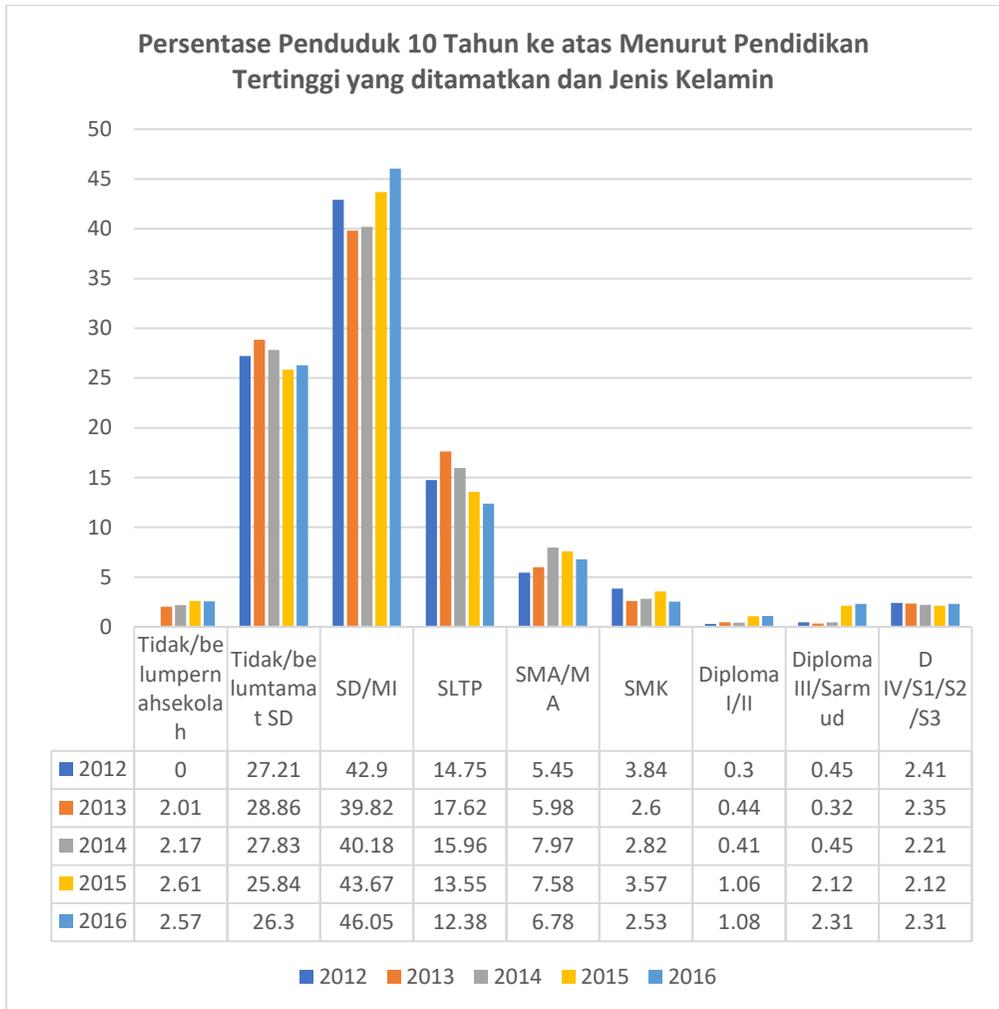
2.7. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Indikator ini menunjukkan keterkaitan sistem pendidikan dalam membidik sub kelompok penduduk dewasa (15 tahun keatas). Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat

pendidikan masyarakat semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Daya saing suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari kualitas sumber daya manusia yang merupakan modal dasar pembangunan bangsa. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat dilihat dari ijazah tertinggi yang dimiliki atau surat kelulusan dari sekolah bagi yang baru lulus tapi belum menerima ijazah.

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka seseorang akan dapat lebih mudah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menyerap kemajuan teknologi. Kemajuan yang dicapai oleh suatu bangsa antara lain ditentukan oleh tingkat pendidikan penduduknya. Berkaitan dengan hal ini, penting untuk diketahui perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo terutama dari tingkat pendidikan tertinggi yang berhasil ditamatkan.

Peningkatan persentase penduduk laki-laki dan perempuan berpendidikan menengah dan tinggi merupakan keberhasilan pelaksanaan program pendidikan di Kabupaten Wonosobo (selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.6).



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Wonosobo, 2017

Gambar 2.6 Grafik Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo, 2012– 2016

Gambar 2.6 diatas menunjukkan persentase penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin pada tahun 2016. Dari tabel tersebut terlihat bahwa ada kecenderungan pendidikan yang ditamatkan terfokus pada tingkat menengah (terutama pendidikan menengah pertama). Hal ini merupakan bukti

keberhasilan Program Pemerintah tentang kebijakan pendidikan Wajar 9 tahun, namun di lain sisi juga menunjukkan bahwa secara umum tingkat pendidikan penduduk Wonosobo masih rendah karena rata-rata hanya lulusan SD dan SLTP, sementara penduduk yang lulus SMA dan perguruan tinggi masih sedikit. Kondisi ini mempengaruhi kualitas sumber daya manusia masyarakat Wonosobo secara umum, sehingga menjadi tanggung jawab semua pihak untuk dapat mendorong anak-anak usia sekolah agar dapat melanjutkan pendidikan sampai ke tingkat SMA dan Perguruan Tinggi.

Bab 3

Kesehatan

KESEHATAN

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diselenggarakan pada semua bidang kehidupan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dengan demikian, pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunannasional. Gambaran tentang kondisi derajat kesehatan masyarakat terukur pada indikator Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Status Gizi masyarakat.

Upaya kesehatan di Kabupaten Wonosobo sejauh ini telah diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan yang makin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Disamping itu dalam penanganan faktor-faktor tersebut harus dilakukan secara terarah dan terpadu dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan khususnya di bidang kesehatan, berikut ini disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan upaya perbaikan kesehatan dan gizi, pemanfaatan fasilitas kesehatan, status kesehatan dan gizi, dan indikator penunjang lainnya, begitu juga hasil yang telah dicapai akan diuraikan pada bab ini.

3.1. Anak Lahir Hidup

Bayi dan balita merupakan golongan masyarakat yang dianggap paling rawan dari aspek kesehatan. Indikator yang berkaitan dengan

kesakitan dan kematian bayi merupakan indikator penting dan sering dipakai untuk mengukur kemajuan suatu daerah, khususnya kemajuan bidang kesehatan. Hal ini dikarenakan kesejahteraan bayi/balita sangat berkaitan erat dengan kondisi lingkungan dimana orang tuanya bertempat tinggal serta tingkat sosial ekonomi orang tua tersebut. Untuk itu ada yang berpendapat bahwa taraf hidup kesehatan bayi/balita adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan suatu daerah. Hal ini dimungkinkan karena bagaimanapun juga anak-anak adalah generasi penerus yang merupakan sumber daya manusia guna menunjang pembangunan di masa mendatang.

Rata-rata anak lahir hidup merupakan perbandingan antara banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang ibu dengan banyaknya ibu. Anak Lahir Hidup (ALH) merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah kelahiran hidup dari sekelompok penduduk perempuan selama masa reproduksinya. Pengaruh umur pada paritas ALH mencerminkan pola hubungan yang positif, artinya, semakin tinggi umur perempuan, semakin banyak anak yang dimiliki, karena masa kemungkinan hamil semakin panjang (*time of exposure to risk*). Hubungan ini selain mencerminkan hubungan proses pembentukan keluarga, dapat juga memperlihatkan proses perubahan fertilitas antar waktu.

Tabel 3.1. disajikan data rata-rata anak yang pernah dilahirkan tahun 2010-2013. Rata-rata Anak Lahir Hidup per wanita 15 – 49 tahun di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2014 adalah 2,05 dengan rata-rata anak masih hidup 1,93, keadaan ini dirasa cukup baik,

sehingga pemerintah dinilai cukup berhasil dalam menekan jumlah kelahiran.

Perubahan fertilitas kumulatif menurut umur dari satu periode ke periode berikutnya dapat mencerminkan perubahan fertilitas menurut *Kohort*. Kendati hal ini tidak terlalu tepat, karena perempuan yang diamati pada suatu tahun sensus belum tentu merupakan perempuan yang sama pada tahun sensus berikutnya.

Tabel 3.1 Persentase Wanita 15–49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Rata–rata Anak Lahir Hidup di Kabupaten Wonosobo, 2010 - 2014

Tahun	Persentase Wanita		Rata – rata Anak	
	Pernah Kawin		Lahir Hidup	Masih Hidup
(1)	(2)		(5)	(6)
2010	2,39		2,31	2,07
2011	2,44		2,02	1,90
2012	2,40		2,17	2,01
2013	2,43		2,05	1,93
2014	2,34		2,05	1,93

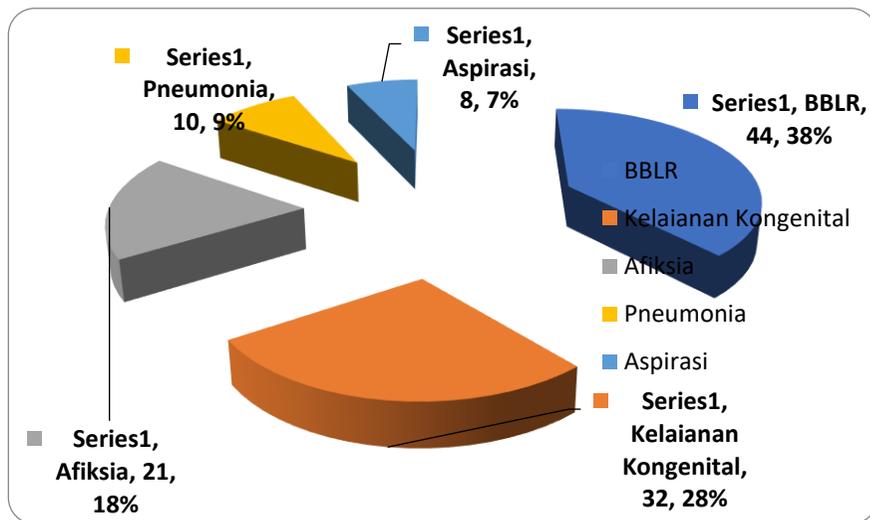
Sumber :BPS, Susenas Tahun 2014

3.2. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi (0 – 12 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat

pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Apabila AKB di suatu wilayah tinggi, berarti status kesehatan di wilayah tersebut rendah.

Angka kematian bayi di Kabupaten Wonosobo tahun 2016 yaitu sebesar 12,83/ 1000 kelahiran hidup, meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 9,66/1.000 kelahiran hidup. Lima besar penyebab kematian bayi di Kabupaten Wonosobo tahun 2016 adalah BBLR sejumlah 44 kasus (26,27%) selanjutnya Kelainan kongenital 32 kasus (19,39%), asfiksia 21 kasus (12,73%), pneumonia 10 kasus (6,06%) dan aspirasi 8 kasus (4,48%).

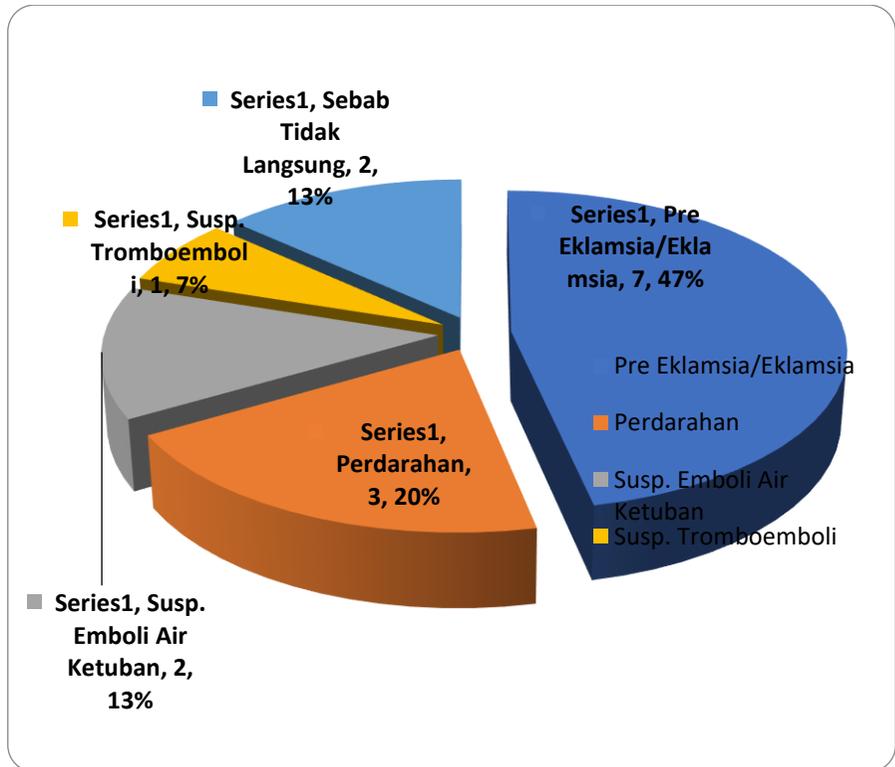


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo

Gambar 3.1 Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2016 Berdasarkan Penyebab Kematian

3.3. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu biasanya terjadi karena tidak mempunyai akses ke pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan dari Bidang Pelayanan Kesehatan, kematian ibu di Kabupaten Wonosobo tahun 2015 Angka Kematian Ibu ini sebesar 84 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kasus sebanyak 11 kasus. Sedangkan Pada tahun 2016 angka kematian ibu mengalami kenaikan menjadi sebesar 116,56 per 100.000 Kelahiran hidup atau sejumlah 15 kasus yang tersebar di 10 Kecamatan yaitu Sapuran 3 kasus, Kepil 2 kasus, Wonosobo 3 kasus, Kertek 2 kasus, Kalibawang 1 kasus, Selomerto 2 kasus, Leksono 1 kasus dan Mojotengah 1 kasus dengan Penyebab langsung dan tidak langsung. Kematian ibu oleh sebab langsung ada 13 kasus yaitu oleh sebab *Pre Eklampsia/ Eklampsia* 7 kasus (46,67%), perdarahan 3 kasus (20%), *Susp. Emboli Air ketuban* 2 kasus (13,33%), *Susp. Tromboemboli Paru* 1 kasus (6,67%), sedangkan kematian oleh sebab tidak langsung ada 2 kasus yaitu 1 kasus (6,67%) *Acute Fatty Liver Of Pregnancy* dan 1 kasus (6,67%) *Meningo Encephalitis*. Distribusi kasus kematian ibu berdasarkan penyebab kematian ibu dapat dilihat pada Bagan 1.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo

Gambar 3.2. Angka Kematian Ibu Tahun 2016 Berdasarkan Penyebab Kematian

Keadaan saat ibu meninggal terbagi dalam 3 waktu/ periode kematian yaitu hamil, melahirkan, sesudah melahirkan. Kejadian terbanyak pada waktu sesudah melahirkan sejumlah 10 Kasus (66,67%), pada waktu bersalin 4 kasus (26,67%) dan 1 kasus pada waktu hamil (6,67%). Angka tersebut menunjukkan bahwa angka kematian ibu di Kabupaten Wonosobo masih jauh dari yang diharapkan untuk dapat mencapai target renstra kabupaten yaitu 10 kasus, jika tidak dilakukan intervensi yang signifikan dan efektif. Terdapat tiga jenis intervensi yang dapat dilakukan untuk

menurunkan angka kematian ibu yaitu melalui (1). Peningkatan pelayanan antenatal yang mampu mendeteksi dan menangani kasus resiko tinggi secara memadai, (2). Pertolongan persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga kesehatan terampil, pelayanan pasca persalinan dan kelahiran, serta (3). Pelayanan emergency kebidanandan neonatal dasar (PONED) dan komprehensif (PONEK) yang dapat dijangkau.

3.4. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Angka BBLR pada tahun 2015 sebanyak 622 kasus dari 13.044 lahir hidup. Untuk target cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan sebesar 100% dan capaian target SPM berturut turut dari tahun 2011 sampai dengan 2015 sebesar 100%. Kasus gizi buruk tahun 2016 sebanyak 64 kasus dari 53.357 balita yang ditimbang (0,12%)

3.5. Angka Penyebab Kesakitan

1. Angka "Acute Flaccid Paralysis" (AFP)

Dalam upaya untuk membebaskan Indonesia dari Penyakit Polio, pemerintah telah melaksanakan Program Eradikasi Polio (ERAPO) yang terdiri dari pemberian imunisasi polio rutin, pemberian imunisasi masal pada anak balita melalui PIN (Pekan Imunisasi Nasional) dan surveilans AFP. Surveilans AFP adalah pengamatan dan penjarangan semua kelumpuhan yang terjadi secara mendadak dan sifatnya *flaccid* (layuh), seperti sifat kelumpuhan pada *poliomyelitis*.

Secara statistik jumlah penderita kelumpuhan AFP diperkirakan minimal 2 diantara 100.000 anak usia < 15 tahun. Tahun 2016 di

Kabupaten Wonosobo menemukan penderita AFP non Polio sebanyak 5 kasus yang tersebar di Wilayah Kerja Puskesmas Mojotengah 2 kasus, Puskesmas Garung 1 kasus, Puskesmas Wadaslintang I 1 kasus dan Puskesmas Kalikajar II 1 kasus. Setelah dilakukan Evaluasi kunjungan 60 hari semua kasus dalam keadaan membaik. Sedangkan tahun 2015 di Kabupaten Wonosobo menemukan penderita AFP non Polio sebanyak 4 kasus.

2. Angka Penemuan Penderita TB

Case Notification Rate (CNR) atau jumlah semua kasus TB yang dilaporkan di Kabupaten Wonosobo tahun 2016 sebesar 133,55 / 100.000 penduduk sedangkan CNR 2015 sebesar 104,94 / 100.000 penduduk. Kenaikan angka CNR didukung oleh semakin meningkatnya surveilans TB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Wonosobo dan kegiatan skrining TB di Wilayah Puskesmas dan Jaringannya. Keberhasilan pelaksanaan Program penanggulangan TB paru dapat diukur dari pencapaian angka keberhasilan pengobatan penderita TB (*Succses Rate*). Angka keberhasilan pengobatan penderita TB tahun 2016 sebesar 92,21 % sedangkan capaian angka keberhasilan pengobatan TB tahun 2015 sebesar 83,28 %.

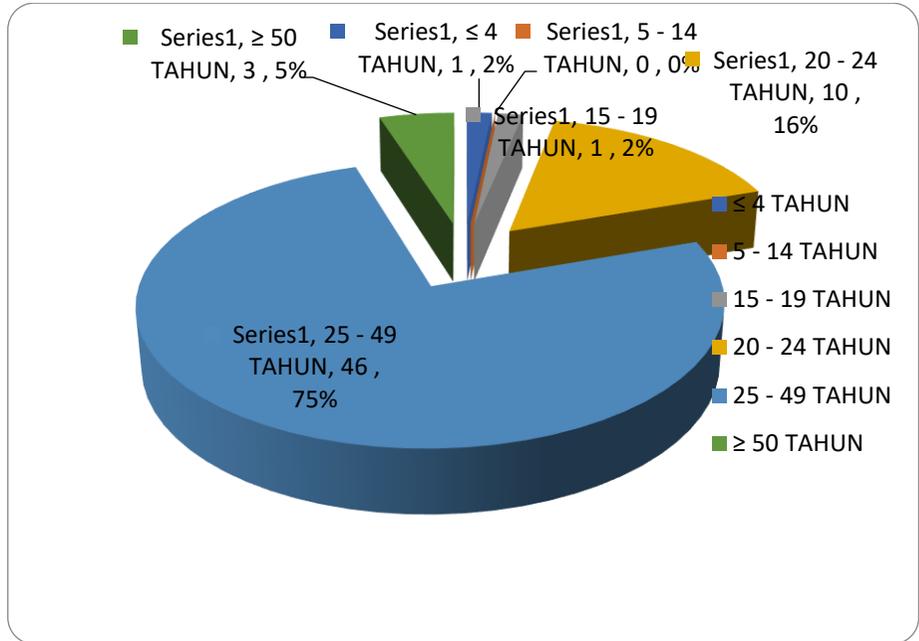
3. Persentase balita dengan Pnemonia Ditangani

Cakupan penemuan penderita pneumonia Balita di Kabupaten Wonosobo tahun 2015 sebesar 23,47% mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 50,75 %. Peningkatan capaian target di tahun 2016 didukung oleh 1. Refresing tatalaksana pneumoni melalui MTBS kepada bidan koordinator dan pemegang program seluruh

puskesmas di Kabupaten Wonosobo, 2. Poli MTBS di Puskesmas yang masin aktif dalam melakukan Tatalaksana Pneumoni, 3. Perubahan target perhitungan penemuan penderita Pneumoni Balita dari 10% menjadi 5%.

4. Jumlah Kasus HIV/AIDS

Jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan di Kabupaten Wonosobo tahun 2016 sebanyak 61 kasus dengan kasus terbanyak pada kelompok umur 25-49 tahun yaitu 45 kasus mengalami penurunan apabila dilihat pada tahun 2015 sebanyak 76 kasus. Kasus terbanyak terjadi pada kelompok umur 25-49 tahun sebanyak 60 kasus dengan proporsi kelompok umur 78,95%. Pada dua tahun terakhir kasus terbanyak pada kelompok umur 25-49 tahun hal ini dikarenakan kelompok umur tersebut adalah kelompok umur produktif dengan mobilitas yang tinggi dan akses ke pelayanan kesehatan tinggi juga. Kejadian HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es dimana kasus yang sudah ditemukan merupakan bagian kecil dari kasus keseluruhan. Untuk meningkatkan penemuan kasus Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan VCT Mobile dan menambah layanan-layanan pemeriksaan HIV yang sudah ada. Distribusi Kasus HIV/AIDS menurut kelompok Umur Tahun 2016 dapat dilihat pada Bagan 3.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo

Gambar 3.3. Kasus HIV/AIDS Tahun 2016 Menurut Golongan Umur

5. Angka Kesakitan DBD

Jumlah kasus DBD di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 sebanyak 176 kasus dengan Incidence Rate (IR) sebesar 22,44/100.000 penduduk.

mengalami kenaikan dari kasus tahun 2015 yang sebanyak 34 kasus dengan Incidence Rate (IR) sebesar 4,4/100.000 penduduk. Kenaikan ini dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain mobilitas masyarakat yang lebih tinggi sehingga menyebabkan beberapa kasus import, curah hujan yang tinggi yang menyebabkan kepadatan vektor naik dan pemberdayaan masyarakat tentang pelaksanaan 3M

(Menutup Mengubur Menguras) kurang sehingga kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan 3M juga berkurang.

6. Persentase Diare Ditangani

Perkiraan penemuan diare di Kabupaten Wonosobo tahun 2016 sebanyak 16.275 dan jumlah kasus yang ditemukan dan ditangani sebanyak 12.832 kasus (78,8%), angka ini mengalami penurunan angka absolut penemuan akan tetapi mengalami kenaikan persentase dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 13.898 kasus dikarenakan perubahan jumlah perkiraan kesakitan karena diare dari 411/1000 penduduk menjadi 214/1000 penduduk yang tertuang dalam Buku Pedoman Tata Laksana Diare Tahun 2016 sehingga angka pembagi pada target penemuan diare semakin kecil.

7. Angka Kesakitan Malaria

Penyakit malaria masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2016 ditemukan sebanyak 18 kasus malaria import, API (*Annual Parasit Incident*) atau angka kesakitan malaria sebesar 0,02. Angka ini mengalami kenaikan jumlah kasus dibanding dengan kasus tahun 2015 sebanyak 13 kasus. Namun demikian kasus yang ditemukan di Wonosobo seluruhnya adalah kasus import.

8. Jumlah Kasus dan Angka Kesakitan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I)

Penyakit yang termasuk PD3I adalah Polio, Campak, Difteri dan Tetanus Neonatorum. Dalam upaya untuk membebaskan Indonesia dari penyakit tersebut, diperlukan komitmen global untuk menekan turunnya angka kesakitan dan kematian yang lebih banyak dikenal

dengan Eradikasi Polio (ERAPO), Redukasi Campak (Redcam) dan Eliminasi Tetanus Neonatorum (ETN).

Saat ini telah dilaksanakan Program Surveilans Integrasi PD3I, yaitu pengamatan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Difteri, Tetanus Neonatorum, dan Campak). Tahun 2016 kasus PD3I yang ada hanya Campak sebanyak 280 kasus sedangkan tahun 2015 kasus PD3I yang ada juga hanya Campak sebanyak 393 kasus.

9. Penyakit Tidak Menular

Penyakit tidak menular (PTM) yang diintervensi meliputi jantung koroner, dekompensasio kordis, hipertensi, stroke, diabetes militus, kanker serviks, kanker payudara, kanker hati, kanker paru, penyakit paru obstruktif kronis, asma bronkiale dan kecelakaan lalu lintas. Penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskuler, stroke, diabetes militus, penyakit paru obstruktif kronis dan kanker tertentu, dalam kesehatan masyarakat sebenarnya dapat digolongkan sebagai satu kelompok PTM utama yang mempunyai factor risiko sama (*common underlying risk factor*). Factor risiko tersebut antara lain factor genetik merupakan faktor yang tidak dapat diubah (*unchanged risk factor*), dan sebagian besar berkaitan dengan faktor risiko yang dapat diubah (*changed risk factor*) antara lain konsumsi rokok, pola makan yang tidak seimbang, makanan yang mengandung zat aditif, kurang berolah raga dan adanya kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap kesehatan.

Penyakit tidak menular mempunyai dampak negatif sangat besar karena merupakan penyakit kronis. Apabila seseorang menderita penyakit tidak menular, berbagai tingkatan produktifitas menjadi

terganggu. Penderita ini menjadi serba terbatas aktifitasnya, karena menyesuaikan diri dengan jenis dan gradasi dari penyakit tidak menular yang dideritanya. Hal ini berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan tidak diketahui kapan sembuhnya karena memang secara medis penyakit tidak menular tidak bisa disembuhkan tetapi hanya bisa dikendalikan. Sampai saat ini yang harus mendapat perhatian lebih adalah bahwa penyakit tidak menular merupakan penyebab kematian tertinggi dibanding dengan penyakit menular.

Beberapa penyakit tidak menular yang ada di Kabupaten Wonosobo yang dilaporkan adalah :

a) Hipertensi

Hipertensi atau sering disebut dengan tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan dimana terjadi peningkatan tekanan darah yang memberi gejala berlanjut pada suatu target organ tubuh sehingga timbul kerusakan lebih berat seperti stroke (terjadi pada otak dan berdampak pada kematian yang tinggi), penyakit jantung koroner (terjadi pada kerusakan pembuluh darah jantung) serta penyempitan ventrikel kiri/bilik kiri (terjadi pada otot jantung).

Hipertensi merupakan penyakit yang sering dijumpai diantara penyakit tidak menular lainnya. Hipertensi menempati urutan pertama pada 10 besar penyakit tidak menular di Kabupaten Wonosobo. Prevalensi kasus hipertensi di Kabupaten Wonosobo tahun 2016 sebesar 0,74 % dengan jumlah kasus sebanyak 5.665 kasus menurun dari jumlah kasus di tahun 2015 sebanyak 8.342 kasus. Penurunan ini didukung oleh kegiatan Deteksi Dini Faktor

Risiko Penyakit Tidak Menular melalui Posbindu dan Pelayanan Terpadu PTM di Fasilitas Kesehatan.

b) Kecelakaan Lalu Lintas

Penyakit tidak menular yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas yang dilaporkan pada tahun 2016 menempati urutan kedua pada 10 besar penyakit tidak menular yaitu sebanyak 966 kasus menurun dari kasus yang terjadi pada tahun 2015 sebanyak 1.094 kasus, hal ini didukung oleh kegiatan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM melalui pemeriksaan kesehatan pengemudi baik pada pengemudi lintas propinsi, lintas kabupaten dan pengemudi angkutan dalam kota pada arus mudik lebaran tahun 2016.

c) Diabetes Militus

Diabetes Mellitus (DM) atau kencing manis adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang karena adanya peningkatan kadar gula dalam darah akibat kekurangan insulin, baik absolute maupun relatif. Absolute artinya pancreas sama sekali tidak bisa menghasilkan insulin sehingga harus mendapatkan insulin dari luar (melalui suntikan) dan relatif artinya pancreas masih bisa menghasilkan insulin yang kadarnya berbeda pada setiap orang. DM merupakan penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan tetapi dapat dikendalikan. DM itu sendiri menempati urutan ketiga pada 10 besar penyakit tidak menular di Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 dengan jumlah penderita sebanyak 899 penderita, dengan rincian DM Tipe 1 (tergantung insulin) sebanyak 55 kasus dan DM Tipe 2 (tidak tergantung insulin) sebanyak 844 kasus. Jumlah tersebut

mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Jumlah kasus DM Tipe 1 tahun 2015 sebanyak 129 kasus dan DM tipe 2 sebanyak 1.269 kasus. Pada DM Tipe 2 sebenarnya dapat dicegah dan dikendalikan melalui gaya hidup sehat. Upaya yang dilakukan dalam penurunan kasus DM tersebut adalah kegiatan Deteksi Dini Faktor Risiko DM melalui kegiatan Posbindu PTM.

d) Asma Bronkial

Asma Bronkiale terjadi akibat penyempitan jalan napas yang *reversible* dalam waktu singkat oleh karena mucus kental, spasme dan *edema mukosa* serta *deskuamasi epitel bronkus/bronkelolus*, akibat *inflamasi eosinofilik* dengan kepekaan yang berlebihan. Jumlah kasus *asma bronkiale* di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 sebanyak 472 kasus sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 808.

e) Kanker Leher Rahim (Ca Servic)

Kanker Leher Rahim adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita, hampir semua kasus kanker leher rahim disebabkan oleh Virus HPV (*Human Papilloma Virus*). Wanita berusia 30-50 tahun berisiko menderita kanker leher rahim terutama yang aktif secara seksual. Deteksi dini kanker leher rahim dapat dilakukan melalui pemeriksaan IVA (infeksi visual asamasetat). Pada tahun 2016 jumlah wanita yang mengikuti deteksi dini melalui IVA sebanyak 984 orang atau baru mencapai 0,9 % dari total sasaran yaitu jumlah penduduk wanita usia 30-50 tahun dan ditemukan IVA positif sebanyak 90 orang. Upaya untuk meningkatkan target

sasaran melalui sosialisasi, penggerakan sasaran, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kanker leher rahim.

3.6. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Meskipun Kabupaten Wonosobo telah mengalami banyak kemajuan sebagai hasil dari pembangunan, namun ketimpangan atas layanan kesehatan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan terutama di daerah terpencil masih menjadi masalah. Ketimpangan atas layanan kesehatan berpengaruh pula terhadap perbedaan derajat kesehatan masyarakat antara daerah perkotaan dan pedesaan maupun antara penduduk miskin dengan penduduk yang mampu. Usaha pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk mendekatkan layanan kesehatan telah ditempuh melalui pembangunan puskesmas pembantu (pustu) dan Pos Kesehatan Desa (PKD) di desa-desa. Keberadaan layanan pustu dan PKD ini diharapkan akan mendekatkan kepada masyarakat kesehatan dasar.

Secara keseluruhan pembangunan sarana kesehatan di Kabupaten Wonosobo telah berhasil menurunkan rasio penduduk terhadap perawat/bidan, dokter dan puskesmas.

**Tabel 3.2. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Wonosobo,
2010 – 2014**

Tahun	Jenis Fasilitas Kesehatan				
	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Klinik	Puskesmas/ Pustu/PKD	Posyandu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	3	5	5	74	1300
2011	3	7	8	69	1311
2012	3	7	8	191	1320
2013	3	-	-	225	1349
2014	3	1	-	224	1322

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan Tabel 3.3. perkembangan jumlah puskesmas/pustu/PKD mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari jumlah 191 puskesmas/pustu/PKD pada tahun 2012 meningkat menjadi 224 pada tahun 2014.

3.7. Fasilitas Kesehatan dan Cara Berobat

1. Persentase Kunjungan Neonatus

Kunjungan Neonatus (KN) adalah kunjungan yang dilakukan oleh petugas kesehatan ke rumah ibu bersalin, untuk memantau dan memberi pelayanan kesehatan untuk ibu dan bayinya. Jadwal kunjungan neonatal yang dilaksanakan saat ini adalah pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari dan umur 8-28 hari. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program Kesehatan Ibu Anak (KIA) dalam menyelenggarakan pelayanan neonatal yang

komprehensif. Kunjungan neonatal pertama (KN1) adalah cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (umur 6 jam - 48 jam) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Pelayanan yang diberikan saat kunjungan neonatal adalah pemeriksaan sesuai standar Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan konseling perawatan bayi baru lahir termasuk ASI eksklusif dan perawatan tali pusat. Pada kunjungan neonatal pertama (KN1), bayi baru lahir mendapatkan vitamin K1 injeksi dan imunisasi hepatitis B0 bila belum diberikan pada saat lahir. Selain KN1, indikator yang menggambarkan pelayanan kesehatan bagi neonatal adalah KN lengkap yang mengharuskan agar setiap bayi baru lahir memperoleh pelayanan Kunjungan Neonatal minimal 3 kali, yaitu 1 kali pada 6-48 jam, 1 kali pada 3-7 hari, 1 kali pada 8-28 hari sesuai standar di satu wilayah kerja pada satu tahun. Persentase KN 1 di Kabupaten Wonosobo tahun 2016 sebesar 99,35 %, sedikit menurun dibandingkan persentase KN 1 tahun 2015 yaitu 99,56 %. Sedangkan Persentase KN lengkap tahun 2016 sebesar 97,79 %, relatif turun dibanding KN lengkap tahun 2015 yaitu 97,83 %.

2. Persentase Kunjungan Bayi

Kunjungan bayi adalah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar oleh tenaga kesehatan, paling sedikit 3 kali. Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 sebesar 101% mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2015 sebesar 99,3%. Cakupan tahun 2015 ini juga telah mencapai target SPM yang sebesar 90%.

3. Balita dengan Gizi Buruk

Prevalensi kasus gizi buruk tahun 2016 sebanyak 64 kasus (0,12%) dengan rincian jumlah sisa kasus 20 dan kasus baru 44. Ada penurunan kasus sebanyak 9 kasus (0,02%) dari tahun 2015 sebanyak 73 (0,14%) menjadi 64 kasus. Upaya yang sudah dilakukan dengan memberikan perawatan gizi buruk baik rawat inap maupun rawat jalan dan pemberian PMT baik sumberdana dari APBN, APBD I, APBD II maupun dari anggaran ADD. Pembekalan kader sebagai tenaga penyuluh di masyarakat juga sudah dilakukan dengan melalui kegiatan Sosialisasi Perbaikan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) bagi Kader.

4. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang telah dianjurkan, dibandingkan dengan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.

Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan ibu selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam

Standar Pelayanan Kebidanan. Pelayanan antenatal terpadu adalah pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil. Setiap kehamilan dalam perkembangannya mempunyai risiko mengalami penyulit dan komplikasi oleh karena itu pelayanan antenatal harus dilakukan secara rutin, terpadu dan sesuai standar pelayanan antenatal yang berkualitas.

Pelayanan antenatal diupayakan agar memenuhi standar kualitas, yaitu;

- a. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan;
- b. Pengukuran tekanan darah;
- c. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA);
- d. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);
- e. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toxoid sesuai status imunisasi;
- f. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
- g. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ);
- h. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk Keluarga Berencana);
- i. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya);
- j. Tatalaksana kasus

Pelayanan/pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil sesuai standar pada masa kehamilan oleh tenaga kesehatan terampil (dokter,

bidan atau perawat) 4 kali dengan interval 1 kali pada trimester pertama, 1 kali trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga, akan menggambarkan cakupan pelayanan antenatal ibu hamil yang dapat dipantau melalui pelayanan kunjungan ibu hamil K1 dan K4.

Cakupan kunjungan ibu hamil pertama (K1) di Kabupaten Wonosobo tahun 2016 sebesar 99,99% dan kunjungan keempat (K4) sebesar 90,27%. Sedangkan tahun 2015 Cakupan kunjungan ibu hamil pertama (K1) sebesar 100% dan kunjungan keempat (K4) sebesar 89,63%.

5. Persalinan yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan

Pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Wonosobo tahun 2016 yaitu sebesar 99,82 %, sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 sebesar 99,77%. Cakupan Pn Kabupaten Wonosobo sudah berada di atas target Renstra yang ditetapkan yaitu 98 persen. Masih diperlukan upaya-upaya agar cakupan Pn dapat ditingkatkan lagi menjadi 100% sesuai target Renstra yang dicapai ditahun mendatang..

6. Pelayanan Ibu Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari paska persalinan oleh tenaga kesehatan. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan

melakukan kunjungan nifas minimal 3 kali dengan ketentuan waktu;

- a. Kunjungan nifas pertama pada masa 6 jam sampai dengan 3 hari setelah persalinan.
- b. Kunjungan nifas ke dua dalam waktu 2 minggu setelah persalinan (8-14 hari)
- c. Kunjungan nifas ke tiga dalam waktu 6 minggu setelah persalinan (36-42 hari)

Pelayanan nifas meliputi pemberian vitamin A dosis tinggi ibu nifas yang kedua dan pemeriksaan kesehatan pasca persalinan untuk mengetahui apakah ada terjadi perdarahan pasca persalinan, keluar cairan berbau dari jalan lahir, demam lebih dari 2 hari, payudara bengkak kemerahan disertai rasa sakit dan lain-lain. Kunjungan terhadap ibu nifas yang dilakukan petugas kesehatan biasanya bersamaan dengan kunjungan neonatus.

Cakupan pelayanan ibu nifas di Kabupaten Wonosobo tahun 2016 sebesar 99,49% dan apabila di bandingkan dengan pencapaian di tahun 2015 sebesar 97,8% mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

7. Ibu Hamil Mendapat Tablet Fe

Program penanggulangan anemia yang dilakukan dengan memberikan tablet tambah darah yaitu preparat Fe yang bertujuan untuk menurunkan angka anemia pada anak balita, ibu hamil, ibu nifas, remaja putri dan Wanita Usia Subur.

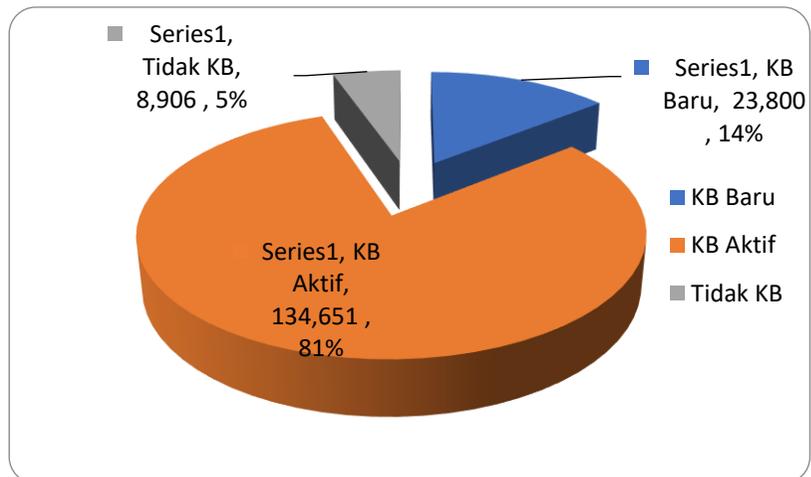
Cakupan ibu hamil yang mendapatkan table Fe pada tahun 2016 adalah Fe1 (96,75%) dan Fe3 (92,45%) sedangkan ibu hamil yang

mendapatkan kapsul vitamin A dosis tinggi sebesar 99,79%. Sedangkan pada tahun 2015 adalah Fe1 (96,96%) dan Fe3 (90,26%) sedangkan ibu hamil yang mendapatkan kapsul vitamin A dosis tinggi sebesar 96,06%.

8. Pelayanan Keluarga Berencana

Jumlah pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Wonosobo tahun 2016 sebanyak 167.357 yang merupakan peserta KB baru sebanyak 23.800 (14,22%) dan peserta KB aktif sebanyak 134.651 (80,46%).

Jumlah pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Wonosobo tahun 2015 sebanyak 165.656 yang merupakan peserta KB baru sebanyak 25.083 (15,14%) dan peserta KB aktif sebanyak 123.135 (74,33%). Kepesertaan KB pada PUS di Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 dapat dilihat pada Bagan. 5.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo

Gambar 3.4. Kepesertaan KB pada PUS Tahun 2016

9. Pelayanan Imunisasi Anak

Upaya untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian bayi serta anak balita dilaksanakan program imunisasi baik program rutin maupun program tambahan/suplemen untuk penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio, Hepatitis B, dan Campak. Bayi seharusnya mendapat imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG 1 kali, DPT-HB-HiB 3 kali, Polio 4 kali, HB unijekt 1 kali dan campak 1 kali. Sebagai indikator kelengkapan status imunisasi dasar lengkap bagi bayi dapat dilihat dari hasil cakupan imunisasi campak, karena imunisasi campak merupakan imunisasi yang terakhir yang diberikan pada bayi umur 9 bulan dengan harapan imunisasi sebelumnya sudah diberikan dengan lengkap (HB, BCG, DPT-HB-HiB, Polio dan Campak).

Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi di Kabupaten Wonosobo tahun 2016 dari jumlah bayi 12.869 sebesar 101,83%. Sedangkan capaian perantigen adalah sebagai berikut :

- a. BCG 13.184 (102,45%),
- b. DPT3-HB-HiB 3 12.963 (102%),
- c. Polio 4 12.884 (100,9%),
- d. Campak 12.998 (101,8%).

Sedangkan Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi di Kabupaten Wonosobo tahun 2015 dari jumlah bayi 13.044 adalah 96,85%. Sedangkan capaian perantigen adalah sebagai berikut :

- a. BCG 13.255 (101,6%),
- b. DPT3-HB-HiB 3 13.094 (100%),

- c. Polio 4 13.048 (99.36%),
- d. Campak 12.948 (98,59%).

Desa UCI (*Universal Child Immunization*) yaitu desa yang cakupan imunisasi dasar lengkapnya minimal 80 %. Desa UCI di Kabupaten Wonosobo tahun 2016 sebanyak 263 desa, dua desa yang belum UCI yaitu Kelurahan Kejajar dan Desa Buntu Kecamatan Kalikajar, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 265 desa (100%) hal ini disebabkan karena adanya penolakan untuk imunisasi di dua desa tersebut.

10. Pelayanan Kesehatan Gigi

Pelayanan kesehatan gigi di Puskesmas meliputi kegiatan pelayanan kesehatan dasar gigi dan kesehatan gigi sekolah. Kegiatan pelayanan dasar gigi adalah tumpatan (penambalan) gigi tetap dan pencabutan gigi tetap.

Cakupan pelayanan dasar gigi di Puskesmas untuk tumpatan gigi tetap tahun 2016 sebanyak 3.286 kasus, pencabutan gigi tetap sebanyak 6.144 kasus dan rasio tambal/cabut sebesar 0,53%. Sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 1.072 kasus, pencabutan gigi tetap sebanyak 1.447 kasus dan rasio tambal/cabut sebesar 0,7%.

11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Wonosobo sebanyak 434.612 jiwa, sedangkan yang sudah terfasilitasi Jaminan Kesehatan baik menggunakan APBN, APBD I, APBD II sejumlah 393.421 jiwa dan yang belum terfasilitasi sejumlah 40.191 jiwa.

12. Kejadian Luar Biasa

Tahun 2016 di kabupaten Wonosobo terjadi KLB sebanyak 6 kejadian dengan rincian 3 kali KLB keracunan makanan dan 3 kali KLB campak klinis. KLB keracunan makanan terjadi di Wilayah Kecamatan Kepil, Leksono dan Kertek sedangkan KLB campak klinis terjadi di wilayah Kecamatan Sapuran, Sukoharjo dan Mojotengah.

3.8. Sumber Dan Kesehatan

1. Tenaga Kesehatan

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dilakukan melalui perbaikan fisik dan penambahan sarana dan prasarana, penambahan peralatan dan ketenagaan serta pemberian biaya operasional dan pemeliharaan. Namun dengan semakin tingginya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan semakin meningkat. Untuk itu dibutuhkan penambahan tenaga kesehatan yang terampil dan siap pakai sesuai dengan karakteristik dan fungsi tenaganya.

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Wonosobo tahun 2016 terdiri dari tenaga medis (115 orang), bidan (380 orang), perawat (530 orang), farmasi (86 orang), gizi (30 orang), kesehatan masyarakat (13 orang), teknisi medis (37 orang), dan sanitasi (18 orang) yang tersebar di Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Islam dan Dinas Kesehatan Kabupaten. Sedangkan tenaga kesehatan di institusi kesehatan swasta belum tercatat.

2. Sarana Kesehatan

- a. Pada tahun 2016 jumlah Puskesmas di Kabupaten Wonosobo adalah 24 buah, yang terdiri dari 17 Puskesmas tanpa rawat inap dan 7 buah Puskesmas dengan rawat inap. Sedangkan Puskesmas Pembantu sebanyak 44 buah dan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) sebanyak 200 buah serta Puskesmas Keliling sebanyak 24 buah.
- b. Rumah Sakit Umum di Kabupaten Wonosobo tahun 2016 sebanyak 3 buah, yaitu RSUD KRT Setjonegoro RSU milik pemerintah 1 buah dan RSU milik swasta 2 buah yaitu RSI Wonosobo dan PKU Wonosobo, sedangkan rumah sakit khusus ada 1 buah yaitu Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak ADINA.fdfdfsd

Bab 4

Perumahan dan Lingkungan Hidup

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, menyebutkan bahwa rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia akan papan merupakan bagian dari perumahan dan permukiman yang perlu ditata agar dapat berkelanjutan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan penghuni di dalamnya karena akan menunjang pembangunan ekonomi, sosial budaya dan bidang-bidang yang lain.

Pada dasarnya pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Usaha pemenuhan kebutuhan perumahan ini diusahakan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan serta mewujudkan hunian yang layak dalam suatu lingkungan perumahan yang sehat, aman, selaras, serasi dan teratur. Penyelenggaraan perumahan dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, difasilitasi pemerintah, dibangun oleh pihak swasta (pengembang).

Untuk melihat keberhasilan pembangunan perumahan baik itu oleh masyarakat, pemerintah dan/atau swasta dapat didasarkan pada beberapa indikator. Indikator perumahan ini diperoleh dari pendekatan rumah tangga dengan melihat aspek kemampuan memiliki rumah dan kualitas perumahan. Dalam penyajian indikator perumahan didasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Indikator perumahan berdasarkan data Susenas, dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

- berbagai unsur rumah/tempat tinggal
- fasilitas perumahan

pada aspek berbagai unsur rumah/tempat tinggal, terbagi menjadi :

- a. status penguasaan rumah tinggal
- b. luas lantai rumah
- c. atap dan dinding rumah

sementara itu, fasilitas perumahan yang dimaksud yaitu berupa:

- a. sumber air minum
- b. sumber penerangan
- c. tempat buang air besar (jamban/kakus)
- d. bahan bakar utama untuk memasak

Pada aspek unsur rumah lebih dominan mengacu pada kondisi fisik bangunan dan kenyamanan penghuni. Kondisi fisik bangunan menunjukkan kualitas dan kuantitas tempat tinggal yang dikuasai, baik milik sendiri ataupun bukan. Fisik bangunan yang kuat dan terbuat dari bahan yang tidak membahayakan menjamin keamanan penghuni tidak saja dari ancaman tindak kriminal, tetapi juga dari kerentanan bangunan itu sendiri dan kemungkinan terserang penyakit. Fisik bangunan yang kuat ditentukan oleh pemilihan bahan komponen bangunan yaitu lantai, dinding, dan atap.

Sementara untuk kenyamanan dan kesejahteraan penghuni, selain menuntut pemilihan bangunan yang baik, juga luas lantai yang dihuni rumah tangga. Rata-rata luas lantai hunian per rumah tangga dapat menggambarkan kondisi tempat tinggal penduduk. Semakin luas lantai yang dihuni suatu rumah tangga, maka semakin baik kondisi (kesehatan) rumah tangga tersebut.

Untuk melihat bagaimana kondisi suatu rumah, luas lantai dapat merupakan sebagai salah satu faktor penentu, mengingat rumah tangga

dengan luas lantai yang cukup memadai dapat memberikan kenyamanan serta udara segar bagi pemiliknya. Fasilitas-fasilitas lain yang juga tidak kurang pentingnya untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dari segi perumahan adalah jenis bahan bangunan yang dipergunakan bagi perumahan itu, bahan bakar yang digunakan untuk memasak, fasilitas penerangan lampu dan lain sebagainya. Disamping itu harus dilihat pula fasilitas-fasilitas lain yang sangat erat kaitannya dengan sarana-sarana kesehatan seperti sumber air minum, sumber air untuk mandi dan mencuci pakaian, jamban serta kakus maupun pemilikan barang rumah tangga seperti pesawat tv, sepeda motor dan barang-barang bernilai tinggi lainnya yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan penduduk/rumah tangga.

4.1. Berbagai Unsur Rumah/Tempat Tinggal

Pembahasan mengenai perumahan berkaitan pula dengan rumah beserta unsurnya yang dapat dijadikan pendekatan untuk melihat keberhasilan pembangunan perumahan. Pada aspek berbagai unsur rumah/tempat tinggal, terbagi menjadi :

- a. status penguasaan rumah tinggal
- b. luas lantai rumah
- c. atap dan dinding rumah

4.1.1. Status Penguasaan Rumah Tinggal

Unsur status penguasaan rumah tinggal mencerminkan adanya kemampuan masyarakat dalam memiliki rumah dan/atau mengakses layanan perumahan. Dari status ini, dapat dilihat kemampuan rumah tangga di Kabupaten Wonosobo dalam mengakses kepemilikan rumahnya yang pada akhirnya dapat menunjukkan kesejahteraan

masyarakat. Status penguasaan rumah tinggal dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. **Milik Sendiri**, jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik rumah tangga atau salah satu anggota rumah tangga.
- b. **Sewa**, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh Kepala Rumah Tangga (KRT) atau salah satu Anggota Rumah Tangga (ART) dengan pembayaran secara teratur dan terus-menerus tanpa batas waktu.
- c. **Kontrak**, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh KRT atau ART dalam jangka waktu tertentu dengan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai.
- d. **Bebas Sewa Milik Orang Lain**, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain dan ditempati oleh rumahtangga tanpa membayar.
- e. **Dinas**, jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu ART baik dengan membayar sewa maupun tidak.
- f. **Milik orang tua/sanak/saudara**, jika tempat tinggal tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang tua/sanak/saudara dan tidak mengeluarkan suatu pembayaran apapun untuk mendiami tempat tinggal tersebut.
- g. **Lainnya**, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misal rumah adat.

Kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan perumahan dan pemukiman. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal milik sendiri di suatu daerah semakin baik tingkat kesejahteraan daerah tersebut. Perhitungan kepemilikan rumah berdasarkan formula berikut ini:

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang menempati tempat tinggal milik sendiri}}{\text{Jumlah rumah tangga seluruhnya}} \times 100$$

Menurut hasil Susenas 2016, secara umum rumah tangga di Kabupaten Wonosobo yang menempati rumah milik sendiri sebesar 90,93 persen, sisanya 9,07 persen rumah tangga menempati bukan milik sendiri. Tingginya persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal sendiri dengan cara membangun sendiri di suatu daerah mencerminkan tingginya kemampuan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari kontrak 1,57 persen, bebas sewa 0,90 persen, dan rumah dinas mencapai 6,60 persen. Selama tiga tahun terakhir persentase rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri relatif tidak berubah yaitu sekitar 7 - 9 persen.

Tabel 4.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal di Kabupaten Wonosobo, 2014-2016

Status Penguasaan Tempat Tinggal	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik Sendiri	91,07	95,61	95,11
Kontrak	1,18	1,34	0,81
Sewa	0	0	0
Bebas Sewa/ lainnya	7,75	3,05	4,08
Jumlah	100,0	100,0	100,0
	0	0	0

Sumber : BPS, Susenas

Kondisi status penguasaan rumah selama kurun waktu 2014-2016 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Kepemilikan sendiri masih menjadi dominasi dibanding status yang lainnya. Rumah dengan status milik sendiri mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dari 95.61% menjadi 95.11%. Di sisi lain, persentase RT status kontrak naik dari 1,34 % menjadi 0,81 %.

4.1.2. Luas Lantai Rumah

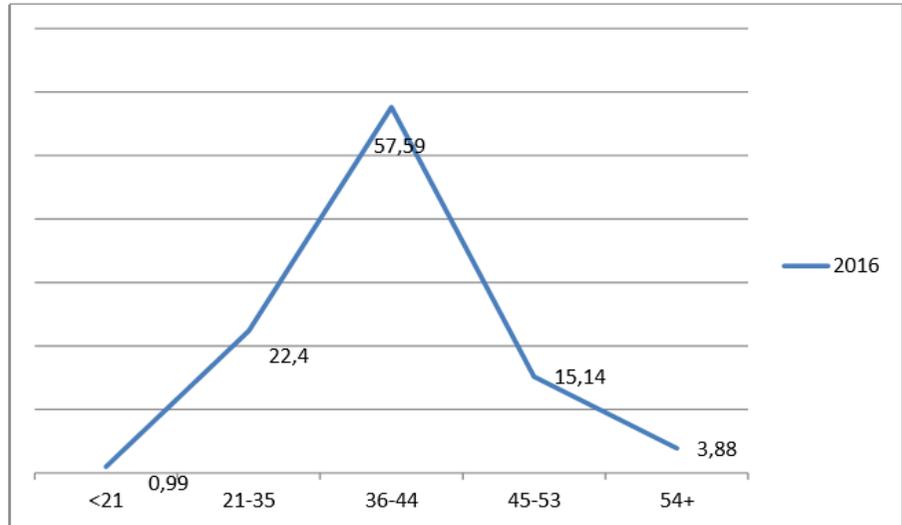
Kualitas kenyamanan sebuah hunian rumah juga dapat dilihat dari luas lantai rumah. Rata-rata luas lantai hunian per rumah tangga dapat menggambarkan kondisi tempat tinggal penduduk. Semakin luas lantai yang dihuni suatu rumah tangga, maka semakin baik kondisi (kesehatan) rumahtangga tersebut.

Luas lantai adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap), bagian yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari tidak dihitung. Untuk bangunan bertingkat luas lantai adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati.

Rumah yang nyaman adalah rumah yang relatif luas, dimana penghuninya tidak berdesakkan sehingga dapat merasakan udara yang segar. Rumah dikatakan ideal apabila luas bangunannya sebanding dengan jumlah penghuninya. Menurut ukuran dari Kementerian Kesehatan adalah minimal 8 m² setiap penghuni. Dengan rata-rata anggota rumah tangga tahun 2014 sebanyak 3,33 per rumah tangga, maka rata-rata luas rumah cukup memadai adalah 65 m² atau lebih. .

Rata – Rata luas lantai rumah

$$= \frac{\text{Jumlah seluruh luas lantai yg dihuni oleh semua rumahtangga}}{\text{Jumlah rumahtangga}}$$



Sumber: Susenas 2016

Gambar 4.1 Persentase Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Wonosobo, 2016

Pada gambar 4.1 menggambarkan luas lantai rumah (dalam meter persegi) yang ditempati rumah tangga. Pada tahun 2016 sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Wonosobo menempati rumah dengan luas lantai 36-44 meter persegi yaitu sebesar 57,59 persen, luas lantai 21-35 meter persegi sebesar 22,4 persen, luas lantai 45-53 meter persegi sebesar 15,14 persen, sedangkan yang menempati rumah dengan luas lantai lebih dari 54 meter persegi hanya sebesar 3,88 persen. Dan yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 21 meter persegi hanya sebesar 0,99 persen. Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki

lantai terluas bukan tanah. Semakin banyak rumah tinggal yang memiliki beberapa kualitas mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas perumahan di suatu daerah.

Tabel 4.2 Persentase Rumah Tangga menurut Kualitas Perumahan di Kabupaten Wonosobo, 2015-2016

Kualitas Perumahan	2015	2016
Lantai Bukan Tanah	87.31	87.49
Atap Layak	100,00	99,55
Dinding Permanen	76.84	75,52

Sumber: Susenas 2015,2016

Secara keseluruhan, kondisi perumahan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 relatif memenuhi kriteria sehat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah (87,49 persen), rumah tinggal dengan atap layak (99,55 persen) dan dinding permanen (75,52 persen). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah berlantai bukan tanah mengalami peningkatan, yaitu dari 87,31 persen pada tahun 2015 menjadi 87,49 persen pada tahun 2016. Sementara persentase rumah tangga yang bertempat tinggal dengan atap layak dan berdinding permanen mengalami penurunan, yaitu masing-masing dari 100,00 persen dan 76,84 persen pada tahun 2015 menjadi 99,55 persen dan 75,52 persen.

4.1.3. Atap dan Dinding Rumah

Kualitas fisik rumah juga dapat dilihat dari jenis atap dan dinding rumah. Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami dibawahnya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

Beton adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil dan pasir yang dicampur dengan air.

Genteng adalah atap yang terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar, termasuk genteng beton, genteng *fiber cement* dan genteng keramik.

Sirap adalah atap yang terbuat dari kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin.

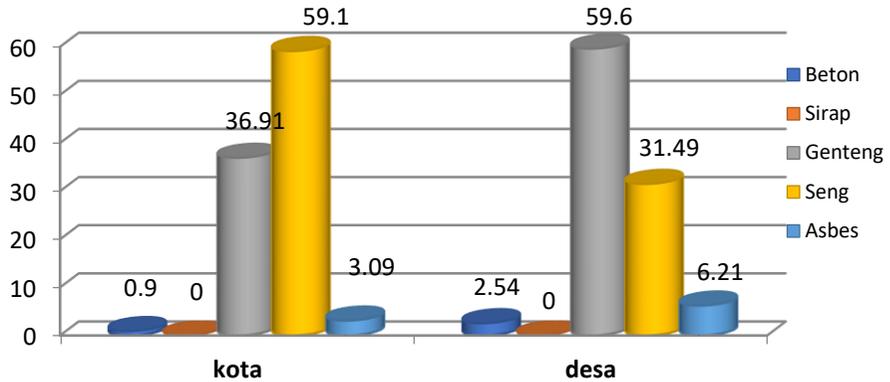
Seng adalah atap yang terbuat dari bahan seng.

Asbes adalah atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen.

Ijuk/rumbia adalah atap yang terbuat dari serat pohon aren/enau dan sejenisnya.

Lainnya adalah atap selain jenis atap diatas, misal bambu, daun-daunan, dan papan.

Seperti halnya lantai rumah, atap dan dinding rumah juga berpengaruh pada tingkat kesejahteraan karena atap dan dinding rumah yang tidak layak akan mempengaruhi tingkat kesehatan penghuninya.



Sumber : BPS, Susenas

Gambar 4.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kabupaten Wonosobo, 2016

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Jika bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang dihitung adalah dinding yang terluas.

Tembok adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya dilapisi plesteran semen.

Kayu adalah dinding yang terbuat dari kayu.

Bambu adalah dinding yang terbuat dari anyaman bambu.

Lainnya adalah dinding yang terbuat dari selain jenis dinding diatas.

4.2. Fasilitas Perumahan

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman tidaknya suatu rumah tinggal, dan juga menentukan tingkat kualitasnya. Fasilitas rumah tinggal ini juga berhubungan dengan kesehatan lingkungan tempat tinggal. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya listrik, air bersih dan jamban dengan tangki septik.

Tabel 4.3
Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Perumahan
di Kabupaten Wonosobo, 2015-2016

Fasilitas Perumahan	2015	2016
Penerangan Listrik	100,00	99,62
Air Minum Kemasan/Leding	33,95	38,45
Jamban Sendiri	75,04	77,83

Sumber: Susenas 2015,2016

Penggunaan fasilitas perumahan seperti penerangan listrik dan air bersih sudah relatif banyak dimanfaatkan masyarakat. Berdasarkan data Susenas 2016, ada 99,62 persen rumah tangga di Kabupaten Wonosobo yang memiliki fasilitas penerangan listrik, 38,45 persen rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum kemasan/leding, dan 77,83 persen rumah tangga yang memiliki jamban sendiri. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Sumber penerangan sudah terfasilitasi oleh PLN untuk seluruh wilayah di Kabupaten Wonosobo. Program penyediaan

air bersih terus menerus diupayakan pemerintah. Penggunaan air minum kemasan/leding pada tahun 2016 di Kabupaten Wonosobo sebesar 38,45 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 33,95 persen. Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Rumah tangga yang memiliki jamban milik sendiri pada tahun 2016 sebesar 77,83 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 75,04 persen.

Bab 5

Penduduk

PENDUDUK

5.1. Jumlah Penduduk

Penduduk dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Pemahaman tentang keadaan kependudukan bagi instansi pemerintah, dunia usaha, lembaga penelitian serta masyarakat umum sangatlah penting. Dalam rangka mempermudah pemahaman tentang kependudukan, perlu diketahui konsep dan definisi tentang penduduk. Penduduk adalah seseorang yang tinggal/berdomisili di suatu daerah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang tinggal/berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Ukuran tentang jumlah penduduk biasanya dikaitkan dengan suatu wilayah pada tahun tertentu. Jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu dipengaruhi oleh tiga komponen demografi yaitu kelahiran (*birth*), kematian (*death*) dan perpindahan penduduk (*migration*). Kelahiran yang terjadi akan bersifat penambah sedang kematian akan bersifat pengurang terhadap jumlah penduduk. Begitu pula dengan migrasi, jumlah penduduk yang masuk akan bersifat penambah dan penduduk yang keluar bersifat pengurang. Dengan demikian jumlah penduduk dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$P_t = P_0 + B - D + M_t$$

dimana :

P_t = Jumlah penduduk pada tahun t

P_0 = Jumlah penduduk tahun dasar

B = Jumlah kelahiran pada tahun t

D = Jumlah kematian pada tahun t

M_t = Jumlah penduduk yang masuk di tahun t dikurangi jumlah penduduk yang keluar di tahun t

Tabel 5.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2012 – 2016

No.	Kecamatan	2012			2013		
		Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Wadaslintang	26,474	27,096	53,570	26,346	26,954	53,300
2	Kepil	28,942	28,975	57,917	28,803	28,823	57,626
3	Sapuran	28,046	27,411	55,457	28,043	27,437	55,480
4	Kalibawang	11,473	11,328	22,801	11,418	11,270	22,688
5	Kaliwiro	22,654	22,659	45,313	22,546	22,538	45,084
6	Leksono	20,398	19,833	40,231	20,370	19,769	40,139
7	Sukoharjo	16,327	15,448	31,775	16,325	15,406	31,731
8	Selomerto	23,371	22,603	45,974	23,346	22,525	45,871
9	Kalikajar	29,614	29,028	58,642	29,472	28,875	58,347
10	Kertek	39,710	38,172	77,882	39,670	38,139	77,809
11	Wonosobo	43,354	42,722	86,076	43,458	42,797	86,255
12	Watumalang	25,030	24,016	49,046	24,910	23,890	48,800
13	Mojotengah	30,326	28,198	58,524	30,329	28,218	58,547
14	Garung	24,834	23,517	48,351	24,747	23,381	48,128
15	Kejajar	21,329	20,355	41,684	21,301	20,288	41,589
	Jumlah	391,882	381,361	773,243	391,084	380,310	771,394

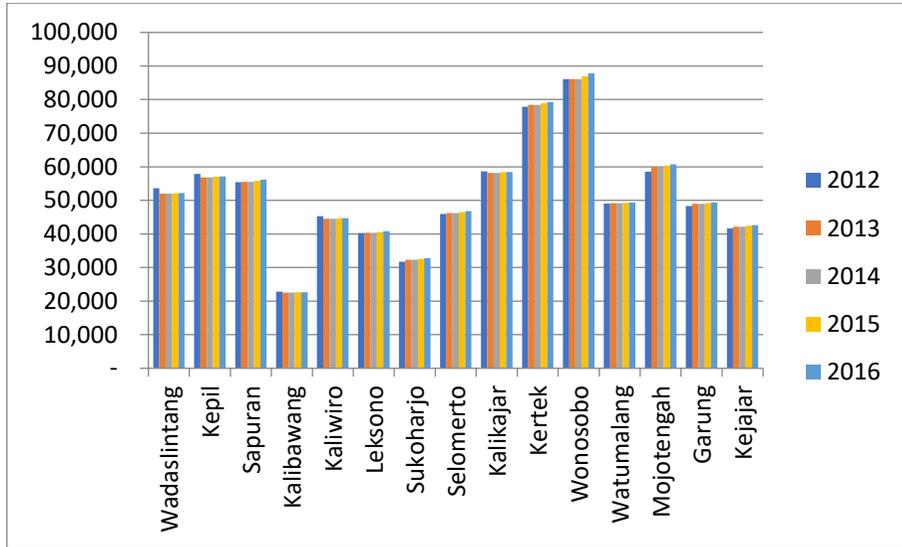
Tabel 5.1. Lanjutan

No.	Kecamatan	2014			2015		
		Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L + P
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Wadaslintang	25,718	26,319	52,037	25,770	26,372	52,142
2	Kepil	28,437	28,440	56,877	28,495	28,497	56,992
3	Sapuran	28,020	27,453	55,473	28,198	27,626	55,824
4	Kalibawang	11,343	11,199	22,542	11,366	11,222	22,588
5	Kaliwiro	22,266	22,255	44,521	22,311	22,300	44,611
6	Leksono	20,467	19,842	40,309	20,593	19,963	40,556
7	Sukoharjo	16,636	15,694	32,330	16,762	15,812	32,574
8	Selomerto	23,483	22,718	46,201	23,632	22,862	46,494
9	Kalikajar	29,418	28,765	58,183	29,478	28,824	58,302
10	Kertek	39,949	38,489	78,438	40,171	38,703	78,874
11	Wonosobo	43,441	42,701	86,142	43,862	43,115	86,977
12	Watumalang	25,097	24,069	49,166	25,148	24,118	49,266
13	Mojotengah	31,047	28,926	59,973	31,252	29,116	60,368
14	Garung	25,122	23,812	48,934	25,223	23,908	49,131
15	Kejajar	21,573	20,581	42,154	21,707	20,710	42,417
	Jumlah	392,017	381,263	773,280	393,968	383,148	777,116

Tabel 5.1. Lanjutan

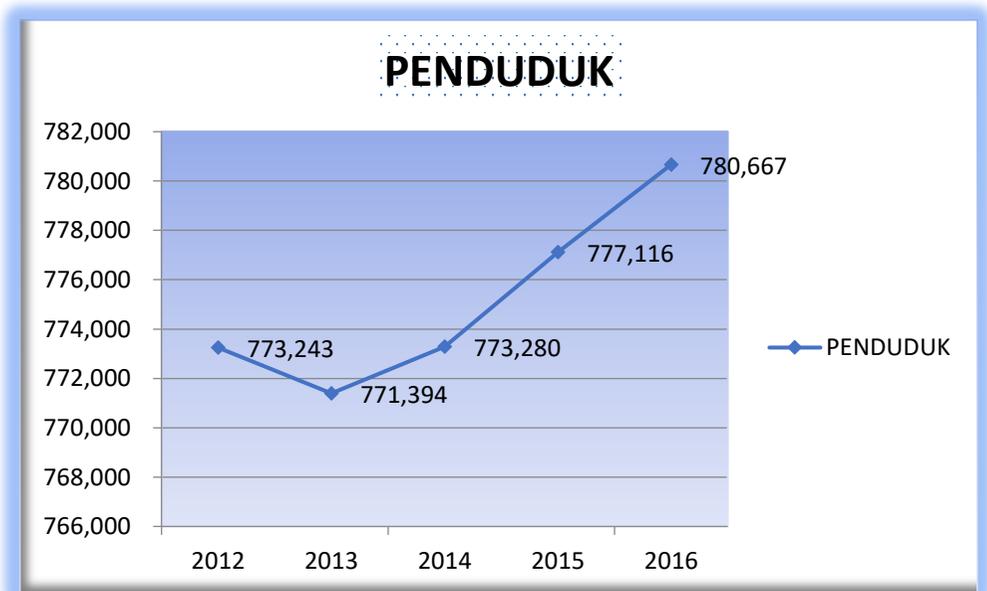
No.	Kecamatan	2016		
		Laki-laki	Perempuan	L + P
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)
1	Wadaslintang	25,809	26,419	52,228
2	Kepil	28,537	28,548	57,085
3	Sapuran	28,362	27,795	56,157
4	Kalibawang	11,384	11,242	22,626
5	Kaliwiro	22,344	22,339	44,683
6	Leksono	20,708	20,081	40,789
7	Sukoharjo	16,879	15,928	32,807
8	Selomerto	23,769	23,001	46,770
9	Kalikajar	29,522	28,875	58,397
10	Kertek	40,372	38,908	79,280
11	Wonosobo	44,264	43,523	87,787
12	Watumalang	25,185	24,161	49,346
13	Mojotengah	31,440	29,300	60,740
14	Garung	25,310	23,997	49,307
15	Kejajar	21,831	20,834	42,665
	Jumlah	391,706	384,951	780,667

Sumber : BPS, Wonosobo Dalam Angka 2016



Sumber: Daerah Dalam Angka 2017

Gambar 5.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2012-2016



Sumber: Daerah Dalam Angka 2017

Gambar 5.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. Wonosobo Tahun 2012-2016

Jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan dari 773.243 jiwa pada tahun 2012 menjadi 780.667 jiwa pada tahun 2016. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo secara alami dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar.

5.2. Tingkat Kepadatan Penduduk

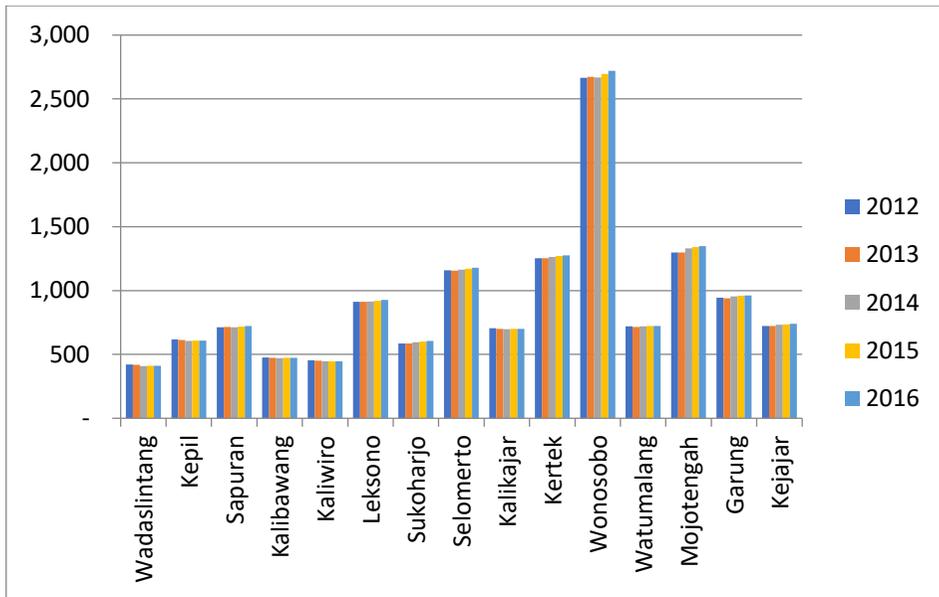
Tingkat kepadatan penduduk (*population density*) adalah jumlah penduduk disuatu wilayah pada tahun tertentu dibagi dengan luas wilayahnya. Tingkat kepadatan penduduk dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$PD = \frac{P}{W}$$

dimana:

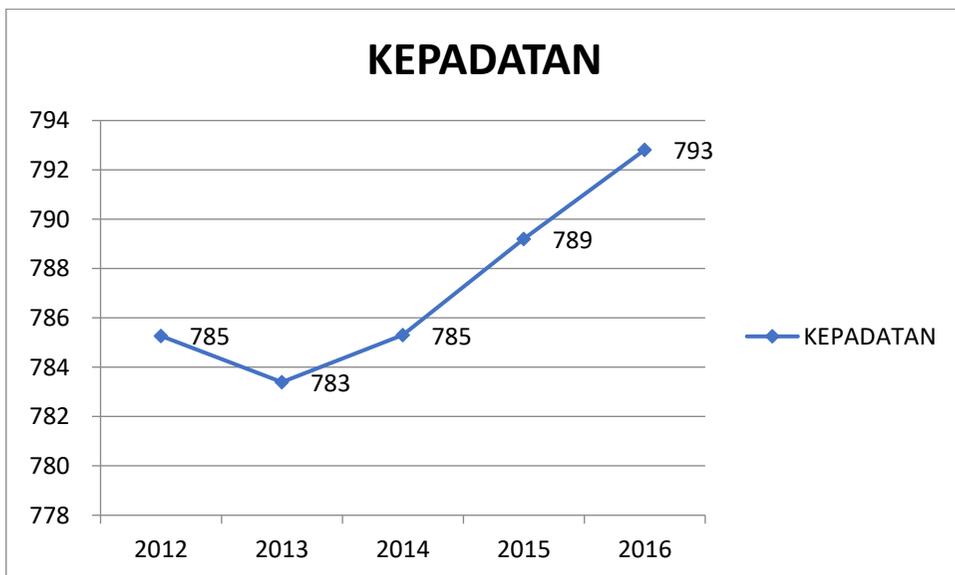
- PD = Tingkat kepadatan penduduk
- P = Jumlah penduduk pada tahun t
- W = Luas wilayah (km²)

Perkembangan kepadatan penduduk Kabupaten Wonosobo dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 sebesar 783 jiwa/km² menjadi 793 jiwa/ km² pada tahun 2016. Wilayah kecamatan dengan kepadatan tertinggi masih didominasi oleh wilayah perkotaan yaitu Kecamatan Wonosobo dengan kepadatan penduduk sebesar 2.720 jiwa/ km² pada tahun 2016. Tingginya kepadatan penduduk di Kecamatan Wonosobo dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain : ketersediaan fasilitas pelayanan yang lengkap dibandingkan kecamatan lainnya, pusat kegiatan (pemerintahan, jasa, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi).



Sumber: Daerah Dalam Angka Tahun 2017

Gambar 5.3 Perkembangan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kab. Wonosobo Tahun 2012-2016



Sumber: Daerah Dalam Angka 2017

Gambar 5.4 Perkembangan Kepadatan Penduduk di Kab. Wonosobo Tahun 2012-2016

Tabel 5.2. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Wonosobo, Tahun 2017

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
Wadaslintang	127,16	52.228	411
Kepil	93,87	57.085	608
Sapuran	77,72	13756.157	723
Kalibawang	47,82	22.626	473
Kaliwiro	100,08	44.683	446
Leksono	44,07	40.789	926
Sukoharjo	54,29	32.807	604
Selomerto	39,71	46.770	1.178
Kalikajar	83,30	58.397	701
Kertek	62,14	79.280	1.276
Wonosobo	32,38	87.787	2.720
Watumalang	68,23	49.346	723
Mojotengah	45,07	60.740	1.348
Garung	51,22	49.307	963
Kejajar	57,62	42.665	740
Jumlah	984,58	780.667	793

Sumber : Wonosobo Dalam Angka 2017

5.3. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Komposisi penduduk dapat dilihat menurut jenis kelamin. Perbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan akan menghasilkan suatu ukuran yang disebut Rasio Jenis kelamin atau *Sex Ratio* (SR). Untuk keperluan perencanaan SR juga merupakan informasi yang cukup penting. Rasio jenis kelamin dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$SR = \frac{L}{P} \times 100$$

dimana :

L = Penduduk laki-laki

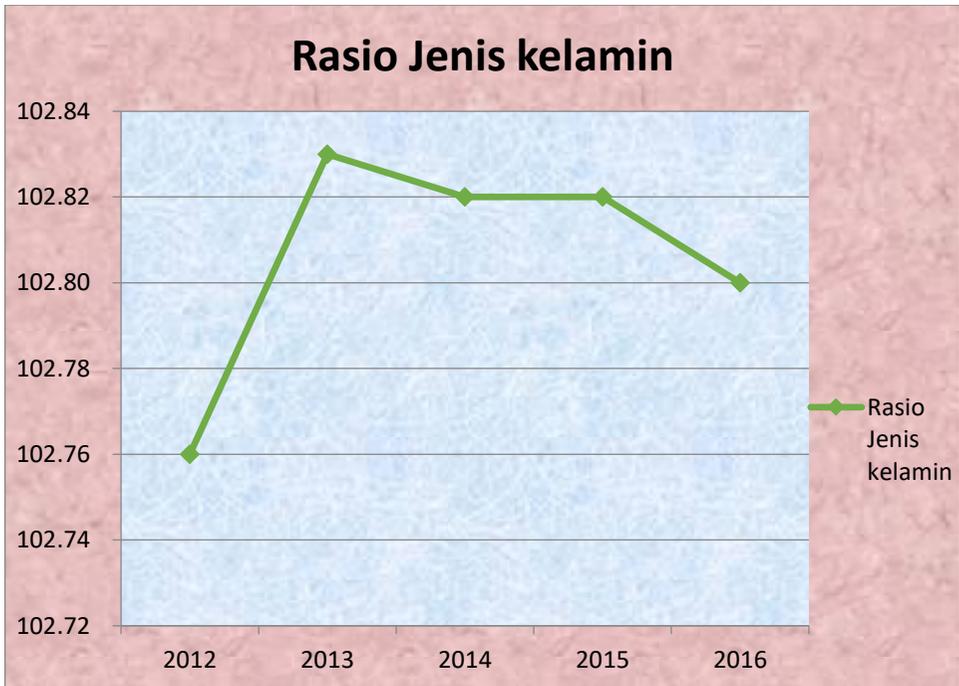
P = Penduduk perempuan

Rasio jenis kelamin berbeda antar kelompok umur, umumnya pada kelompok umur muda SR diatas 100 artinya lebih banyak bayi laki-laki dibanding perempuan. Pada kelompok umur tua biasanya SR kurang dari 100 artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Fenomena ini terjadi antara lain disebabkan karena rata-rata usia harapan hidup (*life expectancy*) perempuan lebih panjang dibanding laki-laki. SR juga bervariasi menurut wilayah atau antara daerah perkotaan dan pedesaan

Tabel 5.3. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Wonosobo, Tahun 2017

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
Wadaslintang	25.809	26.419	97.69
Kepil	28.537	28.548	99.96
Sapuran	28.362	27.795	102.04
Kalibawang	11.384	11.242	101.26
Kaliwiro	22.344	22.339	100.02
Leksono	20.708	20.081	103.12
Sukoharjo	16.879	15.928	105.97
Selomerto	23.769	23.001	103.34
Kalikajar	29.522	28.875	102.24
Kertek	40.264	38.908	103.76
Wonosobo	44.264	43.523	101.70
Watumalang	25.185	24.161	104.24
Mojotengah	31.440	29.300	107.30
Garung	25.310	23.997	105.47
Kejajar	21.831	20.834	104.79
Jumlah	395.716	384.951	102.80

Sumber : BPS, Wonosobo Dalam Angka 2017



Sumber : BPS, Wonosobo Dalam Angka 2017

Gambar 5.5 Perkembangan Rasio Jenis Kelamin di Kab. Wonosobo Tahun 2012-2016

Berdasarkan Gambar 5.4 di atas dapat terlihat rasio jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami fluktuasi naik turun. Pada tahun 2012, rasio jenis kelamin sebesar 102,76 menjadi 102,80 pada tahun 2016. Hal ini menandakan bahwa persentase kenaikan jumlah penduduk laki-laki mengalami kenaikan dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk perempuan.

5.4. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin

Selain jumlah dan kepadatan, hal lain yang perlu diketahui adalah komposisi penduduk, antara lain komposisi penduduk menurut

umur dan jenis kelamin. Informasi mengenai umur dan jenis kelamin sangat penting karena informasi mengenai demografi, sosial dan ekonomi sangat berbeda antar kelompok umur dan jenis kelamin. Misalnya, perbedaan jumlah kelahiran menurut jenis kelamin, pada saat dilahirkan umumnya jumlah bayi laki-laki lebih banyak dari bayi perempuan. Untuk kematian, terjadi perbedaan angka harapan hidup waktu lahir antara laki-laki dan perempuan, angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Selain itu juga ditemukan perbedaan tingkat kematian menurut umur. Anak balita dan lansia mempunyai resiko kematian yang lebih tinggi dari pada kelompok umur lainnya. Perpindahan penduduk paling banyak dilakukan oleh penduduk kelompok umur 20 – 29 tahun daripada kelompok umur lainnya dan laki-laki cenderung untuk melakukan perpindahan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk juga berbeda menurut kelompok umur dan jenis kelamin, misal tingkat pendidikan dan partisipasi angkatan kerja.

a. Struktur Umur Penduduk

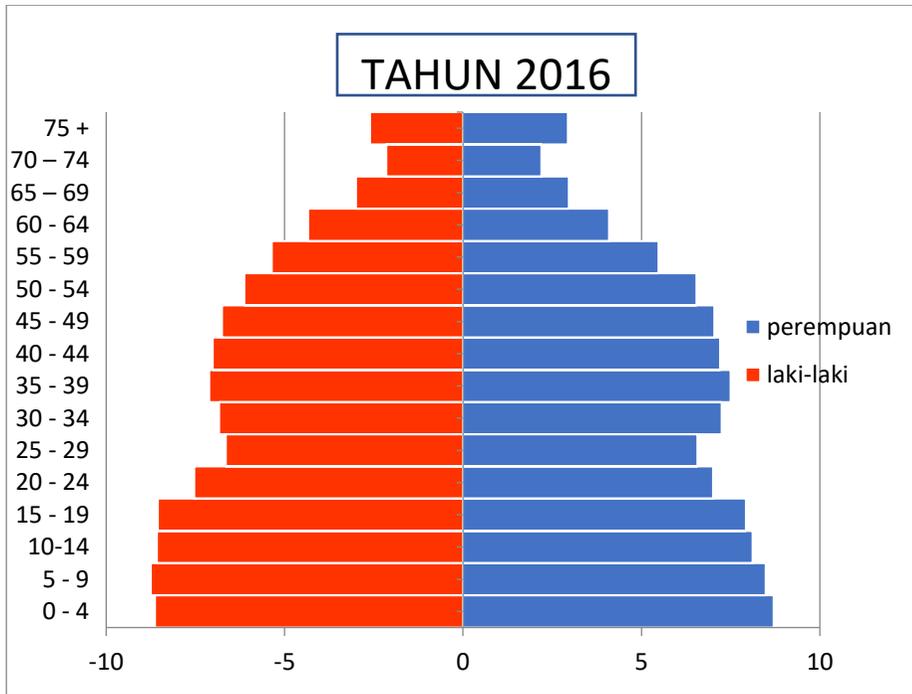
Struktur umur penduduk sangat penting untuk perencanaan pemerintah dalam segala bidang. Kebutuhan penduduk terhadap suatu pelayanan atau produk tertentu sangat bervariasi menurut umur. Misal fasilitas kesehatan untuk balita berbeda dengan lansia. Untuk balita cenderung pada peningkatan gizi dan imunisasi sedangkan untuk lansia cenderung ke arah perawatan penyakit kronis.

Berbagai cara dapat dilakukan untuk menggambarkan struktur penduduk menurut umur, diantaranya adalah dengan distribusi

frekuensi, distribusi persentase, rasio dan gambar batang atau piramida penduduk.

b. Piramida Penduduk

Cara lain yang biasa digunakan untuk menggambarkan komposisi penduduk adalah dengan piramida penduduk. Piramida penduduk menunjukkan dengan jelas distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Tingginya setiap batang piramida menggambarkan kelompok umur dan panjangnya dari setiap batang piramida menunjukkan jumlah penduduk dari kelompok umur tersebut. Untuk membuat piramida penduduk dapat digunakan persentase distribusi penduduk atau frekuensi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Persentase distribusi ini dihitung terhadap total penduduk. Piramida penduduk menunjukkan tingkat perkembangan penduduk untuk setiap kelompok umur yang berbeda, dalam beberapa kelompok umur bisa saja terlihat pertumbuhan yang menurun. Fluktuasi dalam piramida penduduk paling banyak dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dari setiap kelompok umur (kohor penduduk) selain tingkat kematian dan migrasi. Suatu wilayah dengan tingkat kelahiran yang tinggi biasanya ditandai dengan bentuk piramida yang alasnya besar kemudian berangsur mengecil hingga ke puncak piramida. Berdasarkan Gambar 5.6 di bawah dapat terlihat bahwa komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kabupaten Wonosobo termasuk dalam **kelompok ekspansif**, dimana sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda.



Sumber :BPS Kabupaten Wonosobo, 2017

Gambar 5.6. Piramida Penduduk Kabupaten Wonosobo, 2016

c. Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Angka Ketergantungan adalah jumlah orang yang secara ekonomi tidak aktif per seratus penduduk yang aktif secara ekonomi. Biasanya digunakan rasio antara penduduk kelompok umur 0–14 tahun dan 65 tahun keatas terhadap penduduk kelompok umur 15–64 tahun. DR secara umum dapat menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif (15 – 64 tahun) terhadap kelompok usia muda (kurang dari 15 tahun) dan usia tua (65 tahun keatas).

Dependency Ratio (DR) diformulasikan sebagai berikut :

$$DR = ((P_{<15} + P_{65+}) / P_{15-64}) \times 100$$

dimana:

- P_{<15} = Jumlah penduduk dibawah usia 15 tahun
 P₆₅₊ = Jumlah penduduk 65 tahun keatas
 P₁₅₋₆₄ = Jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun

Tabel 5.4. Persentase Komposisi Umur Penduduk dan Dependency Ratio (DR) di Kabupaten Wonosobo,2012- 2016

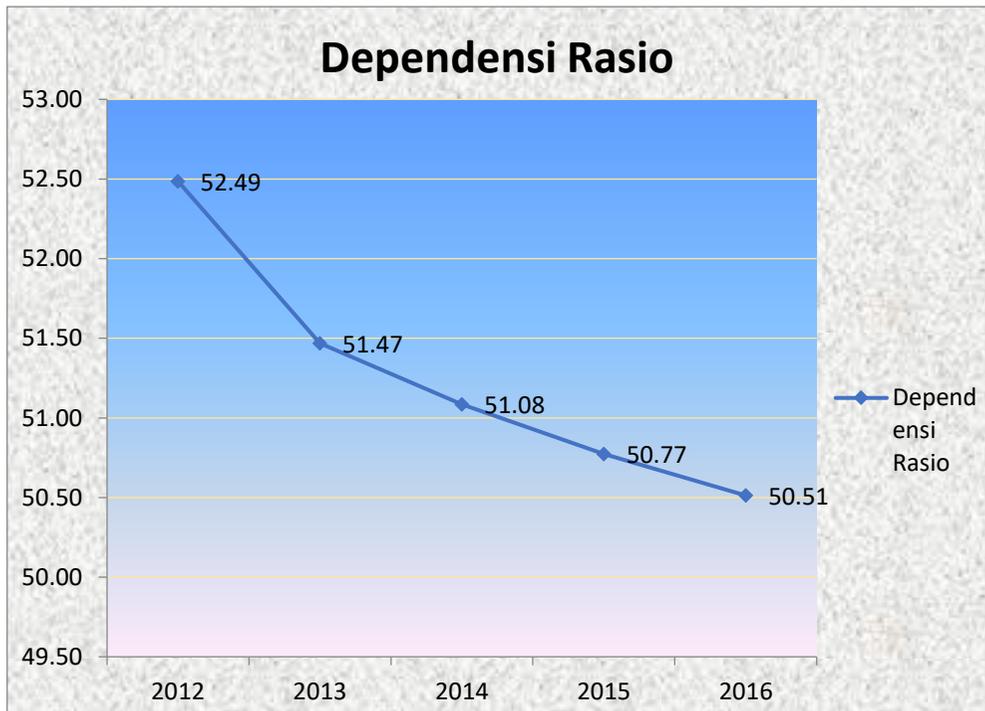
Tahun	Umur (tahun)			Jumlah	Dependensi Rasio
	0-14	15-64	65+		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2012	27.06	65.58	7,36	100,00	52.47
2013	27.62	66,02	7,36	100,00	51.47
2014	26,29	66,19	7,52	100,00	51,08
2015	25,96	66,33	7,72	100,00	50,77
2016	25,63	66,44	7,93	100,00	50,51

Sumber :BPS, Wonosobo Dalam Angka 2017

Komposisi penduduk menurut umur Kabupaten Wonosobo pada tahun 2015 digolongkan penduduk produktif karena 66,33 persen penduduk berumur 15 – 64 tahun. Dengan komposisi umur penduduk seperti yang terlihat pada Tabel 5.4, angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Wonosobo sebesar 50,51 persen pada tahun 2016, yang berarti setiap sejumlah 100 penduduk usia produktif harus menanggung 50 penduduk usia non produktif (usia anak-anak dan penduduk usia lanjut). Angka beban tanggungan di Kabupaten Wonosobo tersebut dapat digolongkan sedang.

Angka beban tanggungan pada tahun 2016 masih relatif menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 52,49 persen. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kelahiran dan kematian di

tahun 2012 masih cukup tinggi. Dengan artian bahwa di tahun 2016 makin sedikit penduduk non produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.



Gambar 5.7. Perkembangan DR di Kab. Wonosobo Tahun 2012-2016

Bab 6

Ketenagakerjaan

KETENAGAKERJAAN

Salah satu dari lima prioritas program pembangunan yang dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Berbagai kebijakan dan strategi telah ditempuh untuk mencapai tujuan pembangunan khususnya dibidang ekonomi, sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang ada. Ketenagakerjaan mempunyai korelasi positif yang cukup erat terhadap suksesnya proses pembangunan. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran.

Dengan demikian titik sentral ketenagakerjaan adalah perencanaan tenaga kerja yang mencakup :

- a. Penyusunan program penyediaan tenaga profesional untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan usaha atau kegiatan pembangunan yang direncanakan
- b. Penyusunan program penciptaan kesempatan kerja supaya dapat menggunakan sumber daya manusia secara optimal
- c. Terciptanya lapangan kerja baik dalam jumlah dan kualitas yang memadai

Oleh karena itu upaya pembangunan harus banyak diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Misalnya skala prioritas arah pertumbuhan antara sektor informal dan formal di perkotaan. Akhir-akhir ini sektor

informal di perkotaan semakin berperan penting dalam menyerap pertumbuhan angkatan kerja, maka menjadi kurang bijaksana jika kebijakan pembangunan perkotaan lebih diarahkan hanya pada sektor formal.

Program-program pembangunan sektoral maupun regional perlu ditingkatkan demi terciptanya perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin dengan imbalan jasa yang sepadan. Dengan perluasan dan pemerataan lapangan kerja serta peningkatan mutu lapangan pekerjaan, diharapkan akan dapat mengurangi perbedaan penghasilan diantara tenaga kerja yang berpenghasilan tinggi dan rendah, sehingga dengan demikian dapat ditingkatkan pemerataan pendapatan.

6.1. Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi yang digunakan adalah *The Labor Force Concept* sesuai yang disarankan oleh *International Labor Organization (ILO)*. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu **penduduk usia kerja** dan **penduduk bukan usia kerja**. Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 **penduduk usia kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. **Penduduk bukan usia kerja** adalah penduduk yang berusia dibawah 15 tahun. **Angkatan kerja** adalah penduduk berusia 15 tahun keatas yang bekerja dan pengangguran. **Bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja yang pada periode referensi tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima bunga bank, jompo atau alasan yang lain). **Bekerja** yaitu kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit satu jam dalam seminggu.

Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja mencakup yang sedang bekerja maupun sementara tidak bekerja (cuti, sakit dan sejenisnya).

Pengangguran yang digunakan oleh Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha dan mencakup penduduk yang tidak aktif mencari kerja tetapi bersedia/siap bekerja. Sehingga pengangguran mencakup empat kriteria yaitu: mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa/merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged worker*) dan sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. **Mencari pekerjaan** adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang sudah pernah bekerja, karena suatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena suatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain. Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan asalkan seminggu yang lalu masih mengharapkan pekerjaan yang dicari. Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain tidak dapat disebut sebagai pengangguran terbuka. **Mempersiapkan suatu usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang baru yang bertujuan untuk memperoleh

penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja yang dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah dengan tindakan nyata, tidak termasuk yang baru merencanakan, niat, atau baru ikut kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha, jangka waktunya tidak terbatas pada seminggu yang lalu.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja tidak penuh terdiri dari : *Setengah Penganggur* adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dulu disebut setengah pengangguran terpaksa); *Pekerja paruh waktu* adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dulu disebut setengah pengangguran sukarela).

Lapangan usaha menurut PBB (1998) adalah bidang kegiatan suatu organisasi/lembaga/usaha (*establishment*) tempat seseorang bekerja selama periode waktu acuan yang dibuat data untuk karakteristik ekonomi (atau yang dikerjakan terakhir, jika orang tersebut tidak bekerja). Kegiatan *establishment* adalah jenis barang yang diproduksi atau jasa yang diberikan. Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha yang biasanya dikelompokkan menjadi :

- a. Berusaha sendiri, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu tidak kembalinya

ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

- b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja dibayar.
- c. Berusaha dibantu buruh tetap, adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
- d. Buruh/karyawan/pegawai, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang atau barang.
- e. Pekerja bebas (pertanian/non pertanian) seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) atas dasar balas jasa dengan menerima imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan
- f. Pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar, adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa barang maupun barang.

6.2. Indikator Ketenagakerjaan

Pada tahun 2016 BPS tidak merilis angka-angka ketenagakerjaan sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Data sampel yang dikumpulkan oleh BPS melalui sakernas hanya mencukupi untuk estimasi level nasional sampai tingkat provinsi saja. Oleh karena itu data kabupaten/kota yang disajikan discontinue untuk tahun 2016.

a. Penduduk Usia Kerja

Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai ketenagakerjaan memegang peranan penting. Tanpa tenaga kerja tidaklah mungkin program pembangunan dapat dilaksanakan. Pada tahun 2017 penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ke atas) tercatat 74,69 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo. Dari jumlah tersebut 50,47 persen adalah penduduk laki-laki dan 49,53 persen penduduk perempuan atau penduduk usia kerja laki-laki sedikit lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Dari penduduk usia kerja di Kabupaten Wonosobo 72,37 persen adalah angkatan kerja, yaitu penduduk yang bekerja dan pengangguran, sedangkan 27,63 persen diantaranya bukan angkatan kerja, yaitu penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Tabel 6.1. Persentase penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kelamin dan kegiatan seminggu yang lalu, 2015-2017

Uraian	2015			2017		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angkatan Kerja (AK)	85,42	63,85	74,75	86,44	62,01	72,37
- Bekerja	81,96	60,63	71,41	81,18	57,25	69,34
- Pengangguran	3,46	3,22	3,34	3,97	2,07	3,03
Bukan AK	14,58	36,15	25,25	14,85	40,69	27,63
- Sekolah	4,99	4,08	4,54	6,31	5,94	6,13
- Mengurus Ruta	3,03	29,49	16,12	3,72	30,86	17,14
- Lainnya	6,56	2,58	4,59	4,82	3,89	4,36
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS

Penduduk laki-laki umur 15 tahun ke atas yang tergolong angkatan kerja jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki bukan angkatan kerja. Sebaliknya untuk penduduk perempuan umur 15 tahun ke atas yang tergolong angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan umur 15 tahun ke atas yang bukan angkatan kerja. Masih kentalnya tatanan sosial budaya masyarakat, dimana laki-laki sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban untuk bekerja mencari nafkah, sehingga, angkatan kerja laki-laki (85,15%) jauh lebih besar jika dibandingkan dengan angkatan kerja perempuan (63,85%).

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja, yaitu penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan. Keterlibatan dalam kegiatan ekonomi ini biasanya disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan jumlah penduduk Angkatan Kerja dengan penduduk usia kerja.

TPAK dapat di hitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100$$

TPAK perempuan biasanya lebih rendah dibanding laki-laki karena di Indonesia umumnya yang bertanggung jawab mencari nafkah adalah laki-laki, sehingga perempuan lebih sedikit masuk kedalam angkatan kerja.

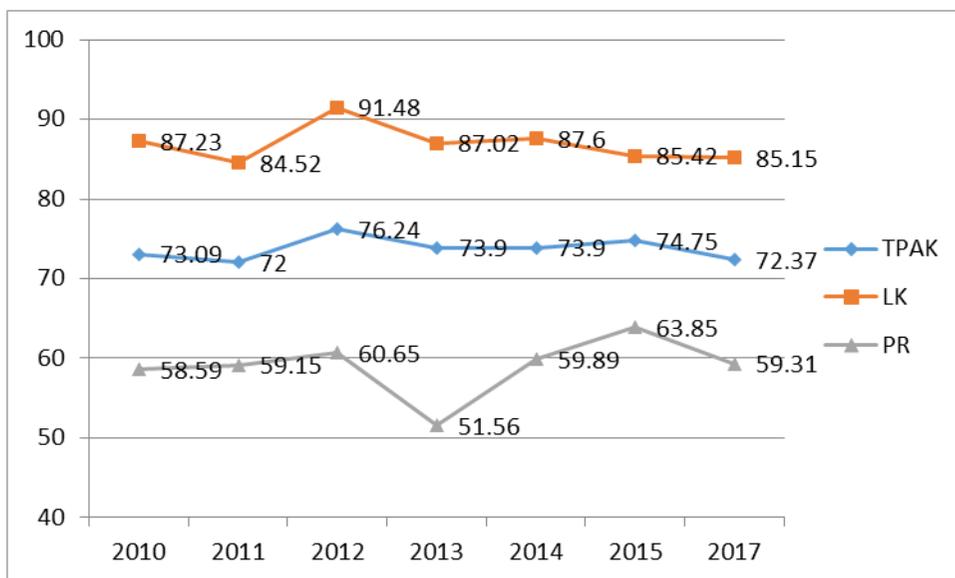
Berdasarkan hasil Sakernas 2017, TPAK total Kabupaten Wonosobo tercatat sebesar 72,37 persen, artinya dari 100 penduduk usia kerja, sekitar 72 orang diantaranya termasuk angkatan kerja aktif secara ekonomis. TPAK Kabupaten Wonosobo yang tergolong sedang ini jika dibedakan menurut jenis kelamin, ternyata TPAK laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan TPAK perempuan, dimana TPAK laki-laki tercatat sebesar 85,15 persen sedangkan TPAK

perempuan 59,31 persen. Hal ini berarti penduduk laki-laki yang aktif secara ekonomis lebih besar dibandingkan penduduk perempuan.

Tabel 6.2. Persentase TPAK, TKK, dan TPT di Kabupaten Wonosobo Tahun 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)					
Total	76,24	64,50	73,90	74,75	72,37
Laki-laki	91,48	87,02	87,60	85,42	85,15
Perempuan	60,65	51,56	59,89	63,85	59,31
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)					
Total	94,63	94,17	94,66	95,53	95,82
Laki-laki	95,52	94,39	95,76	95,95	95,34
Perempuan	93,24	93,80	93,02	94,95	96,52
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					
Total	5,37	5,83	5,34	4,47	4,18
Laki-laki	4,48	5,61	4,24	4,05	4,66
Perempuan	6,76	6,20	6,98	5,05	3,48

Sumber : BPS



Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2017

Gambar 6.1. Perkembangan TPAK Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2017

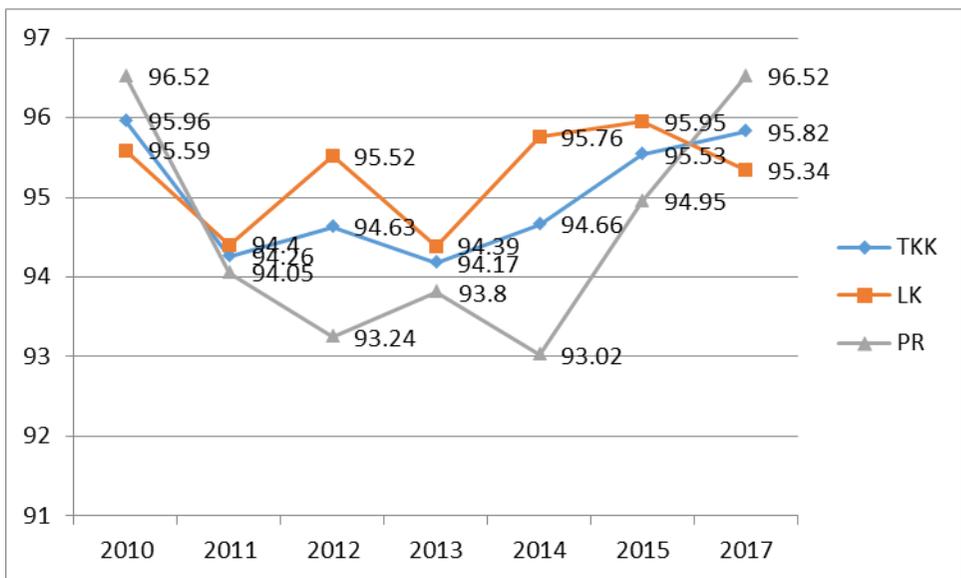
c. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Tingkat Kesempatan Kerja adalah peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. TKK biasanya diformulasikan sebagai berikut :

$$TKK = \frac{\text{JumlahPendudukBekerja}}{\text{JumlahAngkatanKerja}} \times 100$$

Kesempatan kerja yang ada memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja, sedangkan angkatan kerja yang tidak terserap dikategorikan menganggur. Pada tahun 2017 tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Wonosobo sebesar 95,82 persen. Ini berarti sekitar 96 dari 100 penduduk angkatan kerja sudah bekerja,

sedangkan 4 dari 100 penduduk lainnya masih menganggur (pengangguran terbuka). Penduduk yang tergolong pengangguran terbuka ini adalah penduduk yang tidak melakukan kegiatan ekonomi, dan hanya mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja atau putus asa (sudah berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak pernah diterima bekerja).



Sumber : BPS Kab. Wonosobo, 2017

Gambar 6.2. Perkembangan TTK Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2017

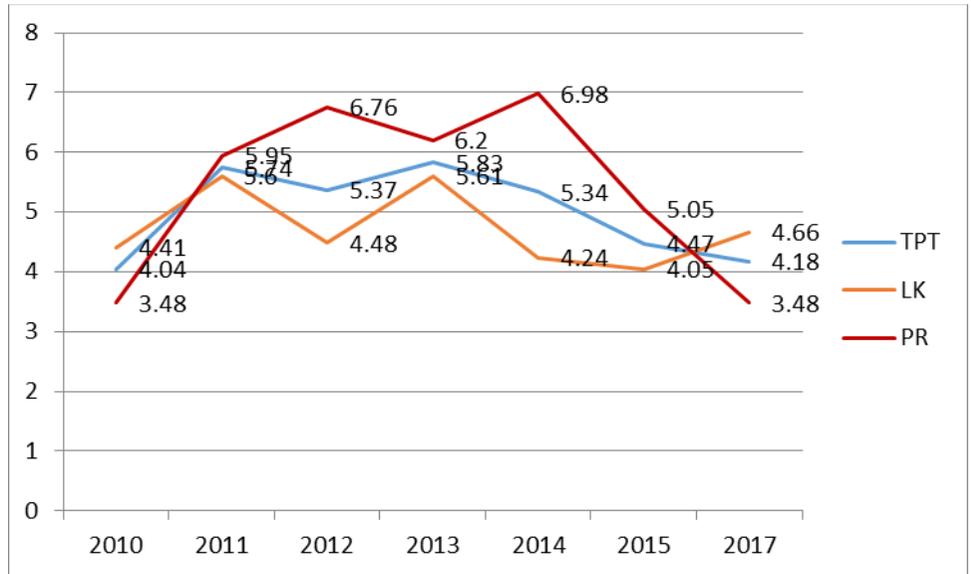
d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase pengangguran terhadap angkatan kerja dengan rumus:

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100 \text{ atau}$$

$$\text{TPT} = 100\% - \text{TKK}$$



Sumber : BPS Kab. Wonosobo, 2014

Gambar 6.3. Perkembangan TPT Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2017

Perkembangan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2010-2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010, TPT berhasil ditekan pada angka 4,04 tetapi pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 5,83. Dan mulai tahun 2014 mulai dapat ditekan hingga tahun 2017 sebesar 4,18. Meskipun demikian TPT Kabupaten Wonosobo apabila diklasifikasikan masih tergolong rendah. Pada tahun 2017, tercatat TPT sebesar 4,66 persen untuk laki-laki dan 3,48 persen untuk perempuan, ini berarti bahwa dari 100 angkatan kerja laki-laki, 5 orang diantaranya menganggur, dan dari 100 angkatan kerja perempuan, 3 orang diantaranya

menganggur. Dari grafik diatas terlihat disaat tingkat pengangguran tinggi perempuan lebih kelihatan berdampak sedangkan untuk laki-laki fluktuasinya tidak sebesar perempuan.

e. Lapangan Pekerjaan

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Disamping itu indikator tersebut juga bisa digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah/daerah.

Dari Tabel 7.3 dapat terlihat bahwa sektor pertanian masih mendominasi dalam menyerap tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan dimana lebih dari 38,17 persen pekerja, bekerja disektor ini. Selanjutnya sektor perdagangan (23,72%) menjadi pilihan kedua dan diikuti oleh sektor industri (12,10%). Kemampuan sektor pertambangan, listrik dan air dalam menyerap tenaga kerja yang masih sangat kecil (0,83%), menandakan bahwa sektor ini belum dapat diandalkan dalam perekonomian di Kabupaten Wonosobo.

Tabel 6.3. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2017

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	56,28	64,22	60,39	45,93	42,55
Pertambangan	0,56	0,21	0,19	0,85	1,17
Industri Pengolahan	5,21	6,87	5,68	12,25	7,77
Listrik, gas dan air	0,18	0,19	0,09	0,53	0,11
Bangunan	9,31	2,61	6,27	10,80	13,00
Perdagangan ,rumah makan dan hotel	13,34	13,19	12,50	17,05	19,09
Angkutan, pergudangan dan komunikasi	4,22	5,2	4,76	3,89	4,47
Keuangan dan jasa perusahaan	1,17	1,03	1,76	1,67	2,78
Jasa kemasyarakatan	9,74	6,5	8,37	7,03	9,06
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS

Tabel 6.4. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2017

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	51,03	44,97	44,29	43,06	31,83
Pertambangan	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
Industri Pengolahan	14,07	16,34	11,39	15,03	18,37
Listrik, gas dan air	0,00	0,16	0,00	0,00	0,17
Bangunan	0,46	0,00	0,32	0,26	0,17
Perdagangan ,rumah makan dan hotel	20,99	27,72	22,48	27,96	30,44
Angkutan, pergudangan dan komunikasi	0,50	0,00	0,00	0,19	0,61
Keuangan dan jasa perusahaan	0,96	0,39	0,00	0,85	2,04
Jasa kemasyarakatan	11,99	10,42	21,51	12,13	16,37
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data: BPS

Tabel 6.5. Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2017

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	54,28	58,13	54,24	44,72	38,17
Pertambangan	0,64	0,00	0,34	0,70	0,70
Industri Pengolahan	9,43	6,45	8,64	13,42	12,10
Listrik, gas dan air	0,16	0,22	0,11	0,30	0,13
Bangunan	5,52	5,86	5,80	6,38	7,76
Perdagangan ,rumah makan dan hotel	16,47	16,98	16,30	21,64	23,72
Angkutan, pergudangan dan komunikasi	3,60	1,80	2,78	2,34	2,89
Keuangan dan jasa perusahaan	0,81	0,62	1,09	1,33	2,48
Jasa kemasyarakatan	9,09	9,93	10,61	9,17	12,05
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS

f. Status dan Jenis Pekerjaan

Indikator lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan pekerja adalah status dan jenis pekerjaan. Tabel 6.4 menunjukkan bahwa masih banyak pekerja di Kabupaten Wonosobo yang bekerja disektor informal. Hal ini terlihat dari tingginya persentase (40.52%) pekerja dengan status berusaha sendiri dan berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap pada tahun 2017.

Pada umumnya mereka yang berusaha sendiri ini ada disektor pertanian. Pola struktur pekerjaan antara laki-laki dan perempuan tahun 2017 berbeda. Sebagian besar perempuan bekerja sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar (28,10%). Sedangkan untuk laki-laki pada umumnya berusaha dengan bantuan orang lain/buruh tidak tetap (23,93%), berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain (18,60%) dan sebagai buruh/ karyawan dibayar (22,17%) sedangkan sebagai pekerja keluarga hanya 8,28%.

Tabel 6.6. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2012 - 2017

Status Pekerjaan	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha Sendiri	16,08	17,68	17,29	15,64	18,60
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	30,91	34,42	35,28	29,71	23,93
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	5,21	6,51	5,87	6,08	5,75
Buruh/karyawan/pegawai	14,18	14,17	16,13	24,05	22,17
Pekerja bebas pertanian	8,58	3,96	4,59	4,68	8,45
Pekerja bebas non pertanian	10,58	2,04	6,39	10,03	12,83
Pekerja Keluarga	14,96	21,21	14,45	9,80	8,28
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data : BPS

Tabel 6.7. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2012 - 2017

Status Pekerjaan	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha Sendiri	13,15	15,26	14,24	16.73	17.09
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	14,48	17,63	17,05	16.26	20.52
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	2,25	1,38	2,36	2.76	2.86
Pegawai/karyawan	15,23	16,66	14,92	17.99	18.23
Pekerja bebas pertanian	1,76	2,71	2,76	2.52	6.41
Pekerja bebas non pertanian	1,76	0,43	1,62	4.86	6.79
Pekerja Keluarga	48,17	45,94	47,05	38.88	28.10
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100.00	100.00

Sumber data : BPS

Tabel 6.8. Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2012 - 2017

Status Pekerjaan	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha Sendiri	19,94	15,26	16,09	16,09	17,98
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	31,19	17,63	28,10	24,06	22,54
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	5,42	1,38	4,49	4,69	4,57
Pegawai/karyawan	19,38	16,66	15,65	21,50	20,56
Pekerja bebas pertanian	10,80	2,71	3,87	3,77	7,61
Pekerja bebas non pertanian	9,56	0,43	4,51	7,86	10,36
Pekerja Keluarga	3,71	45,94	27,29	22,02	16,37
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: data BPS

Bab 7

Transportasi dan Telekomunikasi

TRANSPORTASI DAN TELEKOMUNIKASI

7.1. Transportasi

Transportasi adalah sarana untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, oleh karena itu infrastruktur transportasi merupakan salah satu masalah krusial yang harus diperhatikan dalam menangani pembangunan dalam suatu daerah. Infrastruktur tersebut antara lain meliputi jaringan jalan, kondisi jembatan dan sarana prasarana penunjang lain seperti jaringan terminal dan jumlah kendaraan. Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan di suatu daerah, data-data transportasi menjadi hal yang harus bisa disajikan dalam penyusunan indikator statistik makro suatu daerah, termasuk Indikator Statistik Makro Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 ini. Dengan adanya data ini, diharapkan pemerintah dapat menangani permasalahan dan memanfaatkan potensi yang ada dalam melaksanakan program / kegiatan pembangunan.

7.1.1 Jaringan Jalan

Pada tahun 2014 – 2016 panjang total jaringan jalan di Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan dari 779,89 km menjadi 999,30 km atau sekitar 21,96%. Peningkatan ini hampir merata di semua kecamatan. Jalan kabupaten yang terpanjang berada di wilayah Kecamatan Kaliwiro yaitu 97,13 km atau 9,72% dari total panjang jalan kabupaten, sedangkan yang terpendek berada di wilayah Kecamatan Kejajar yaitu 35,16 km atau 3,52% dari total panjang jalan kabupaten. Selain jalan kabupaten, di Kabupaten Wonosobo ada yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat. Untuk status kewenangan jalan di

Kabupaten Wonosobo yang ditangani Provinsi panjangnya 107,33 km atau sekitar 4,18 % dari total panjang jalan kewenangan provinsi di Provinsi Jawa Tengah. Sedang panjang jalan Nasional dengan status kewenangan pusat hanya 31,994 km atau sekitar 2,30 % dari total panjang jalan kewenangan pusat yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

7.1.1.1 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Wonosobo (km)

Tabel 7.1 Panjang jalan per kecamatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 – 2016

No	Kec	2014	2015	2016
1	Wadaslintang	61,45	61,45	86,98
2	Kepil	57,15	57,15	68,64
3	Sapuran	68,11	68,11	82,19
4	Kalibawang	39,23	39,23	55,61
5	Kaliwiro	80,52	80,52	97,13
6	Leksono	44,33	44,33	61,17
7	Sukoharjo	71,09	71,09	62,79
8	Selomerto	27,52	27,52	40,38
9	Kalikajar	51,95	51,95	79,88
10	Kertek	40,62	40,62	64,26
11	Wonosobo	48,26	48,26	66,95
12	Watumalang	95,15	95,15	95,46
13	Mojotengah	49,82	49,82	58,42
14	Garung	10,4	16,40	44,28
15	Kejajar	34,29	34,29	35,16
Jumlah		779,89	785,89	999,30

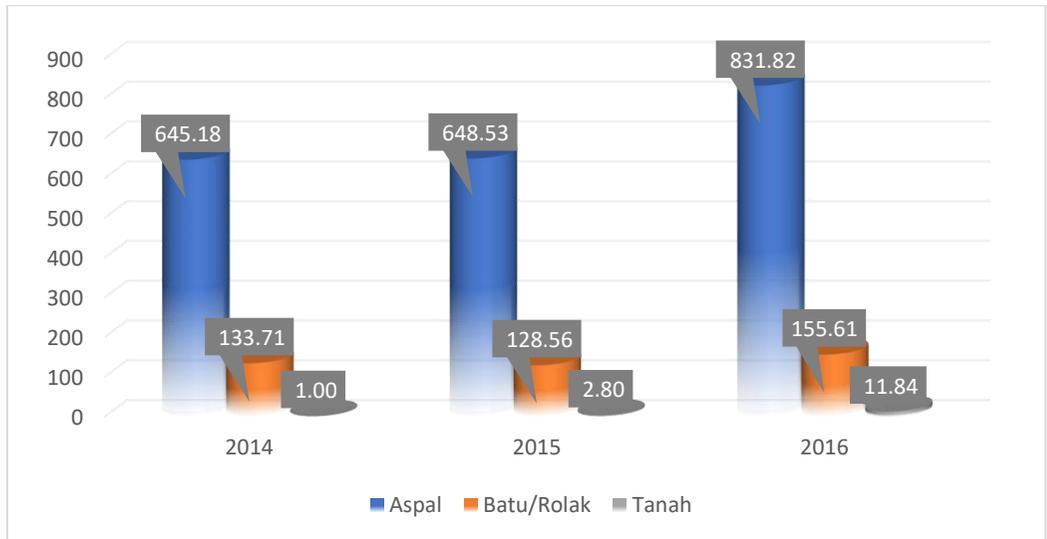
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

7.1.1.2 Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan Kabupaten Wonosobo

Tabel 7.2 Panjang jalan menurut jenis permukaan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014–2016

Jenis Permukaan	2014	2015	2016
Aspal	645,18	648,53	831,82
Batu/Rolak	133,71	128,56	155,61
Tanah	1,00	2,80	11,84
Jumlah	779,89	779,89	999,28

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

Gambar 7.1 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014–2016

Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Wonosobo jika dirinci menurut jenis permukaan, sebagian besar jalan kabupaten dalam kondisi diaspal dan hanya sebagian kecil saja yang masih dalam kondisi batu/rolak dan tanah. Jalan kabupaten yang diaspal selama tahun 2014–2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 panjang jalan yang diaspal adalah 645,18 km (82,73 %) , dan pada tahun 2016 panjang jalan yang diaspal mencapai 831,82 km (83,24%). Secara prosentase memang kenaikannya tidak signifikan, tetapi jika dilihat dari kenaikan total panjang jalan, panjang jalan yang diaspal mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 186,64 km atau 22,44%.

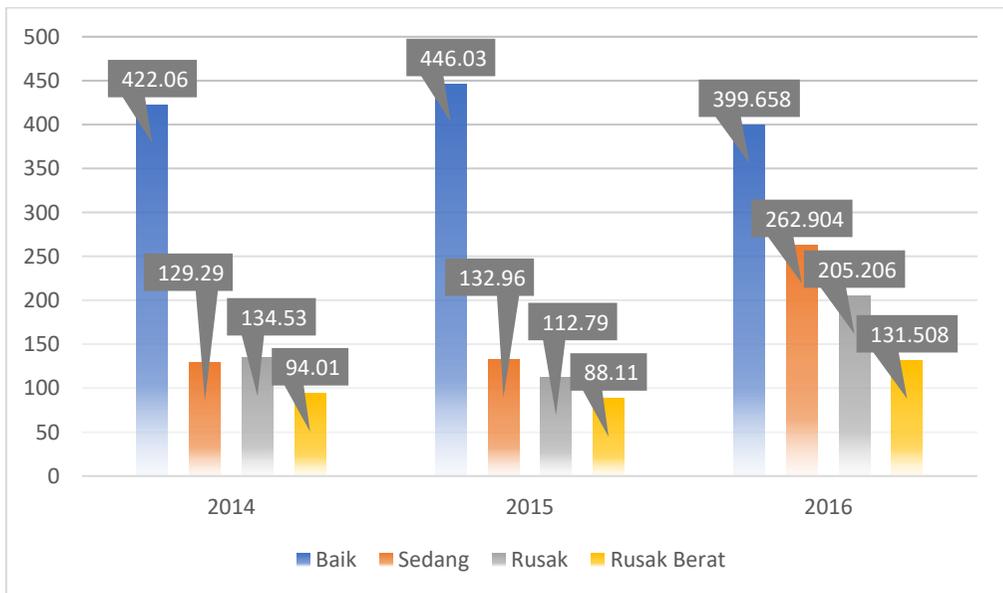
Peningkatan jumlah jalan yang diaspal ini sejalan bertambahnya total panjang jalan yang ada. Peningkatan jalan yang diaspal sangat penting karena jalan merupakan sarana penduduk untuk melakukan mobilitas. Semakin banyak jalan yang diaspal, maka semakin memudahkan dan memperlancar mobilitas penduduk, yang pada akhirnya diharapkan akan semakin meningkatkan dan pemeratakan kondisi ekonomi antar wilayah karena adanya sarana yang menghubungkan kegiatan ekonomi antar penduduk.

7.1.1.3 Panjang Jalan Kabupaten menurut Kondisi Jalan

Tabel 7.3 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014–2016

Kondisi Jalan	2014	2015	2016
Baik	422,06	446,03	399,658
Sedang	129,29	132,96	262,904
Rusak	134,53	112,79	205,206
Rusak Berat	94,01	88,11	131,508
	779,89	779,89	999,28

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

Gambar 7.2. Panjang jalan kabupaten menurut kondisi jalan Tahun 2014 – 2016

Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Wonosobo jika dirinci menurut kondisi jalan sebagian besar jalan kabupaten dalam kondisi baik. Jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2014 sebesar 54,12% kondisi ini turun jika dibandingkan pada tahun 2013 yaitu sebesar 62,13%. Turunnya persentase panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2014 ini sejalan dengan meningkatnya panjang jalan dalam kondisi sedang, rusak, dan rusak berat.

7.1.2 Jembatan

Jembatan sebagai prasarana transportasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelancaran pergerakan lalu lintas. Dimana fungsi jembatan adalah menghubungkan rute atau lintasan transportasi yang terpisah baik oleh sungai, rawa, danau, selat, saluran, jalan raya, jalan kereta api dan perlintasan lainnya.

Dari segi perkonomian, jembatan dapat mengurangi biaya transportasi. Dan dari segi efisiensi waktu, dengan adanya jembatan dapat mempersingkat waktu tempuh pada perjalanan darat yang saling terpisah. Jembatan juga dapat meningkatkan daerah tertinggal untuk dapat lebih berhubungan dengan daerah lain dengan mudah

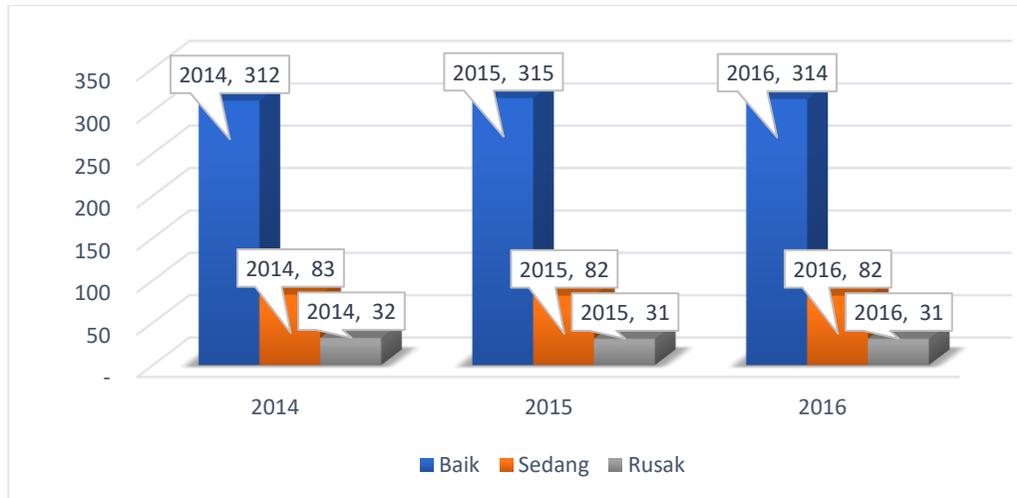
**Tabel 7.4 Jumlah dan Kondisi Jembatan di Kabupaten Wonosobo
Tahun 2014 – 2016**

No	Kec	2014					2015					2016				
		B	S	R	J	P (m)	B	S	R	J	P (m)	B	S	R	J	P (m)
1	Wadaslintang	31	19	2	52	322	31	19	2	52	322	31	19	2	52	322
2	Kepil	38	9	1	48	298	38	9	1	48	298	38	9	1	48	298
3	Sapuran	25	8	3	36	223	25	8	3	36	223	25	8	3	36	223
4	Kalibawang	10	3	1	14	86	10	3	1	14	86	10	3	1	14	86
5	Kaliwiro	28	6	9	43	266	29	6	8	43	266	28	6	8	43	266
6	Leksono	17	3	2	22	139	17	3	2	22	139	17	3	2	22	139
7	Sukoharjo	20	4	2	26	155	20	4	2	26	155	20	4	2	26	155
8	Selomerto	23	3	1	27	167	23	3	1	27	167	23	3	1	27	167
9	Kalikajar	18	5	1	24	149	18	5	1	24	149	18	5	1	24	149
10	Kertek	14	5	1	20	133	14	5	1	20	133	14	5	1	20	133
11	Wonosobo	17	4	1	22	139	18	3	1	22	139	18	3	1	22	139
12	Watumalang	23	5	2	30	186	23	5	2	30	183	24	5	2	30	186
13	Mojotengah	19	5	1	25	155	20	5	1	26	165	19	5	1	25	155
14	Garung	15	2	1	18	112	15	2	1	18	112	15	2	1	18	112
15	Kejajar	14	2	4	20	124	14	2	4	20	124	14	2	4	20	124
Jumlah		312	83	32	427	2.654	315	82	31	428	2.661	314	82	31	427	2.654

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Wonosobo*

Keterangan :

- B : Baik
- S : Sedang
- R : Rusak
- J : Jumlah
- P (m) : Panjang dalam meter



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Wonosobo

Gambar 7.3. Jumlah Jembatan Menurut Kondisi Jembatan di Kabupaten Wonosobo , 2014–2016

Pada rentang tahun 2014 – 2015 jumlah jembatan dengan kondisi baik mengalami peningkatan sebanyak 3 buah yang berada di Kecamatan Kaliwiro, Wonosobo dan Mojotengah. Sedangkan dalam rentang tahun 2015 – 2016 jembatan dengan kondisi baik berkurang 1 menjadi kriteria kondisi sedang yaitu di Kecamatan Wonosobo.

Dengan meningkatnya prasarana jembatan diharapkan arus transportasi antar wilayah semakin lancar karena tidak terjadi kesenjangan antar wilayah karena rute transportasi yang terpisah oleh sungai, saluran atau jalan raya.

7.1.3 Terminal

Prasarana lainnya selain jaringan jalan dan jembatan yang mendukung transportasi adalah terminal. Terminal yang dimiliki

sebagai alat pendukung transportasi di Kabupaten Wonosobo adalah terminal bus.

Terminal bus adalah sebuah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Tabel 7.5 Jumlah Terminal berdasarkan Tipe Terminal Di Kabupaten Wonosobo, 2014 – 2016

Type	2014	2015	2016
Type A	1	1	1
Type B	0	0	0
Type C	7	7	7
Jumlah	8	8	8

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

Jumlah total terminal bus di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 tidak ada perubahan yaitu 8 buah yang terdiri dari 1 buah terminal type A yaitu terminal induk Mendolo dan 7 terminal type C yang masing- masing berada di Kecamatan Wonosobo (terminal Mendolo atas), Leksono (ds. Sawangan), Kertek, Garung, Watumalang (ds. Gondang), Sapuran dan Kaliwiro.

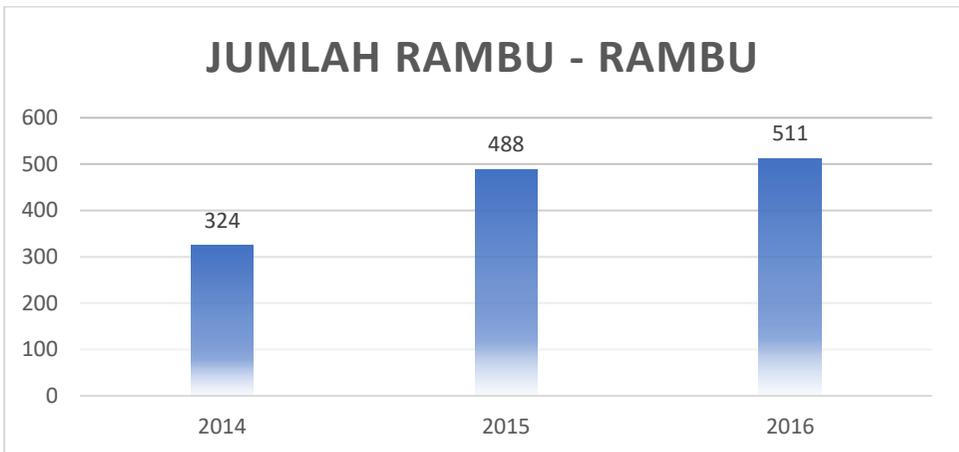
7.1.4 Prasarana Pendukung Transportasi Lainnya

Prasarana pendukung transportasi lainnya yang mendukung kelancaran transportasi yang ada di Kabupaten Wonosobo antara lain adalah rambu-rambu.

Tabel 7.6 Jumlah Rambu Jalan Di Kabupaten Wonosobo, 2014 - 2016

Jenis	Jumlah		
	2014	2015	2016
Traffic Light	6	6	6
Warning Light	10	14	14
Cermin Tikung	20	20	20
Rambu Model F	43	55	63
RPPJ	10	15	20
Rambu LL Ukuran 60 cm	200	200	200
Rambu LL Ukuran 75 cm	0	20	30
Deliniator	0	123	123
Zebracross	35	35	35
Jumlah	324	488	511

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo



Sumber : Dinas Perumahan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo

Gambar 7.4 Jumlah Rambu-Rambu yang Terpasang di Kabupaten Wonosobo, 2014 - 2016

Berdasarkan pada grafik 7.4 terlihat Pemasangan rambu-rambu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan

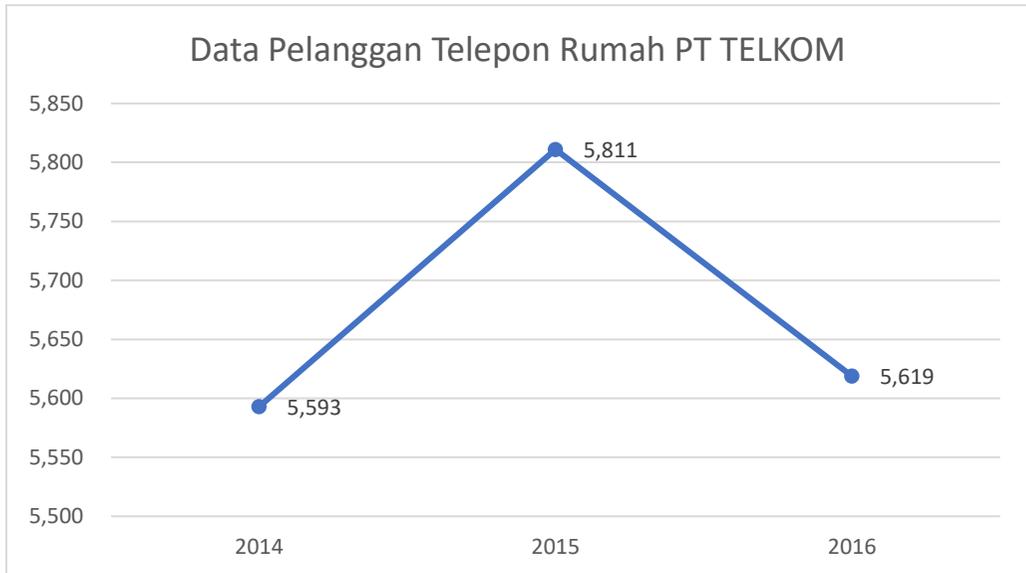
sebesar 63%. Dengan peningkatan pemasangan rambu-rambu ini diharapkan meminimalkan kecelakaan lalu lintas dan memperlancar arus transportasi.

7.2. Telekomunikasi

Perkembangan jaman dan informasi menuntut manusia untuk dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di sekitar maupun di luar lingkungan tempat tinggalnya. Saat ini, sarana komunikasi dan informasi yang ada sudah semakin canggih dan lengkap dalam memberikan kebutuhan informasi masyarakat. Harga telepon seluler yang semakin lama semakin kompetitif, telepon dengan menggunakan jaringan internet, serta pergeseran akan prioritas kebutuhan membuat pelanggan telepon rumah mengalami fluktuasi.

Dibeberapa daerah terjadi pemasangan baru berkaitan dengan fitur tambahan yang ditawarkan oleh pihak penyedia jasa. Sementara disisi lain kebutuhan akan fitur tersebut bisa dicukupi dengan gadget yang lain.

7.2.1 Telepon Rumah



Sumber : PT. Telkom Wonosobo

Gambar 7.5 Jumlah Pelanggan Telepon Rumah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 - 2016

7.2.2 Menara Telekomunikasi

Kondisi wilayah geografis yang tidak terjangkau telepon kabel, serta perkembangan peralatan telekomunikasi yang bersifat *mobile* mengharuskan infrastruktur juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Pembangunan menara seluler menjadi salah satu hal wajib yang harus dilakukan untuk menopang kebutuhan ini. Disisi lain juga harus ada pembatasan agar tidak terjadi rimba menara di Kabupaten Wonosobo, sehingga diutamakan untuk menggunakan menara existing secara bersama. Sampai dengan tahun 2016 terdapat 117 tower berijin yang ada di Kabupaten Wonosobo.

**Tabel 7.7 Jumlah Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Wonosobo,
2014 – 2016**

No	Kecamatan	Jumlah Tower Berijin		
		2014	2105	2106
1	Wadaslintang	5	5	5
2	Kepil	8	8	8
3	Sapuran	6	6	6
4	Kalibawang	5	5	5
5	Kaliwiro	7	7	7
6	Leksono	1	2	2
7	Sukoharjo	7	7	7
8	Selomerto	8	10	10
9	Kalikajar	6	6	6
10	Kertek	12	13	13
11	Wonosobo	19	20	20
12	Watumalang	6	6	6
13	Mojotengah	7	7	7
14	Garung	4	5	5
15	Kejajar	10	10	10
	Jumlah	111	117	117

Sumber : *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Bab 8

Agama dan Sosial

AGAMA DAN SOSIAL

8.1. Penduduk Menurut Agama

Pada tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo yang beragama Islam sebesar 98,28 persen. Di peringkat kedua agama Kristen sebesar 0,76 persen, diikuti agama Katholik sebesar 0,68 persen, Hindu 0,17 persen, Budha sebesar 0,10 persen dan sisanya beragama lainnya (Konghucu, Kepercayaan), (Tabel 8.1).

Tabel 8.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo Menurut Agama Tahun 2013 – 2016

Agama	2013		2014		2015		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Islam	760,105	98.54	831,683	98.61	879,781	98.65	714,359	98.28
Katolik	4,315	0.56	4,131	0.49	4,602	0.52	4,951	0.68
Kristen	5,880	0.76	5,406	0.64	5,493	0.62	5,543	0.76
Budha	866	0.11	692	0.08	735	0.08	751	0.10
Hindu	150	0.02	1479	0.18	1175	0.13	1206	0.17
Lainnya	78	0.01	36	0.00	36	0.00	36	0.00
Jumlah	760.764	100,00	764.189	100,00	769.315	100,00	773.280	100,00

Sumber : BPS Kab. Wonosobo, 2016

8.2. Tempat Ibadah

Tempat ibadah adalah tempat dimana umat suatu agama menjalankan ibadah. Selain digunakan untuk melaksanakan ibadah, seringkali tempat ibadah digunakan untuk acara-acara keagamaan yang bersifat kolektif atau bersama-sama. Ketersediaan tempat ibadah menjadi hal yang cukup penting untuk diperhatikan, karena menyangkut ketersediaan sarana untuk pelaksanaan kebebasan beragama bagi seluruh penduduk.

Tabel 8.2. Banyaknya Tempat Ibadah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2013–2016

Tempat Ibadah	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Masjid	1,460	1,470	1,474	1,474
Mushola	2,414	2,380	2,246	2,246
Gereja	17	28	37	37
Kapel	8	0	0	0
Wihara	9	10	9	9
Pura	1	1	0	0
Jumlah	3,909	3,889	3,766	3,766

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo

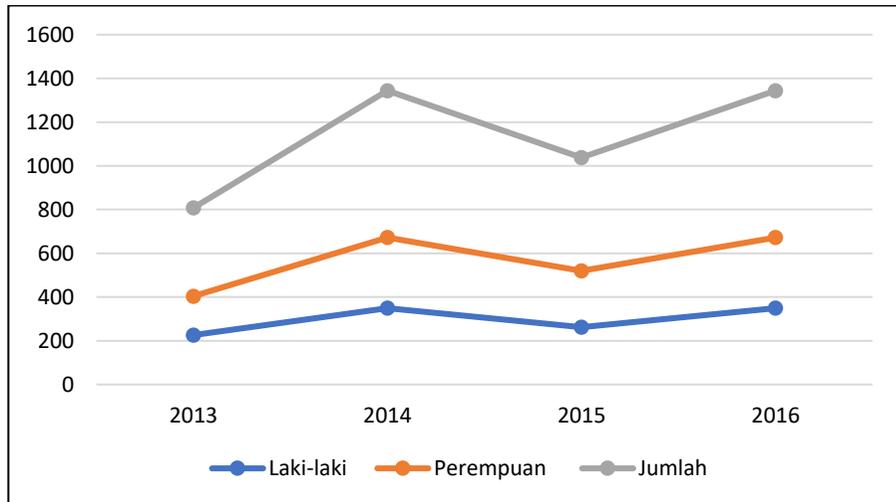
Kehidupan beragama yang harmonis sangat didambakan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari tempat-tempat peribadatan yang ada di sekitar warga, seperti masjid, gereja, dan pesantren-pesantren. Tempat ibadah di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 mencapai 3.766 buah yang terdiri dari 39,66 persen Masjid dan Langgar 59,64 persen Gereja Kristen dan Katholik.

8.3. Jamaah Haji

Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam dan kewajiban bagi seorang muslim yang telah mampu. Jumlah jamaah haji di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 sebesar 672 jamaah, naik dari 519 jamaah pada tahun 2015. Kenaikan jumlah jamaah haji di Kabupaten Wonosobo ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah kuota haji bagi kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, jumlah jamaah haji di Kabupaten Wonosobo lebih banyak diikuti oleh kaum laki-laki

daripada perempuan. Pada tahun 2016, jamaah haji laki-laki sejumlah 349 orang sedangkan jamaah perempuan sejumlah 323.



Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, 2016

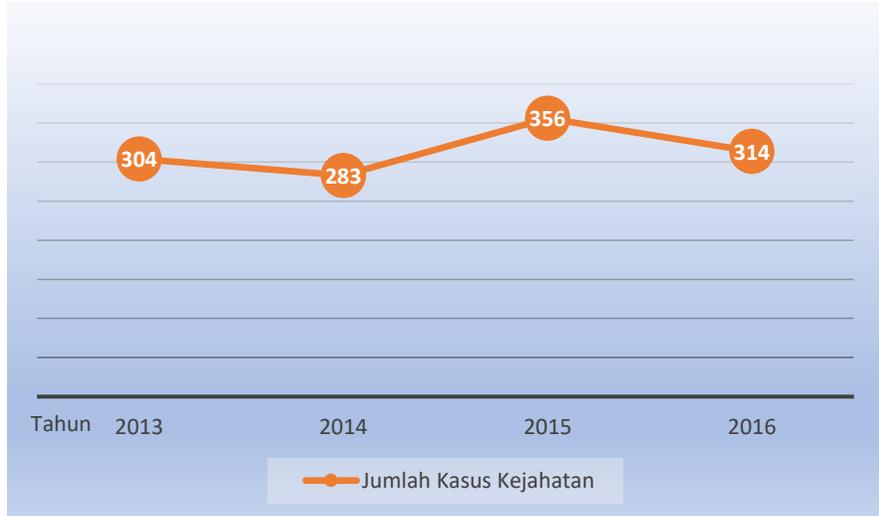
Gambar 8.1. Jumlah Jamaah Haji Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Wonosobo, Tahun 2013 – 2016

8.4. Kasus Kejahatan dan Pelanggaran Lalu Lintas

Secara umum, kejahatan adalah tindakan yang melanggar undang-undang baik perkara pidana maupun perdata. Tindak kejahatan ada bermacam-macam jenisnya. Kejahatan yang dimaksud di sini meliputi pembunuhan, penganiayaan berat dan ringan, pencurian, penipuan, penggelapan, pembakaran, narkoba, pemalsuan uang dan surat, pemerkosaan, perjudian, pengroyokan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dari Gambar 8.2. dapat dilihat bahwa jumlah kejahatan selama empat tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014, jumlah kasus kejahatan yang terjadi di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan sebesar 21 kasus atau 8,07% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 42 kasus

atau 8,16% di banding tahun sebelumnya. Ditahun 2016 mengalami penurunan 149 kasus atau 48,85 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 terjadi 314 kasus kejahatan.



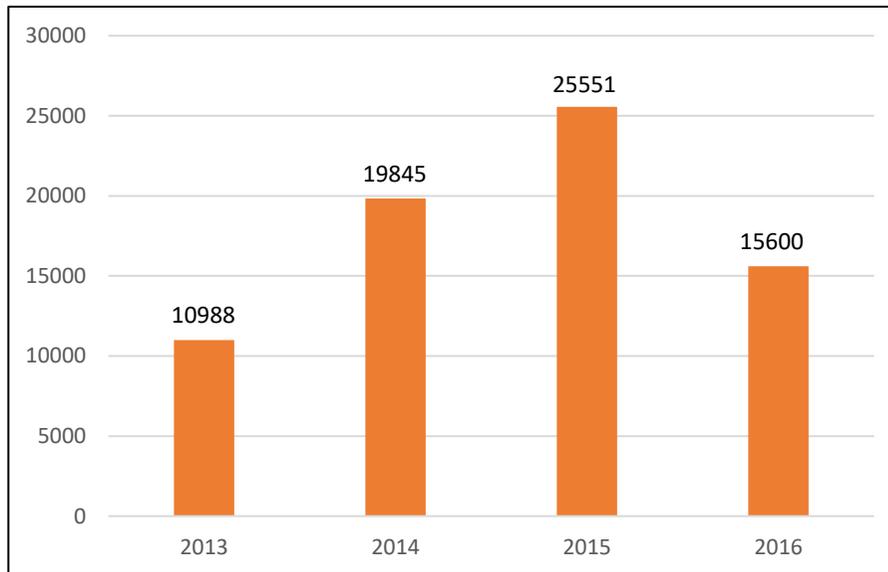
Sumber: Polres Wonosobo, 2016

Gambar 8.2. Jumlah Kasus Kejahatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 – 2016

Sebagai kabupaten yang sedang berkembang, ketersediaan sarana transportasi berupa jalan yang layak digunakan merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Ketersediaan sarana transportasi juga harus dilengkapi dengan rambu lalu lintas agar lalu lintas menjadi tertib.

Kasus yang sering kali terjadi, rambu-rambu dan peraturan lalu lintas sudah dibuat, tetapi kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan yang ada masih kurang. Dari tahun 2013 sampai dengan 2015, secara umum terjadi kenaikan jumlah kasus pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Wonosobo. Kenaikan pelanggaran lalu lintas pada tahun 2015 adalah sebesar 28,75 persen dibanding tahun sebelumnya atau dari 19.845 kasus pada tahun 2014 menjadi 25.551 kasus

pelanggaran pada tahun 2015. Pada tahun 2016 jumlah pelanggaran lalu lintas di kabupaten Wonosobo mengalami penurunan sebesar 63.79 persen atau turun menjadi 15.600 kasus.



Sumber : Polres Wonosobo, 2016

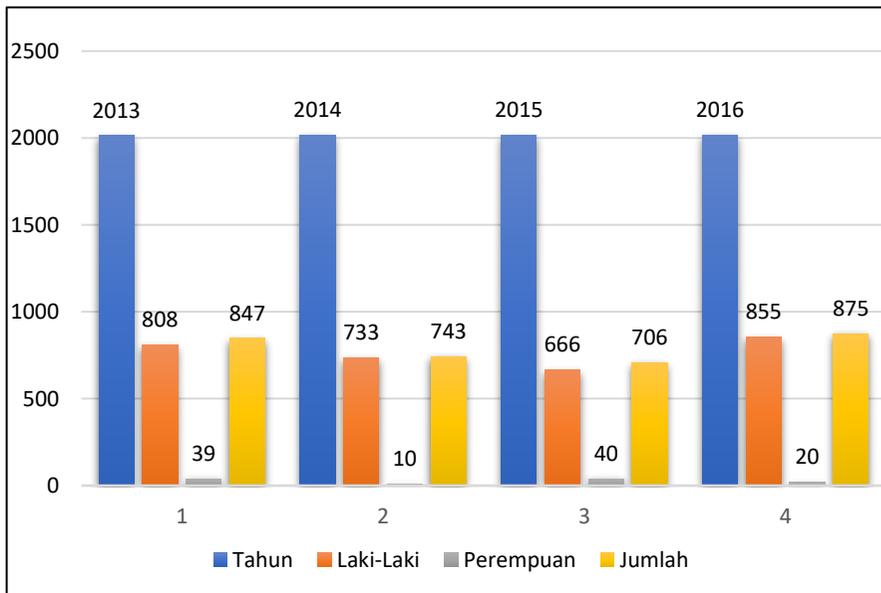
Gambar 8.3. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Wonosobo 2013– 2016

8.5. Napi yang Menghuni Rutan Wonosobo

Kabupaten Wonosobo memiliki 1 buah Rumah Tahanan (Rutan), menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana merupakan seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman yaitu dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.

Pada tahun 2013 jumlah narapidana di Rutan Kabupaten Wonosobo berjumlah 847 orang, terdiri dari 808 napi laki-laki sedangkan napi perempuan berjumlah 39. Ditahun 2015 jumlah napi

mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Berkurangnya jumlah napi dikarenakan berkurangnya napi laki-laki menjadi 666 napi. Akan tetapi di tahun 2016 jumlah napi laki-laki mengalami sedikit kenaikan yaitu sebesar 1,19 persen dan jumlah keseluruhan napi di Rutan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 berjumlah 875 orang terdiri dari napi laki-laki 855 dan 20 orang napi perempuan



Sumber : Rumah Tahanan Kabupaten Wonosobo

Gambar 8.4. Jumlah Narapidana yang Menghuni Rumah Tahanan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 – 2016

Bab 9

Kemiskinan

KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan suatu masalah besar dimana kemiskinan sesungguhnya telah menjadi masalah dunia sejak berabad-abad lalu. Namun, sampai sekarang kemiskinan masih menjadi bagian dari persoalan terberat dan paling krusial di dunia ini. Perhatian pemerintah baik pemerintah pusat sampai dengan daerah terhadap upaya penanggulangan kemiskinan diwujudkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015, penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas kebijakan dengan target sasaran menurunkan persentase jumlah penduduk miskin **menjadi 18 persen pada tahun 2015**. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepatsasaran. Data kemiskinan menjadi sesuatu hal yang penting karena merupakan input yang menjadi pertimbangan utama dalam proses perencanaan program penanggulangan kemiskinan. Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional, daerah, maupun di tingkat komunitas. Pengukuran kemiskinan yang terpercaya (*reliable*) dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin.

Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Defenisi ini menunjukkan makna kemiskinan sangat luas dan multidimensi,

serta tidak mudah untuk mengukurnya. Contohnya, apa yang dimaksud dengan kehidupan yang bermartabat. Setiap orang tentu akan menginterpretasikannya secara berbeda-beda, sehingga dapat mengundang perdebatan panjang. Selain itu, tidak semua hak-hak dasar dapat dikuantifikasi, seperti rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Karenanya, hingga saat ini tak ada satupun metode yang sempurna dalam memotret kemiskinan. Kata kemiskinan adalah sesuatu yang sangat kualitatif. Karenanya, sangat sulit untuk mengukurnya secara kuantitatif. Sebagai contoh, jika setiap orang diminta melengkapi kalimat berikut, "saya miskin karena.....". Akan ada ratusan, bahkan ribuan kata yang bisa digunakan untuk melengkapi kalimat ini, tergantung orangnya. Dan pastinya, tidak semua bisa dikuantitatifkan. Singkat kata, mengukur kemiskinan tidaklah semudah mengukur panjang suatu objek riil dengan sebuah penggaris.

9.1. Konsep Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi menurut pendekatan ini, penduduk

miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK).

9.2. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penghitungan penduduk miskin adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor. Penghitungan ini didasarkan pada data sampel, bukan data sensus sehingga hasilnya adalah estimasi. Data kemiskinan yang dihasilkan oleh BPS biasa disebut data kemiskinan makro.

9.3. Kemiskinan Makro *versus* Kemiskinan Mikro

Berbagai kondisi kemiskinan dapat direpresentasikan melalui berbagai jenis data baik data yang bersifat makro maupun data mikro. Data kemiskinan yang dihasilkan dengan menggunakan GK seperti yang disajikan pada publikasi adalah data kemiskinan makro. Data ini hanya dapat digunakan untuk melihat perkembangan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu beserta karakteristiknya sehingga perencanaan penurunan tingkat kemiskinan dapat dikaitkan dengan perencanaan pembangunan dalam bidang lainnya seperti perencanaan tingkat pertumbuhan, investasi, dan peningkatan kesempatan kerja, serta untuk mengevaluasi keberhasilan program-program anti kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah dari waktu ke waktu.

Berbeda dengan data makro, data mikro lebih bersifat operasional yang idealnya mampu menyajikan informasi siapa itu si miskin, dimana mereka berada, dan apa yang mereka lakukan, yang direkap dalam unit administrasi terendah (misalnya RT/RW atau desa/kelurahan). Data kemiskinan yang bersifat mikro ini lebih operasional dalam mengidentifikasi kelompok sasaran (seperti nama kepala keluarga, alamat dan status sosial-ekonomi tertentu). Data mikro ditujukan untuk program-program yang sifatnya target sasaran seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Raskin dan Jamkesmas.

9.4. Konsep Garis Kemiskinan (GK)

Dalam penghitungan kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*), Garis Kemiskinan (GK) merupakan instrumen yang sangat penting. GK yang tidak tepat akan menghasilkan pengukuran kemiskinan yang menyesatkan. Pada dasarnya GK merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran

kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Komposisi komoditas makanan dan non makanan penyusun GK berbeda-beda pada tiap negara, sesuai dengan pola konsumsi penduduknya. Itulah sebabnya kenapa nominal GK yang digunakan di setiap negara juga berbeda. Karena itu, GK yang digunakan di Vietnam belum tentu representatif jika digunakan di Indonesia.

Rumus Penghitungan :

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

dimana:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

9.5. Teknik penghitungan GKM

Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference population*) yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini

didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum/Indeks Harga Konsumen (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_{jk}$$

dimana :

- GKM_j = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kalori).
- P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j.
- Q_{jk} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.
- V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2.100 kalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_j = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jk}}$$

dimana :

K_j = Kalori dari komoditi k di daerah j

\overline{HK}_j = Harga rata-rata kalori di daerah j

$$F_j = \overline{HK}_j \times 2.100$$

dimana :

F_j = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kalori/kapita/hari.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan.

Nilai kebutuhan minimum perkomoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$NF_p = \sum_{i=1}^n r_i \times V_i$$

dimana:

- NF_p = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah p ($GKNM_p$).
- V_i = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non makanan daerah p (dari Susenas modul konsumsi).
- r_i = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non makanan menurut daerah (hasil SPPKD 2004).
- i = Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p.
- p = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

9.6. Persentase Penduduk Miskin

Head Count Index (HCI-P₀), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

dimana :

α = 0

z = Garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = Jumlah penduduk.

9.7. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P₁), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

dimana :

- α = 1
- z = Garis kemiskinan.
- y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$),
 $y_i < z$
- q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
- n = Jumlah penduduk.

9.8. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P₂*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Rumus Penghitungan :

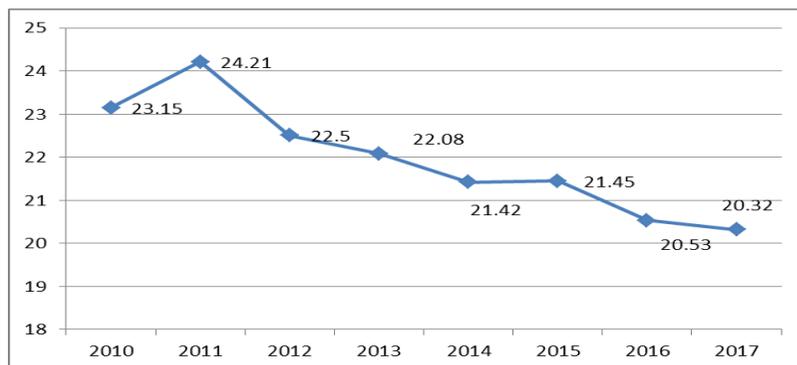
$$P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$$

dimana :

- α = 2
- z = Garis kemiskinan
- y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1, 2, \dots, q$),
 $y_i < z$
- q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- n = Jumlah penduduk

9.9. **Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Wonosobo, Tahun 2010 - 2017**

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo selama periode 2010-2017 cenderung fluktuatif sebagaimana gambar 9.1. Pada tahun 2011 angka kemiskinan Kabupaten Wonosobo meningkat menjadi 24,21 persen (182.951 orang) dan menempati posisi tertinggi dibandingkan kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pada periode 2010-2011 ini sebanyak kurang lebih 60 persen kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami kenaikan persentase penduduk miskinnya, termasuk Kabupaten Wonosobo. Setelah mengalami kenaikan pada tahun 2011, angka kemiskinan pada tahun selanjutnya yaitu periode 2012 dan 2013 kembali berhasil diturunkan dan tren penurunan itu terus berlanjut hingga tahun 2017 meskipun tahun 2015 sedikit mengalami kenaikan dari 21,42 pada tahun 2014 menjadi 21,45 di tahun 2015. Pada tahun 2017 berhasil ditekan menjadi 20,32 dari 20,53 pada tahun 2016.



Sumber : BPS

Gambar 9.1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Wonosobo, 2010 - 2017

Meskipun jumlah penduduk miskin sudah mengalami penurunan namun jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jateng masih menempati urutan ke- 35. Salah satu faktor tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo tahun 2017 masih relatif tinggi karena naiknya harga kebutuhan pokok yang digambarkan dengan kenaikan tingkat inflasi sebesar 3,21 pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 yang hanya 2,97%.

Tabel 9.1. Persentase Penduduk Miskin di 5 Kabupaten/Kota Peringkat Terendah di Provinsi Jawa Tengah, 2015-2017

Kab./kota	2015	2016	2017	Peringkat Jateng		
				2015	2016	2017
(1)	(3)	(4)	(4)	(6)	(7)	(7)
Kab. Purbalingga	19,70	18,98	18,80	32	32	32
Kab. Kebumen	20,44	19,86	19,60	34	34	34
Kab. Wonosobo	21,45	20,53	20,32	35	35	35
Kab. Rembang	19,28	18,54	18,35	31	31	31
Kab. Brebes	19,79	19,47	19,14	33	33	33
JAWA TENGAH	13,58	13,27	13,01	-	-	-

Sumber : BPS

Pada tahun 2017, seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinannya. Meskipun mengalami penurunan, Kabupaten Wonosobo turun 0,21 poin, Kebumen 0,26 poin, Purbalingga 0,17 poin, Brebes 0,33 poin dan Kabupaten Rembang turun 0,19 poin.

9.10. Perubahan Garis Kemiskinan 2010-2017

Garis kemiskinan digunakan sebagai suatu batasan untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Tabel 9.2. Garis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo, 2010-2017

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
(1)	(2)
2010	203 216
2011	226 827
2012	253 181
2013	258 522
2014	267 548
2015	275 180
2016	297 422
2017	308 553

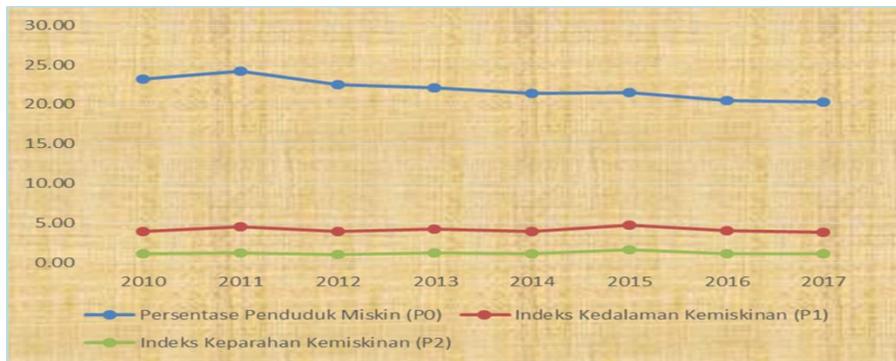
Sumber : BPS

Dalam kurun waktu tahun 2010-2017, garis kemiskinan Kabupaten Wonosobo cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kenaikan garis kemiskinan berbanding lurus dengan tingkat inflasi sehingga ketika inflasi mengalami kenaikan maka garis kemiskinan akan bergeser naik. Berdasarkan tabel. 9.2 perkembangan garis kemiskinan pada tahun 2010-2017 yang semakin naik tidak

menyebabkan naiknya persentase penduduk miskin. Kenaikan inflasi dan garis kemiskinan menyebabkan melambatnya penurunan jumlah penduduk miskin.

9.11. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkeci ljumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Untuk sejauh mana kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari nilai indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.



Sumber : BPS

Gambar 9.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) Kabupaten Wonosobo, 2010-2017

Grafik perkembangan Indeks kedalaman kemiskinan yang semakin mendekati nol menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit,

dengan demikian ada peningkatan rata-rata pengeluaran penduduk miskin. Sedangkan penurunan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan semakin menyempitnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks kedalaman kemiskinan yang meskipun mengalami penurunan namun dari angka yang ada menunjukkan bahwa masih ada penduduk di Kabupaten Wonosobo yang hidup dalam kekurangan karena masih ada kesenjangan antara pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Demikian pula dengan indeks keparahan kemiskinan yang masih menunjukkan angka 1,10 pada tahun 2017. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran walaupun sama-sama miskin, antar orang miskin ada ketimpangan pengeluaran yang masih cenderung tinggi, walaupun telah juga mengalami penurunan ketimpangan dibandingkan tahun sebelumnya.

Bab 10

Indeks Pembangunan Manusia

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

10.1. Konsep

Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang sangat luas, melingkupi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari kebebasan untuk menyatakan pendapat, untuk mencapai kesetaraan gender, untuk memperoleh pekerjaan, untuk menjaga gizi anak, juga untuk bisa membaca dan menulis. Laporan tahunan pembangunan manusia (*Human Development Report*) oleh *The United Nations Development Programme (UNDP)*, yang kini menjadi acuan pembangunan di berbagai negara di dunia dengan jelas membuktikan bahwa pembangunan manusia mendorong pembangunan ekonomi dan sebaliknya pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan pembangunan manusia maka tidak akan bertahan lama.

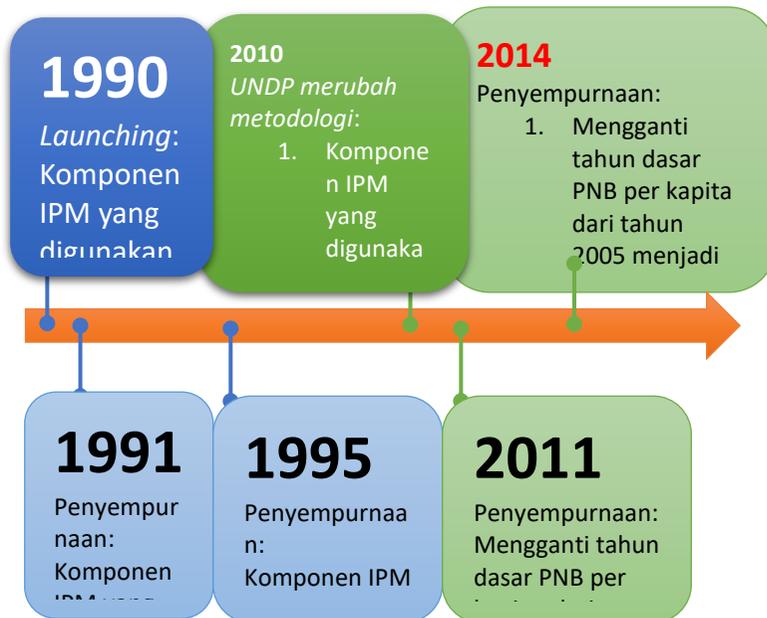
Untuk mengetahui kinerja pembangunan manusia suatu Negara atau wilayah, *UNDP* merumuskan suatu indikator yang dinamakan *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan alat ukur berupa indikator komposit tentang gambaran pencapaian pembangunan manusia yang dicapai oleh suatu wilayah. IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Perlu diketahui bahwa IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM juga dapat menentukan

peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

10.2. Perubahan Metodologi IPM

Pada tahun 2010, UNDP memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode baru. Tahun 2011 dan 2014 dilakukan penyempurnaan metodologi (IPM Metode Baru).



Gambar 10.1. Roadmap Perubahan Metodologi IPM

Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM yaitu:

Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH)

sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

AMH pada metode lama diganti dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dimensi lain.

Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Keunggulan IPM Metode Baru

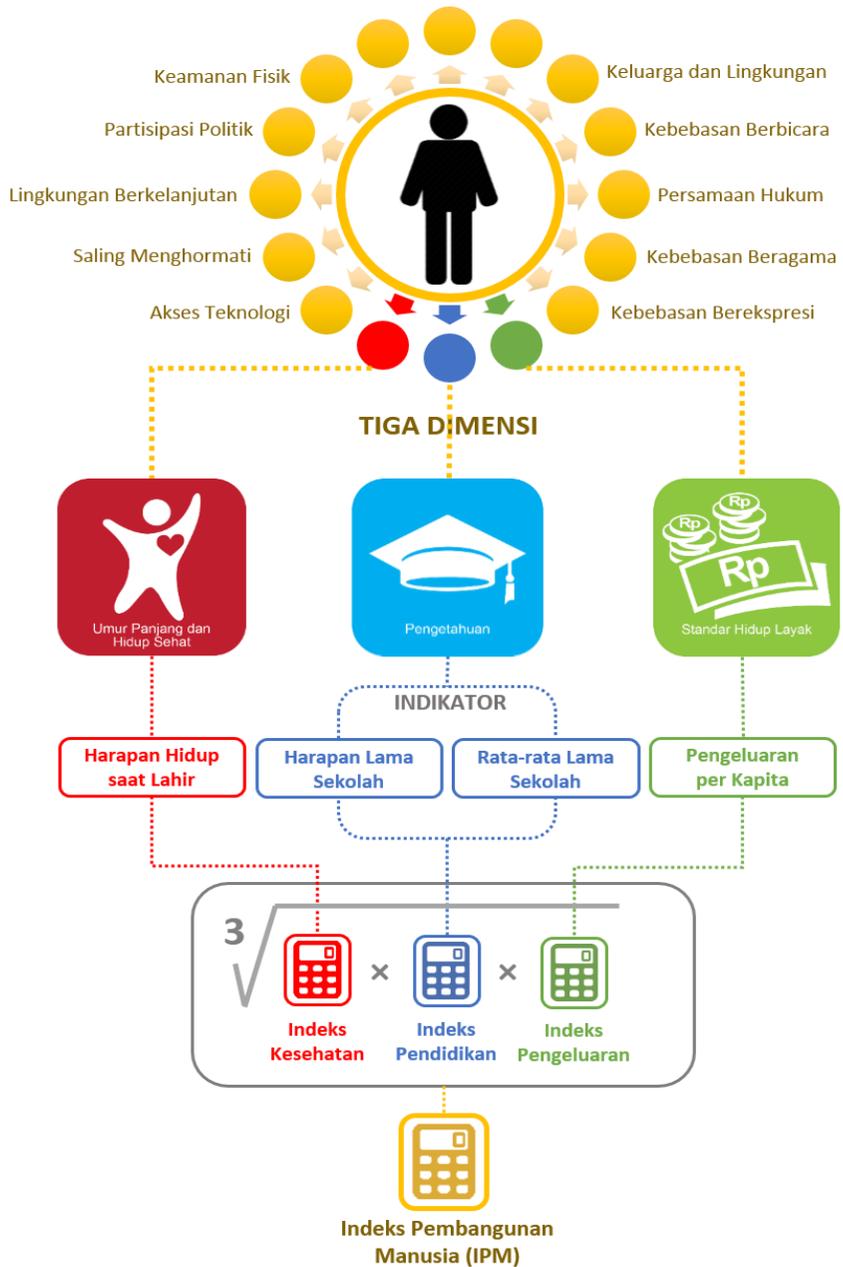
Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).

Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.

PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Bagaimana IPM Metode Baru Diukur?



Gambar 10.2. Grafik Metode Baru IPM

Menghitung Indeks Komponen

Dimensi Kesehatan



$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Dimensi Pendidikan



$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Dimensi Pengeluaran



$$I_{pendapatan} = \frac{\ln(\text{pendapatan}) - \ln(\text{pendapatan}_{min})}{\ln(\text{pendapatan}_{maks}) - \ln(\text{pendapatan}_{min})}$$

Menghitung IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

10.3. Implementasi IPM Metode Baru di Indonesia

Ketersediaan data

- Angka Harapan Hidup saat lahir (Sensus Penduduk tahun 2010-SP2010, Proyeksi Penduduk).

- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional-Susenas).
- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan dengan menggunakan data Susenas.

Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Tabel 10.1. Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru

DIMENSI	METODE LAMA		METODE BARU	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Kesehatan	AngkaHarapanHidupsaatLahir(AHH)	AngkaHarapanHidupsaatLahir(AHH)	AngkaHarapanHidupsaatLahir(AHH)	AngkaHarapanHidupsaatLahir(AHH)
Pengetahuan	1. AngkaMelekHuruf (AMH)	1. AngkaMelekHuruf (AMH)	1. Harapan Lama Sekolah(HLS)	1. Harapan Lama Sekolah(HLS)
	2. KombinasiAngkaPartisipasiKasar (APK)	2. Rata-rata Lama Sekolah(RLS)	2. Rata-rata Lama Sekolah(RLS)	2. Rata-rata Lama Sekolah(RLS)
StandarHidupLayak	PDB per kapita	Pengeluaran per kapita	PNB per kapita	Pengeluaran per kapita
Agregasi	Rata-rata Hitung $IPM = \frac{1}{3}(I_{\text{kesehatan}} + I_{\text{pengetahuan}} + I_{\text{pendapatan}})$		Rata-rata Ukur $IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$	

Angka Harapan Hidup saat Lahir-AHH (*Life Expectancy-e₀*)

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*.

Rata-rata Lama Sekolah-RLS (*Mean Years of Schooling-MYS*)

Rata-rata lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

Harapan Lama Sekolah-HLS (*Expected Years of Schooling-EYS*)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dengan asumsi, kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dihitung

pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Rata-rata pengeluaran per kapita konstan kemudian disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Pengeluaran yang telah dibagi dengan PPP ini disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Penghitungan Paritas Daya Beli

Paritas daya beli dihitung sebagai perbandingan rata-rata geometrik harga paket komoditas barang dan jasa di suatu wilayah terhadap Jakarta Selatan.

$$Paritas\ Daya\ Beli_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

p_{ik} : harga komoditas di
Jakarta Selatan

Klasifikasi Pembangunan Manusia

Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang

sama dalam hal pembangunan manusia. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:



Gambar 10.3. Mengukur Kecepatan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu yang digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

10.4. Perkembangan IPM Kabupaten Wonosobo Tahun 2012-2016

Tabel 10.2. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wonosobo, 2012 — 2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup (tahun)	70,63	70,76	70,82	71,02	71,16
Harapan Lama Sekolah (tahun)	10,83	11,03	11,34	11,43	11,67
Rata-rata lama sekolah (tahun)	5,90	5,92	6,07	6,11	6,12
Pengeluaran per kapita disesuaikan (ribu rupiah PPP)	9.404	9.458	9.491	9.736	9.877
IPM	64,18	64,57	65,20	65,70	66,19

Sumber : BPS

Perkembangan IPM Kabupaten Wonosobo dari tahun 2012 sampai dengan 2016 menunjukkan adanya peningkatan. IPM tahun 2016 sebesar 66,19 meningkat 2,70 point atau 3,13 % jika dibanding tahun 2012 sebesar 64,18. Mengacu pada klasifikasi *UNDP*, sepanjang tahun 2016 IPM Kabupaten Wonosobo termasuk pada kategori menengah atas ($66 \leq \text{IPM} < 80$).

Berdasarkan tabel di atas jika dibandingkan antara komponen pembentuk angka IPM menunjukkan bahwa pertumbuhan tertinggi selama 5 tahun terakhir adalah komponen Harapan Lama Sekolah

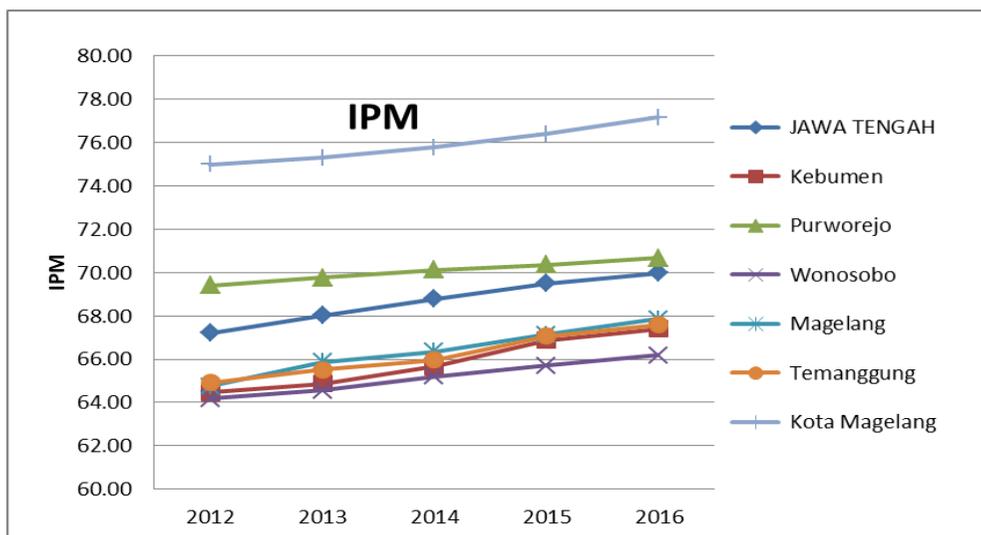
(HLS) sebesar 7,80% dan terendah adalah komponen Angka Harapan Hidup (tahun) sebesar 0,75%, hal ini menunjukkan bahwa bidang Angka Harapan Hidup (tahun) perlu dilakukan akselerasi pembangunan.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-eks Karesidenan Kedu, IPM Kabupaten Wonosobo selalu berada pada peringkat paling bawah di setiap tahunnya. Hal ini menjadi indikasi sederhana bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Wonosobo masih di bawah kabupaten/kota lain di wilayah eks Karesidenan Kedu. Berikut disajikan perkembangan IPM kabupaten/Kota di wilayah eks Karesidenan Kedu 2012-2016.

Tabel 10.3. IPM Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu, 2012-2016

Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	Peringkat th 2016	
						Jateng	EksKedu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kota Magelang	75,00	75,29	75,79	76,39	77,16	4	1
Kab. Magelang	64,75	65,86	66,35	67,13	67,85	24	3
Kab. Purworejo	69,40	69,77	70,12	70,37	70,66	14	2
Kab. Kebumen	64,47	64,86	65,67	66,87	67,41	28	5
Kab. Temanggung	64,91	65,52	65,97	67,07	67,60	26	4
Kab. Wonosobo	64,18	64,57	65,20	65,70	66,19	31	6

Sumber : BPS



Gambar 10.4. IPM Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu, 2012 - 2016

Jika dilihat secara lebih luas di tingkat Provinsi Jawa Tengah, sepanjang tahun 2012-2016 IPM Kabupaten Wonosobo selalu berada pada peringkat ke 30-31 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2016 IPM tertinggi di Jawa Tengah adalah Kota Semarang disusul berikutnya IPM Kota Salatiga masing-masing sebesar 81,19 dan 81,14. Sedangkan IPM terendah yaitu Kabupaten Brebes sebesar 63,98 atau selisih sekitar 2,21 poin dibandingkan IPM Kabupaten Wonosobo yang berada pada peringkat 31 se Provinsi Jawa Tengah.

Melihat perkembangan peringkat IPM yang selalu paling rendah dibandingkan kabupaten/kota se-Eks Karesidenan Kedu dan peringkat ke-31 dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo perlu untuk meningkatkan pembangunan di semua unsur-unsur pembentuk IPM yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi masyarakat, meskipun dampak dari usaha yang dilakukan saat ini akan kelihatan hasilnya setelah beberapa tahun mendatang, tidak bisa secara instan langsung berdampak yang signifikan pada angka IPM ditahun berikutnya.

Bab 11

PDRB Kabupaten

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN WONOSOBO

Produk Domestik Regional Bruto atau biasa disingkat PDRB merupakan salah satu bagian dari sistem neraca ekonomi regional yang didalamnya merekam hasil-hasil dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu (biasanya 1 tahun). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud dengan nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi konsumsi antara/biaya antara. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto.

a. Penggunaan harga pada tahun dasar

Setiap publikasi PDRB selalu disajikan dalam dua macam harga, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku didasarkan pada perkalian antara barang dan jasa yang diproduksi pada suatu tahun dengan harga yang terjadi pada tahun bersangkutan. Jadi pertumbuhan yang terjadi pada PDRB atas dasar harga berlaku bukan merupakan pertumbuhan riil/nyata karena masih dipengaruhi oleh perkembangan harga/inflasi, sehingga pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku tidak bisa dijadikan sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah.

PDRB atas dasar harga konstan didasarkan pada perkalian antara barang dan jasa yang diproduksi pada suatu tahun dengan harga yang terjadi pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai acuan/patokan, sehingga pertumbuhan yang terjadi merupakan pertumbuhan riil/nyata karena pertumbuhan tersebut semata-mata hanya didasarkan pada naik turunnya produksi barang/jasa. Dengan kata lain pertumbuhan yang terjadi sama sekali tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, karena harga barang/jasa sudah dipatok pada tahun dasar yang sudah ditentukan. Jadi pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan merupakan cermin dari produksi barang/jasa secara riil/nyata yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada waktu tertentu, biasanya dihitung setiap satu tahun sekali.

Tahun dasar adalah tahun yang digunakan sebagai rujukan penilaian (*reference year*) dalam penghitungan PDRB atas dasar harga konstan. Penggunaan tahun dasar dan perubahannya merupakan rekomendasi yang dibuat oleh PBB bagi seluruh negara agar selalu berupaya untuk memperbarui tata cara serta teknik penghitungan PDRB dengan menggunakan tahun yang dianggap lebih "*uptodate*", mengikuti perubahan dan perkembangan tatanan yang terjadi. Serial penghitungan PDRB dengan menggunakan tahun dasar 2000 dianggap sudah terlalu lama, selain itu serial tahun dasar tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan atau kondisi ekonomi yang terjadi. Oleh sebab itu serial penghitungan angka PDRB publikasi sekarang dan yang akan datang secara nasional maupun regional telah direkomendasikan untuk menggunakan tahun dasar 2010, karena pada tingkat nasional tahun tersebut dianggap tahun yang representatif

untuk digunakan sebagai rujukan bagi penghitungan PDRB tahun-tahun lainnya.

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB/PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam *System of National Accounts* (SNA2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

b. Tahun 2010 sebagai Tahun Dasar.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan sebagai berikut:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;

- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun¹;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan Indeks harga produsen (*Producers Price Index /PPI*);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya:

- Konsep dan Cakupan: Perlakuan *Work-in Progress (WIP)* pada *Cultivated Biological Resources (CBR)*:
Merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum di panen sebagai bagian dari output Kategori yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum di panen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.
- Metodologi : Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge (IBSC)* menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM)*.

¹ SNA1993, para 16.76: “constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing”

- Valuasi : Nilai tambah Kategori dinilai dengan Harga Dasar (Basic Price). Merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.
- Klasifikasi :
 Klasifikasi yang digunakan berdasarkan Internasional *Standard Classification (ISIC rev.4)* dan *Central Product Classification (CPC rev.2)*. BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Kategori Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI2010).

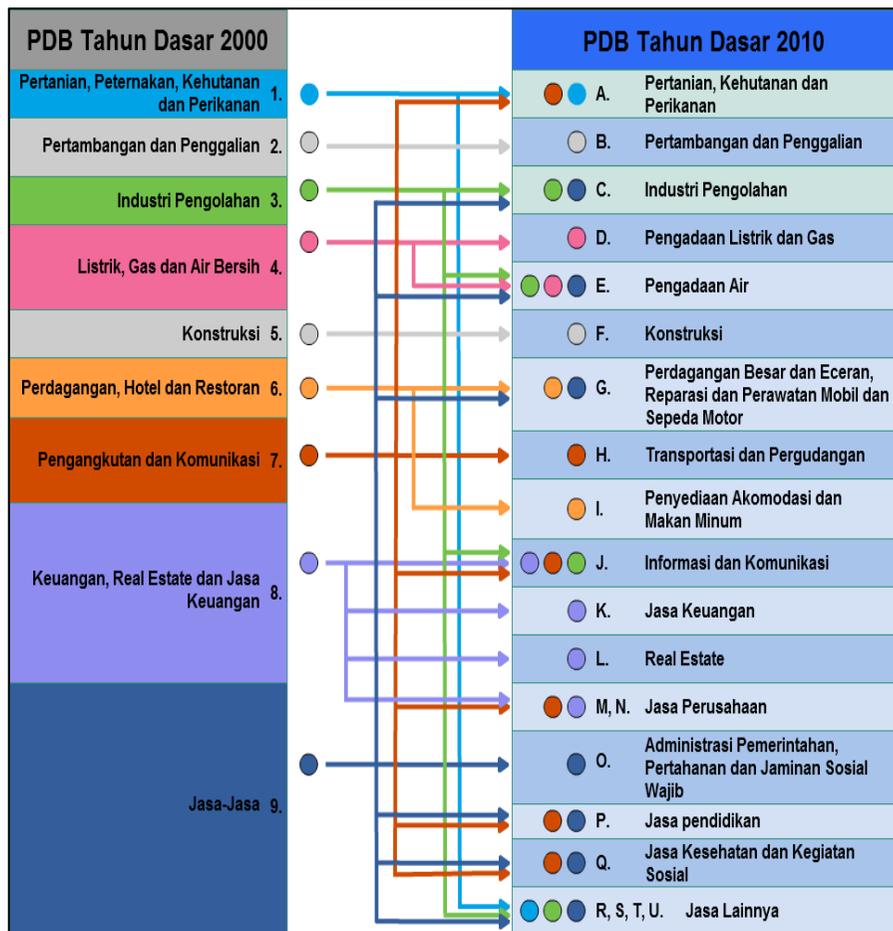
Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA2008 antara lain dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 11.1. Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB

Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
1. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan
2. Metode penghitungan output bank komersial.	Menggunakan metode Imputed Bank Services Charge (IBSC) .	Menggunakan metode Financial Intermediary Services Indirectly Measured (FISIM)
3. Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010

Klasifikasi PDRB menurut Kategori tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Kategori Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut :



Gambar 11.1. Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Kategori Tahun Dasar 2000 dan 2010

11.1. Nilai Nominal PDRB

PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah/region. Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu besarnya PDRB yang mampu dihasilkan sangat tergantung pada faktor tersebut. Adanya keterbatasan tersebut menyebabkan PDRB bervariasi antar daerah. Dari sini dapat dilihat besaran nilai tambah dari masing-masing sektor ekonomi. Selain itu dapat dilihat sektor-sektor yang berperan dalam pembentukan perekonomian daerah.

11.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adhb

Selama tiga tahun terakhir, PDRB Kabupaten Wonosobo terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan gambaran tentang kinerja ekonomi makro di Kabupaten Wonosobo dari waktu ke waktu yang terus membaik.

Tabel 11.2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2012 – 2016

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.740.261,65	3.910.220,64	4.293.200,78	4.647.009,96	5.096.546,74
B	Pertambangan dan Pengalihan	102.249,34	109.515,99	115.297,90	122.036,34	128.377,17
C	Industri Pengolahan	1.838.247,34	1.980.079,05	2.219.188,74	2.412.228,17	2.540.702,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.853,35	3.920,18	4.341,99	4.478,30	4.927,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.043,10	13.445,87	14.291,35	15.108,54	15.768,45
F	Konstruksi	654.249,95	712.641,03	800.192,94	892.610,33	972.750,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.873.949,50	2.032.311,93	2.194.016,42	2.348.430,61	2.551.521,52
H	Transportasi dan Pergudangan	508.514,07	559.875,59	647.921,66	718.909,40	781.547,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	333.365,69	369.503,98	416.587,31	464.952,78	486.661,29
J	Informasi dan Komunikasi	118.629,61	126.730,34	136.464,71	148.223,89	159.196,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	314.367,91	341.453,56	380.820,78	437.129,46	493.006,02
L	Real Estate	159.396,09	171.014,81	191.572,37	212.050,21	229.210,55
M,N	Jasa Perusahaan	21.841,96	25.375,63	28.728,34	33.285,02	37.684,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	297.262,84	318.057,91	341.924,39	374.462,20	403.188,54
P	Jasa Pendidikan	589.278,94	700.220,18	778.751,78	842.306,51	932.140,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	125.576,05	143.806,17	169.701,10	191.085,02	212.447,28
R,S,T,U	Jasa lainnya	205.358,81	231.351,36	268.087,92	286.203,12	319.673,86
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		10.899.446,21	11.749.524,22	13.001.090,49	14.150.509,87	15.365.351,61

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

11.1.2 Agregat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (adhk)

Perkembangan PDRB adhk dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan serta perubahan tingkat harganya. Sedangkan untuk dapat mengukur perubahan volume produk atau perkembangan produktifitas secara nyata, faktor pengaruh

perubahan harga perlu dihilangkan yaitu dengan cara menghitung PDRB atas dasar harga konstan.

Penghitungan atas dasar harga konstan ini, hasilnya dapat dipergunakan untuk perencanaan ekonomi, proyeksi dan untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral. Dalam penghitungan atas dasar harga konstan ini, selalu berkaitan dengan harga-harga pada tahun dasar. Sebab harga-harga pada tahun dasar tersebut digunakan untuk menentukan angka indeks dasar yang besarnya sama dengan 100 persen, dan difungsikan sebagai pembanding harga-harga pada tahun-tahun tertentu yang akan diselidiki.

Tabel 11.3. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah), 2012 – 2016

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.406.756,98	3.402.316,96	3.518.265,83	3.644.704,00	3.871.072,48
B	Pertambangan dan Pengalihan	96.128,83	99.758,48	101.921,64	102.185,71	104.298,55
C	Industri Pengolahan	1.621.383,18	1.712.642,25	1.783.409,98	1.869.373,30	1.902.074,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.899,81	4.192,44	4.408,40	4.416,01	4.503,32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.864,91	12.976,81	13.486,69	13.771,79	14.080,68
F	Konstruksi	601.526,28	637.351,19	659.648,10	701.666,34	749.912,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.766.536,68	1.862.820,63	1.958.338,23	2.040.784,91	2.139.763,83
H	Transportasi dan Pergudangan	506.975,20	553.527,57	599.050,35	642.642,54	691.598,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	302.170,53	318.665,14	341.229,63	366.625,62	366.402,46
J	Informasi dan Komunikasi	119.767,99	130.688,79	146.518,33	160.320,36	172.034,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	272.561,66	281.888,47	300.078,58	328.430,92	360.441,74
L	Real Estate	155.184,71	166.108,76	176.900,81	190.235,20	203.199,83
M,N	Jasa Perusahaan	19.838,02	21.988,01	23.982,82	26.343,04	28.877,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	264.073,47	270.266,08	272.826,23	287.162,17	293.298,48
P	Jasa Pendidikan	478.709,92	524.196,65	561.432,81	591.947,11	635.358,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108.512,34	117.809,06	131.542,62	140.855,83	154.555,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	199.014,82	216.559,76	235.127,62	242.405,08	258.453,43
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		9.935.905,32	10.333.757,05	10.828.168,68	11.353.869,94	11.949.926,14

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

11.2. Peranan/Kontribusi Sektor Ekonomi

Peranan atau kontribusi sektor ekonomi menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap

kemampuan produksi dari masing- masing sektor ekonominya. Apabila struktur ekonomi ini disajikan dari waktu ke waktu maka dapat dilihat perubahan struktur perekonomian yang terjadi. Pergeseran struktur ekonomi ini sering dipakai sebagai indikator untuk menunjukkan adanya suatu proses pembangunan. Misalnya adanya penurunan peran sektor pertanian diikuti dengan kenaikan sektor industri.

Peranan masing-masing sektor/kategori terhadap total PDRB dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Pada tahun 2016, peranan sektor pertanian masih sangat dominan dengan menduduki peringkat tertinggi yaitu sebesar 33,17 persen, kemudian disusul oleh kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan peran 16,61 persen kemudian disusul Kategori Industri Pengolahan dengan peran 16,54 persen. Sedangkan sektor-sektor yang peranannya sangat kecil.

Sektor pertanian menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk Kabupaten Wonosobo. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi di Kabupaten Wonosobo masih didominasi oleh sektor pertanian. Selama empat tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Wonosobo terus mengalami penurunan. Yaitu dari sebesar 34,32% pada tahun 2012, menurun menjadi 33,281% pada tahun 2013, menurun lagi menjadi 33,02% pada tahun 2014 dan menurun lagi menjadi sebesar 32,84% pada tahun 2015 namun pada tahun 2016 meningkat menjadi 33,17% seiring dengan meningkatnya nilai tambah dari kategori pertanian.

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menempati urutan ke dua dalam kontribusinya terhadap PDRB yaitu sebesar 17,19% dan dari tahun 2012 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013 sektor ini menyumbang 17,30%, ditahun 2014 menyumbang 16,68% terhadap PDRB. Pada tahun 2015 menyumbang 16,60% dan pada tahun 2016 menyumbang 16,61%. Hal ini mengindikasikan penguatan sektor lain lebih kuat dibanding kategori ini.

Sektor industri pengolahan menempati urutan ke tiga dalam kontribusi terhadap PDRB. Meskipun nilainya masih 16,54% di tahun 2016 tetapi dari tahun 2012 ada kecenderungan meningkat. Meningkatnya peran sektor jasa dikarenakan semakin berkembangnya usaha industri kecil dan menengah di masyarakat, seperti industri carica, keripik jamur yang merupakan ikon Kabupaten Wonosobo.

Tabel 11.4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2012-2016

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,32	33,28	33,02	32,84	33,17
B	Pertambangan dan Penggalian	0,94	0,93	0,89	0,86	0,84
C	Industri Pengolahan	16,87	16,85	17,07	17,05	16,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10
F	Konstruksi	6,00	6,07	6,15	6,31	6,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,19	17,30	16,88	16,60	16,61
H	Transportasi dan Pergudangan	4,67	4,77	4,98	5,08	5,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,06	3,14	3,20	3,29	3,17
J	Informasi dan Komunikasi	1,09	1,08	1,05	1,05	1,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,88	2,91	2,93	3,09	3,21
L	Real Estate	1,46	1,46	1,47	1,50	1,49
M,N	Jasa Perusahaan	0,20	0,22	0,22	0,24	0,25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,73	2,71	2,63	2,65	2,62
P	Jasa Pendidikan	5,41	5,96	5,99	5,95	6,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,15	1,22	1,31	1,35	1,38
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,88	1,97	2,06	2,02	2,08
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

11.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan sebaliknya. Untuk melihat fluktuasi perekonomian tersebut secara riil, maka perlu disajikan PDRB atas dasar harga konstan secara berkala.

Untuk menghitung laju pertumbuhan (*rate of growth*) PDRB dalam suatu periode (n tahun) dapat dipakai formula:

$$g = \left(\left(\frac{Y_t}{Y_{t-1}} \times 100\% \right) - 100\% \right)$$

dimana : g = laju pertumbuhan

Y_t = PDRB tahun ke - t

Y_{t-1} = PDRB tahun sebelumnya

n = jumlah tahun dalam satu periode

Dari tabel 12.3. dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo pada tahun 2012 sebesar 4,70 persen, di tahun 2013 sebesar 4,0 persen, di tahun 2014 sebesar 4,78 persen dan pada

tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 4,85 persen dan ditahun 2016 mengalami pertumbuhan 5,25 persen.

Tabel 11.5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Konstan (persen), 2012 – 2016

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,18	-0,13	3,41	3,59	6,21
B	Pertambangan dan Penggalian	2,99	3,78	2,17	0,26	2,07
C	Industri Pengolahan	5,45	5,63	4,13	4,82	1,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,87	7,50	5,15	0,17	1,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,74	0,87	3,93	2,11	2,24
F	Konstruksi	7,08	5,96	3,50	6,37	6,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,93	5,45	5,13	4,21	4,85
H	Transportasi dan Pergudangan	7,25	9,18	8,22	7,28	7,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,86	5,46	7,08	7,44	-0,06
J	Informasi dan Komunikasi	10,84	9,12	12,11	9,42	7,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,62	3,42	6,45	9,45	9,75
L	Real Estate	5,28	7,04	6,50	7,54	6,82
M,N	Jasa Perusahaan	5,91	10,84	9,07	9,84	9,62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,72	2,35	0,95	5,25	2,14
P	Jasa Pendidikan	15,44	9,50	7,10	5,44	7,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,63	8,57	11,66	7,08	9,73
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,37	8,82	8,57	3,10	6,62
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,70	4,00	4,78	4,85	5,25

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

11.4. Tingkat Perubahan Harga (Inflasi/Deflasi)

Inflasi/deflasi merupakan gambaran tentang terjadinya perubahan harga. Fluktuasi harga yang terjadi akan mempengaruhi daya beli konsumen, karena berakibat terhadap ketidakseimbangan dengan pendapatan. Indeks harga ini dapat diturunkan juga dari

perhitungan PDRB yang disebut sebagai "PDRB *deflator*" atau yang dikenal dengan indeks implisit. Indeks ini merupakan perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.

Berbeda dengan Indeks Harga Konsumen (IHK), indeks implisit menggambarkan perubahan harga di tingkat produsen dan harga yang dicakup dalam indeks ini relatif lebih lengkap. Indeks implisit PDRB menggambarkan perkembangan perubahan harga. Untuk kepentingan analisa, indeks implisit lebih sesuai jika disajikan dalam bentuk indeks perkembangan karena menggambarkan perkembangan harga dari waktu ke waktu.

Secara sederhana indeks implisit ini dapat dihitung dengan formula:

$$I_t = \frac{X_{it}}{Y_{it}} \times 100\%$$

dimana : I_t = Indeks Implisit

X_{it} = PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun ke - t

Y_{it} = PDRB atas dasar harga konstan pada tahun ke - t

Perubahan harga produsen barang dan jasa diperoleh berdasarkan pertumbuhan indeks implisit yang dapat dihitung dengan formula:

$$\Delta I_t = \left(\frac{I_t}{I_{t-1}} \times 100\% \right) - 100\%$$

dimana :

Δ = Perubahan harga produsen tahun ke - t terhadap tahun sebelumnya

I_{t-1} = Indeks implisit tahun sebelumnya

Tabel 11.6. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo (persen), 2012– 2016

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	109,79	114,93	122,03	127,50	131,66
B	Pertambangan dan Penggalian	106,37	109,78	113,12	119,43	123,09
C	Industri Pengolahan	113,38	115,62	124,44	129,04	133,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	98,81	93,51	98,49	101,41	109,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	101,39	103,61	105,97	109,71	111,99
F	Konstruksi	108,76	111,81	121,31	127,21	129,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	106,08	109,10	112,03	115,07	119,24
H	Transportasi dan Pergudangan	100,30	101,15	108,16	111,87	113,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	110,32	115,95	122,08	126,82	132,82
J	Informasi dan Komunikasi	99,05	96,97	93,14	92,45	92,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	115,34	121,13	126,91	133,10	136,78
L	Real Estate	102,71	102,95	108,29	111,47	112,80
M,N	Jasa Perusahaan	110,10	115,41	119,79	126,35	130,50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	112,57	117,68	125,33	130,40	137,47
P	Jasa Pendidikan	123,10	133,58	138,71	142,29	146,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	115,73	122,07	129,01	135,66	137,46
R,S,T,U	Jasa lainnya	103,19	106,83	114,02	118,07	123,69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		109,70	113,70	120,07	124,63	128,58

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Gambaran perekonomian Kabupaten Wonosobo dengan inflasi yang dapat dikendalikan memberikan informasi adanya gerak laju pertumbuhan yang positif. Kondisi tersebut akan dapat bertahan apabila tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, konflik antar daerah tidak

mencuat, investasi mulai berjalan, juga pengaruh iklim dan cuaca yang mendukung produksi pertanian sebagai sektor andalan Kabupaten Wonosobo.

Tabel 11.7. Inflasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo (persen), 2012– 2016

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,35	4,68	6,18	4,49	3,26
B	Pertambangan dan Penggalian	0,27	3,21	3,05	5,57	3,06
C	Industri Pengolahan	4,19	1,98	7,63	3,70	3,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,10	-5,37	5,33	2,96	7,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,61	2,20	2,27	3,53	2,08
F	Konstruksi	3,67	2,80	8,49	4,87	1,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,69	2,85	2,69	2,71	3,62
H	Transportasi dan Pergudangan	0,18	0,84	6,93	3,43	1,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,07	5,10	5,29	3,88	4,73
J	Informasi dan Komunikasi	-2,26	-2,10	-3,95	-0,73	0,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,81	5,02	4,77	4,88	2,77
L	Real Estate	0,92	0,23	5,19	2,93	1,20
M,N	Jasa Perusahaan	3,17	4,82	3,80	5,48	3,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,61	4,54	6,50	4,05	5,42
P	Jasa Pendidikan	9,11	8,52	3,84	2,59	3,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,85	5,48	5,69	5,16	1,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,06	3,53	6,73	3,55	4,76
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		3,63	3,65	5,60	3,80	3,17

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Dibandingkan dengan tahun 2010 sebagai tahun dasar, diperoleh indeks implisit pada tahun 2012 sebesar 109,70 meningkat di tahun 2013 sebesar 113,70 , meningkat menjadi 130,50 persen pada tahun 2014 dan pada tahun 2016 mencapai 128,58. Sedangkan angka inflasi PDRB tahun 2012 mencapai 3,63%, tahun 2013 mencapai 3,65

%, tahun 2014 mencapai 5,60 %, tahun 2015 3,80 % dan tahun 2016 mencapai 3,17 %.

Laju inflasi dalam lima tahun terakhir berfluktuasi, meskipun peningkatan dan penurunan ini masih dalam batas wajar. inflasi yang diharapkan adalah tidak terlalu rendah dan tidak pula terlalu tinggi yang menunjukkan ada pergerakan ekonomi.

11.5. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Data tersebut diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (karena penyebarannya dianggap lebih merata). Indikator tersebut biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Apabila data tersebut disajikan secara berkala akan menunjukkan adanya perubahan kemakmuran.

Tabel 11.8. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah), 2012 –2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PDRB Harga Berlaku (juta Rupiah)	10.899.446,21	11.749.524,22	13.001.090,49	14.150.509,87	15.365.351,61
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	765.113,00	765.113,00	765.113,00	765.113,00	765.113,00
3	PDRB Perkapita (Ribu Rupiah/Jiwa/Tahun)	14.245,54	15.356,59	16.992,38	18.494,67	20.082,46

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Wonosobo tahun 2013 sebesar 15,356 juta mengalami peningkatan

sebesar 7,80% dibandingkan tahun 2012. Demikian pula untuk tahun 2014 sebesar 16,99 juta meningkat sebesar 10,65% dibandingkan tahun 2013. Untuk tahun 2015 meningkat 8,84 % dibanding tahun sebelumnya, dan pada tahun 2016 meningkat 8,59% dengan nominal 20,082 Juta/jiwa/tahun. Peningkatan PDRB per kapita ini menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat secara umum Kabupaten Wonosobo dari tahun ke tahun yang berarti rata-rata kesejahteraan penduduk Kabupaten Wonosobo meningkat dari tahun ke tahun.

Bab 12

Inflasi

INFLASI

12.1. Pengantar

Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index* (CPI). Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, *shocks* terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energi lainnya (*administered prices*).

Penentuan jumlah, jenis, dan kualitas dalam paket komoditi barang dan jasa serta bobot timbangannya dalam IHK didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH). SBH yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 di 82 daerah perkotaan yang mencakup 33 ibukota provinsi dan 49 kota besar lainnya. Periode waktu tertentu (telah ditentukan) yang dipakai sebagai dasar pembandingan disebut periode dasar atau tahun dasar. IHK pada tahun dasar bernilai sama dengan 100 ($IHK_0=100$). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara

bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.

Berikut adalah kegunaan dari data IHK dan laju inflasi antara lain:

1. Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*wage-indexation*)
2. Penyesuaian Nilai Kontrak
3. Eskalasi Nilai Proyek (*Project Escalation*)
4. Penentuan Target Inflasi (*Inflation targeting*)
5. Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*Budget indexation*)
6. Sebagai pembagi PDB, PDRB (*GDP Deflator*).
7. Sebagai proksi perubahan biaya hidup (*proxy of cost of living*)
8. Indikator dini tingkat bunga, valas, dan indeks harga saham.

12.2. Pemilihan Komoditi

Pada prinsipnya, semua komoditas barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat masuk dalam paket komoditas yang baru. Mengingat begitu banyak jenis dan ragamnya, maka dilakukan pemilihan komoditas-komoditas yang masuk dalam paket komoditas, dengan beberapa pertimbangan berikut:

- a. Kepentingan relatif dari setiap komoditas terhadap total pengeluaran rumah tangga dari rumah tangga sampel.
- b. Keterwakilan (*representativeness*) dari komoditas sebagai suatu indikator harga untuk komoditas sejenis dalam kategori yang sama.

- c. Kemampuan harga (*price ability*) yaitu satuan kuantitas, spesifikasi dan jenis dapat dirinci dengan jelas.
- d. Kelangsungan (*continuity*) harga dapat dipantau terus menerus.

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose* – COICOP) yang diadaptasi oleh BPS untuk kasus Indonesia menjadi Klasifikasi Baku Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga), yaitu:

- Kelompok Bahan Makanan
- Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau
- Kelompok Perumahan
- Kelompok Sandang
- Kelompok Kesehatan
- Kelompok Pendidikan dan Olah Raga
- Kelompok Transportasi dan Komunikasi.

12.3. Formulasi Penghitungan IHK dan Inflasi

12.3.1. Formula Penghitungan IHK

Karena IHK mengukur perubahan harga secara periodik dengan paket komoditas yang tetap, maka penghitungannya menggunakan rumus Modifikasi Laspeyers (*Modified Laspeyers*) dengan tahun dasar tertimbang. Rata-rata untuk periode 12 bulan mencakup Januari sampai dengan Desember 2012 diambil sebagai tahun dasar.

Pada *higher level index*, IHK dihitung dengan menggunakan formula Indeks Modified Laspeyres.

$$I_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^k P_{0i} Q_{oi}} \times 100$$

dimana:

I_n = Indeks periode ke-n

P_{ni} = Harga jenis barang i, periode ke-n

$P_{(n-1)i}$ = Harga jenis barang i, periode ke-(n-1)

$P_{0i}Q_{oi}$ = Nilai konsumsi jenis barang i, pada periode tahun dasar

$P_{(n-1)i}Q_{oi}$ = Nilai konsumsi jenis barang i, period ke-(n-1)

k =Jumlah jenis barang dalam paket komoditas

12.3.2. Formula Penghitungan Inflasi/Deflasi

Metode penghitungan laju inflasi yang dipergunakan adalah metode “*point to point*”, yaitu dengan membandingkan IHK dari periode sebelumnya. Laju inflasi bulanan dihitung dengan metode “*month to month (mom)*” yaitu dengan membandingkan IHK dari periode sebelumnya. Laju inflasi setahun dihitung dengan metode “*year on year (yoy)*” yaitu dengan menghitung IHK Desember tahun berjalan dengan membandingkan IHK Desember tahun sebelumnya.

✓ **Rumus Umum:**

$$\text{laju Inflasi periode } n = \frac{\text{IHK periode } n - \text{IHK periode } n - 1}{\text{IHK periode } n - 1}$$

n adalah bulan/tahun tertentu.

✓ **Inflasi Bulanan**

$$\text{Inflasi}_n = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}_{(n-1)}}{\text{IHK}_{(n-1)}} \times 100$$

Dimana:

IHK_n = Indeks bulan ke-n

IHK_(n-1) = Indeks bulan ke (n-1)

✓ **Laju inflasi Tahun kalender**

$$\text{I (Kalender)}_i = \frac{\text{IHK}_{iy} - \text{IHK}_{\text{Des}(y-1)}}{\text{IHK}_{\text{Des}(y-1)}} \times 100$$

Dimana:

IHK_{iy} = IHK bulan i pada tahun y

IHK_{Des(y-1)} = IHK Des pada tahun (y-1)

✓ **Laju Inflasi Year on Year**

$$\text{I (YoY)}_i = \frac{\text{IHK}_{iy} - \text{IHK}_{i(y-1)}}{\text{IHK}_{i(y-1)}} \times 100$$

Dimana:

IHK_{iy} = IHK bulan i pada tahun y

IHK_{i(y-1)} = IHK bulan i pada tahun (y-1)

12.3.3. Penghitungan Andil (*share*) Inflasi/Deflasi

Besarnya nilai perubahan indeks (inflasi/deflasi) yang terjadi setiap bulan, sesungguhnya merupakan gabungan sumbangan atau

andil dari jenis barang dan jasa yang mengalami fluktuasi harga pada bulan yang bersangkutan. Oleh karena itu setiap komoditi yang mengalami fluktuasi harga tersebut dapat diketahui besarnya sumbangan/andil terhadap inflasi atau deflasi yang terjadi di suatu kota atau secara nasional.

Rumus umum untuk menghitung besarnya andil inflasi adalah:

$$A_{ni} = \frac{[\%NK]_{(n-1)} \times \Delta RH_{ni}}{100}$$

Dimana:

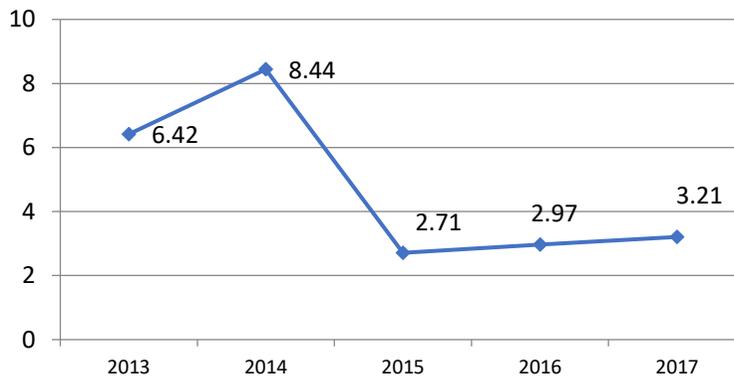
A_{ni} = Andil inflasi barang i bulan -n

$[\%NK]_{(n-1)}$ = Persentase barang i terhadap total pada bulan (n-1)

ΔRH_{ni} = perubahan harga barang i pada bulan n

12.4. Perkembangan IHK dan Inflasi Nasional

Selama (Januari-Desember) tahun 2017 telah terjadi inflasi sebesar 3,21 persen. Angka inflasi pada tahun 2017 ini lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun 2016 yaitu sebesar 2,97 persen. Adapun perkembangan inflasi selama kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada gambar 14.1.



Sumber: BPS

Gambar 12.1. Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo, 2013-2017 (persen)

Dalam kurun waktu 12 bulan selama tahun 2017, sembilan bulan mengalami inflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 1,11 persen dan inflasi terendah terjadi pada bulan April sebesar 0,02 persen. Deflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 0,42 persen, sedangkan deflasi terendah terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 0,02 persen.

Pada tahun 2017 inflasi Wonosobo sebesar 3,21 persen lebih rendah dibanding inflasi Jawa Tengah yaitu sebesar 3,71 persen. Beberapa kelompok pengeluaran Wonosobo yang lebih tinggi dari kelompok pengeluaran Jawa Tengah adalah kelompok pengeluaran bahan makanan serta kelompok pengeluaran sandang. Sedangkan kelompok pengeluaran lainnya lebih rendah dari inflasi Jawa Tengah.

Tabel 12.1. Inflasi Wonosobo dan Jawa Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran 2017 (persen)

Kelompok Pengeluaran	Inflasi (%)	
	Wonosobo	Jateng
Umum	3,21	3,71
Bahan Makanan	4,12	0,39
Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	-0,46	2,67
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	4,38	5,88
Sandang	11,33	2,15
Kesehatan	0,00	3,76
Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	0,04	4,06
Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	5,82	6,27

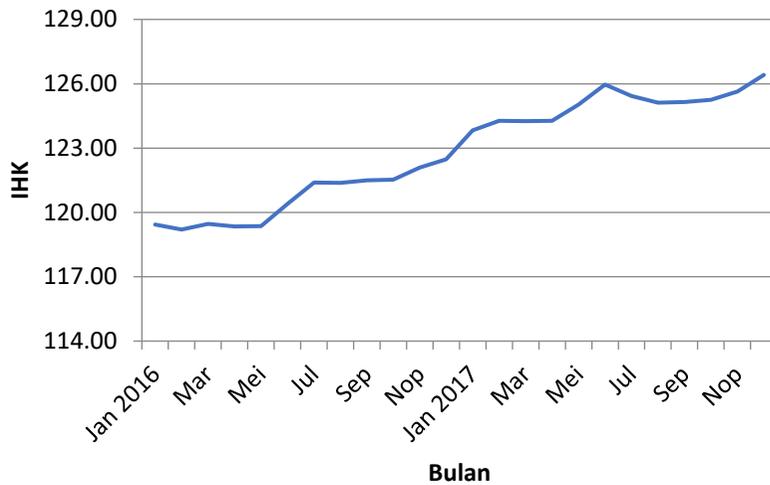
Selama tahun 2017 kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 4,12 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami deflasi sebesar 0,46 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar mengalami inflasi sebesar 4,38 persen; kelompok sandang mengalami inflasi sebesar 11,33 persen, kelompok kesehatan cenderung stabil; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami inflasi sebesar 0,04 persen; dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 5,82 persen.

Tabel 12.2. Inflasi Bulanan Kabupaten Wonosobo, 2016-2017

Indikator Statistik Makro Pembangunan

No	Bulan	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Januari	0,41	1,11
2.	Februari	-0,19	0,36
3.	Maret	0,22	-0,02
4.	April	-0,10	0,02
5.	Mei	0,02	0,61
6.	Juni	0,87	0,75
7.	Juli	0,82	-0,42
8.	Agustus	-0,01	-0,25
9.	September	0,10	0,03
10.	Oktober	0,02	0,08
11.	November	0,46	0,31
12.	Desember	0,32	0,62

Sumber : BPS



Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo

Gambar 12.2. IHK Bulanan Kabupaten Wonosobo, 2016–2017

Komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi di Kota Wonosobo selama 2017 adalah ketimun, kangkung, garam, biaya STNK, dan cabe rawit. Komoditas yang dominan memberikan sumbangan deflasi di Kota Wonosobo selama 2017 adalah cabe hijau, bawang merah, bawang putih, roti tawar dan tomat sayur.

Bab 13

PDRB Kabupaten Wonosobo Menurut Pengeluaran

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN WONOSOBO MENURUT PENGELUARAN

13.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/*region* tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

1. Pendekatan Produksi,

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial,

17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran,

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep, ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tidak langsung neto.

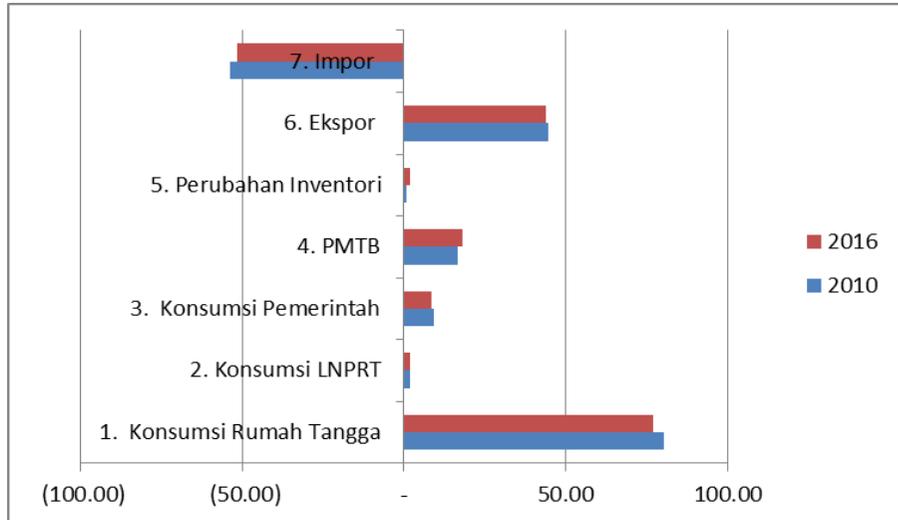
13.2. AGREGAT PDRB KABUPATEN WONOSOBO MENURUT PENGELUARAN

Pada tahun 2016, nilai ekonomi Kabupaten Wonosobo mencapai Rp. 15,37 triliun yang sebagian besar digerakkan oleh konsumsi rumah tangga, PMTB dan ekspor. Sayangnya ekonomi Kabupaten Wonosobo masih tergerus dengan tingginya impor yang besarnya sampai dengan tahun 2016 masih di atas ekspor Kabupaten Wonosobo. Bersyukur sebagian impor merupakan barang modal dan bahan baku sehingga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan value added.

Tabel 13.1. Trade Balance dan Rasio Perdagangan Luar Kabupaten Wonosobo

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
<i>Trade balance</i>	0.83	0.80	0.75	0.77	0.80	0.81	0.85

Dalam perkembangannya, *trade balance* Kabupaten Wonosobo semakin baik, yang berarti bahwa besaran ekspor semakin tinggi dan mendekati besaran impor. Meskipun secara struktur ekonomi peranan konsumsi rumah tangga masih yang terbesar, akan tetapi dalam lima tahun terakhir dominasinya semakin mengecil. Peranan ini diambil alih oleh ekspor dan PMTB yang semakin meningkat. Peningkatan peranan ekspor memberi gambaran bahwa pasar ekonomi Kabupaten Wonosobo semakin luas, tidak sekedar lokal Kabupaten Wonosobo. Peningkatan pasar ini ditopang oleh investasi (PMTB) sebagai komponen penting bagi peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa.

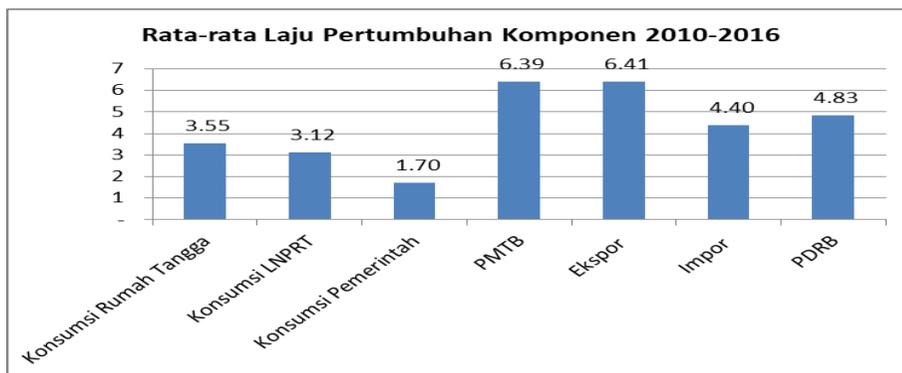


Gambar 13.1. Perubahan Struktur Komponen PDRB Pengeluaran Tahun 2010 ke 2016

Peningkatan peranan ekspor maupun PMTB dalam perekonomian Kabupaten Wonosobo tidak terlepas dari kinerja kedua komponen tersebut yang tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo. Dalam enam tahun terakhir, ekspor tumbuh 6,41persen per tahun sedangkan PMTB 6,39 persen per tahun. Sebaliknya konsumsi rumah tangga tumbuh relatif stabil dikisaran 3 – 4 persen dengan rata-rata pertumbuhan di bawah pertumbuhan Kabupaten Wonosobo. Dampaknya peranan konsumsi rumah tangga mengalami penurunan karena pertumbuhan yang demikian itu.

Meskipun pertumbuhan konsumsi rumah tangga di bawah pertumbuhan ekonomi total, akan tetapi komponen ini masih menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar terhadap ekonomi Kabupaten Wonosobo selama ini. Pada tahun 2016 komponen ini memberikan andil sebesar 4,94 persen terhadap total pertumbuhan yang terjadi pada tahun tersebut. Tahun-tahun sebelumnya andil komponen ini tidak kurang dari 4 persen terhadap total pertumbuhan.

Sementara itu komponen PMTB memberikan andil 0,88 persen pada tahun 2016. Andil komponen ini merupakan yang terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga dan besaran andilnya tidak mengalami perubahan yang mencolok dan berada di bawah 1 persen.



Gambar 13.2. Rata-rata Laju Pertumbuhan Komponen PDRB Pengeluaran Tahun 2010 ke 2016

13.3. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh institusi lain.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama.

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB Kabupaten Wonosobo menurut pengeluaran. Konsumsi ini dipenuhi dari produk lokal dan produk impor, baik impor dari luar negeri maupun provinsi lain. Dalam kurun waktu 2010 – 2016 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan yang didorong oleh penambahan jumlah penduduk maupun pendapatan yang semakin membaik.

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB selama periode tahun 2010 s.d 2016 cenderung menurun. Tahun 2010 proporsinya merupakan yang paling tinggi yaitu 80,56 persen, sementara tahun 2016 dengan porsi 77,00 persen dan merupakan porsi terendah selama periode tersebut. Penurunan proporsi ini dikarenakan kinerja konsumsi rumah tangga yang tumbuh rata-rata di bawah kinerja ekonomi Kabupaten Wonosobo (Tabel 3.2).

Tabel 13.2. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2010-2016

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7	8
ADHB (juta)	7 255 271.91	7 954 197.75	8 609 604.29	9 238 362.92	10 149 881.06	11 043 239.63	11 831 975.25
ADHK (juta)	7 255 271.91	7 487 420.05	7 749 862.93	8 018 005.35	8 290 336.88	8 594 741.30	8 946 607.85
Distribusi (ADHB) %	80.56	79.18	78.99	78.63	78.07	78.04	77.00
Pertumbuhan (ADHK) %		3.20	3.51	3.46	3.40	3.67	4.09

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan sebesar 3,20 persen pada tahun 2011. Kemudian, berturut-turut sebesar 3,51 persen (2012), 3,46 persen (2013), 3,40 persen (2014), selanjutnya meningkat sebesar 3,67 persen (2015) dan 4,09 persen (2016).

13.4. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya di bawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud di sini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 (tujuh) jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, yaitu hanya sekitar 1 persen. Peranan institusi ini dalam perekonomian masih perlu mendapat perhatian sehingga ke depannya akan semakin meningkat. Beberapa lembaga yang memberikan andil cukup besar untuk PKLNPRRT adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, dan lembaga keagamaan.

**Tabel 13.3. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT
Tahun 2010-2016**

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7	8
ADHB (juta)	160 494.20	170 439.16	188 079.94	219 393.32	254 923.67	272 058.58	274 625.48
ADHK (juta)	160 494.20	162 511.70	168 901.19	182 534.53	196 181.44	199 437.16	192 134.37
Distribusi (ADHB) %	1.78	1.70	1.73	1.87	1.96	1.92	1.79
Pertumbuhan (ADHK) %	-	1.26	3.93	8.07	7.48	1.66	(3.66)

Berdasarkan tabel 3.3, Konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumahtangga (LNPRT) pada tahun 2013 tumbuh pesat sebesar 8,07 persen, hal ini dikarenakan adanya persiapan pilpres secara langsung ditahun 2014. Konsumsi partai politik ditahun ini begitu besar dan terus berlanjut pada tahun 2014. Pada tahun 2016 terjadi perlambatan hingga minus 3,66 yang tentu saja merupakan titik balik hingar bingarnya pilpres yang dilanjutkan pilkada baik pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati di Kabupaten Wonosobo.

13.5. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari

Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan untuk adh Berlaku tapi terjadi penurunan untuk adh Konstan 2010. Pada tahun 2010 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 817 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2016 nilainya mencapai 1,322 triliun rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan mulai tahun 2012-2015 tapi menurun di tahun 2016. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi penurunan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas di tahun 2016 (Tabel 3.4).

Tabel 13.4. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2010-2016

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7	8
ADHB (juta)	817 019.04	933 619.95	1 034 325.98	1 126 890.64	1 194 229.93	1 277 880.43	1 322 230.47
ADHK (juta)	817 019.04	856 068.56	882 984.67	908 416.10	910 291.95	916 621.13	902 671.34
Distribusi (ADHB) %	9.07	9.29	9.49	9.59	9.19	9.03	8.61
Pertumbuhan (ADHK) %	-	9.06	7.41	5.90	5.76	6.27	5.07

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami fluktuasi, dari 9,07 persen di tahun 2010 hingga 8,61 persen pada tahun 2016. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2016; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2013 yang mencapai 9,59 persen.

Pertumbuhan konsumsi akhir pemerintah secara riil berfluktuasi. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Dalam kurun waktu 2010-2016, pertumbuhan konsumsi pemerintah tertinggi terjadi

pada tahun 2011, sebesar 9,06 persen, dan terendah terjadi pada tahun 2016 mengalami perlambatan sebesar 5,07 persen.

13.6. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed*

Capital) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi; reklamasi pantai; pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan; serta pencegahan banjir dan erosi).

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun lembaga non profit), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Tabel 3.5 di bawah menjelaskan bahwa pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2014 – 2016 melambat dari 8,27 persen (2013) menjadi 1,25 persen (2016).

**Tabel 13.5. Perkembangan dan Struktur PMTB
Tahun 2010—2016**

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7	8
ADHB (juta)	1 505 541.67	1 674 253.46	1 934 923.52	2 130 881.21	2 377 110.87	2 618 544.57	2 805 812.97
ADHK (juta)	1 505 541.67	1 605 564.33	1 790 881.31	1 885 644.09	1 942 813.56	2 059 121.27	2 179 204.67
Distribusi (ADHB) %	16.72	16.67	17.75	18.14	18.28	18.50	18.26
Pertumbuhan (ADHK) %	-	4.28	3.61	4.59	8.27	3.93	1.25

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

13.7. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsi, dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 proporsinya sebesar 0,87 persen, terendah dalam kurun waktu 2012-2016. Adapun yang tertinggi sebesar 7,10 persen terjadi pada tahun 2012 (Tabel 3.6).

**Tabel 13.6. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Tahun 2010—2016**

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7	8
ADHB (juta)	81 845.73	455 548.19	690 014.42	594 078.60	420 833.46	388 539.29	286 910.14
ADHK (juta)	81 845.73	490 933.51	457 584.43	313 478.66	323 413.41	156 087.55	154 940.27
Distribusi (ADHB) %	0.91	4.54	6.33	5.06	3.24	2.75	1.87

13.8. PERKEMBANGAN EKSPOR - IMPOR BARANG DAN JASA

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang

dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari Kabupaten tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari Kabupaten tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

Komoditas utama ekspor Kabupaten Wonosobo ke luar negeri adalah produk-produk pertanian dan hasil olahannya serta hasil industri. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekspor sebesar 3,52 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 1,10 persen. Kondisi ini dipicu dengan meningkatnya hasil pertanian, meskipun untuk industry cenderung melambat.

Tabel 13.7. Perkembangan dan Struktur Export Barang dan Jasa Tahun 2010—2016

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7	8
ADHB (juta)	4 032 350.75	4 442 346.49	4 690 758.61	5 168 635.74	5 710 035.34	6 152 484.38	6 766 244.96
ADHK (juta)	4 032 350.75	4 037 267.37	4 490 130.65	4 868 081.13	5 155 698.63	5 494 799.51	5 837 451.05
Distribusi (ADHB) %	44.77	44.22	43.04	43.99	43.92	43.48	44.04
Pertumbuhan (ADHK) %	-	10.03	(5.06)	1.63	4.31	1.10	3.52

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Tabel 3.8 di bawah menunjukkan bahwa Nilai import Kabupaten Wonosobo adh Berlaku terus meningkat dari tahun 2010 dengan nilai 4,85 trilyun hingga 2016 dengan nilai 7,92 trilyun rupiah.

Tabel 13.8. Perkembangan dan Struktur Import Barang dan Jasa Luar Daerah Tahun 2010– 2016

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7	8
ADHB (juta)	4 846 597.76	5 585 297.12	6 248 260.56	6 728 718.21	7 105 923.84	7 602 237.00	7 922 447.65
ADHK (juta)	4 846 597.76	5 150 215.09	5 604 439.87	5 842 402.82	5 990 567.18	6 066 937.98	6 263 083.43
Distribusi (ADHB) %	53.82	55.60	57.33	57.27	54.66	53.72	51.56
Pertumbuhan (ADHK) %	-	8.45	2.80	3.30	2.99	5.64	0.95

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Kabupaten Wonosobo dengan topografi yang bergunung menjadikan hasil hasil pertanian sebagai komoditas utama sehingga untuk menukupi kebutuhan barang dan jasa untuk konsumsi masih mengandalkan import dari luar daerah. Dari komoditas yang berupa bahan bakar, pakaian dan berbagai kebutuhan lain masih didatangkan dari luar daerah. Tahun 2016 pertumbuhan import melambat yang cukup signifikan, dari 5,64 ditahun 2015 menjadi 0,95 ditahun 2016.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda positif berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar daripada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Tabel 13.9. Net Ekspor Antar Daerah Tahun 2010 - 2016

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7	8
ADHB (juta)	(814 247.01)	(1 142 950.63)	(1 557 501.95)	(1 560 082.47)	(1 395 888.49)	(1 449 752.62)	(1 156 202.69)
ADHK (juta)	(814 247.01)	(1 112 947.72)	(1 114 309.22)	(974 321.68)	(834 868.55)	(572 138.47)	(425 632.37)
Pertumbuhan (ADHK) %	-	(36.68)	(0.12)	12.56	14.31	31.47	25.61

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Nilai net ekspor antar daerah dalam kurun waktu 2010-2016 selalu bernilai negatif, baik adh Berlaku maupun adh Konstan. Hal ini menunjukkan nilai import antar daerah lebih besar dari nilai exportnya, atau dengan perkataan lain

perdagangan antar daerah Kabupaten Wonosobo dengan kabupaten-kabupaten lain selalu mengalami minus. Kondisi ini umum untuk daerah-daerah yang didominasi pertanian. Hampir semua kebutuhan lain baik barang maupun jasa didatangkan dari daerah lain. Barang-barang yang didatangkan dari luar daerah meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, bahan bakar, bahan bangunan dan barang kebutuhan lainnya. Bila dicermati nilai net export di Kabupaten wonosobo walaupun nilainya masih minus namun nilainya terus menurun. Hal ini menunjukkan bahwa nilai import yang tinggi mulai diimbangi dengan exportnya.

Harapan ke depan nilai net export bisa bernilai positif dalam arti barang-barang import yang dilakukan juga diimbangi dengan nilai export yang lebih baesar lagi, sehingga disuatu saat nilai export dari Kabupaten Wonosobo bisa lebih besar dari nilai importnya.

Bab 14

Statistik Akomodasi

STATISTIK AKOMODASI

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Ketika pengelolaan sektor ini dilakukan dengan baik, maka dapat menjadi salah satu jalan masuk devisa negara dengan berkunjungnya wisatawan asing ke dalam negeri. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan pesona wisata yang sangat berpotensi menarik wisatawan untuk berkunjung.

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten yang beriklim dingin dan berada di lereng gunung. Dengan potensi tempat wisata alam dan sejarah yang dimiliki, Kabupaten Wonosobo dapat menarik wisatawan untuk datang, yang pada akhirnya dapat semakin menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo menyajikan beberapa indikator di bidang pariwisata dan perhotelan yang dapat bermanfaat untuk mengetahui gambaran kondisi pariwisata dan hotel di Kabupaten Wonosobo.

14.1. PARIWISATA

Kabupaten Wonosobo adalah kabupaten yang terletak di antara dua gunung yaitu gunung Sindoro dan Sumbing dan terletak di lereng pegunungan. Iklim yang dingin, dengan kekayaan pemandangan alam, wisata alam, dan wisata budaya menjadi daya tarik tersendiri yang dapat menarik pada wisatawan untuk berkunjung. Dataran Tinggi Dieng yang merupakan ikon wisata Kabupaten Wonosobo adalah salah satu tempat wisata budaya alam dan budaya yang setiap tahunnya selalu menarik wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara. Selain itu ada objek wisata alam lain yang menarik

untuk dikunjungi seperti Telaga Menjer, Pemandian Mangli, Gelanggang renang Kalianget, Lembah Dieng, bukit seroja, bolongan sewu dan lain sebagainya.

Berikut adalah banyaknya wisatawan Jawa Tengah, luar Jawa Tengah, dan mancanegara yang berkunjung ke objek wisata Dataran Tinggi Dieng.



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo

Gambar 14.1. Jumlah Pengunjung Objek Wisata Dataran Tinggi Dieng yang Berasal dari Jawa Tengah, Luar Jawa Tengah, dan Mancanegara, 2014 dan 2016

Mayoritas pengunjung Objek Wisata Dieng adalah wisatawan yang berasal dari luar Jawa Tengah dan yang terendah adalah wisatawan mancanegara. Wisatawan yang berasal dari Jawa Tengah dari tahun 2014–2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 wisatawan nusantara meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Wisatawan yang berasal dari luar Jawa Tengah

banyak berkunjung ke Wonosobo karena mereka tertarik dengan wisata alam yang ditawarkan melalui media elektronik. Dari beberapa obyek wisata yang ada di Wonosobo Dieng Plateau Theatre (DPT) paling banyak dikunjungi wisatawan.

14.2. HOTEL

Hotel adalah suatu usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat menginap, makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Hotel harus mempunyai restoran yang berada di bawah manajemen hotel tersebut.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pariwisata, hotel dapat dibedakan menjadi hotel berbintang dan hotel non bintang (melati). Syarat-syarat hotel bintang adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan fisik, meliputi kondisi bangunan dan sebagainya
2. Bentuk pelayanan yang disediakan
3. Klasifikasi tenaga kerja, meliputi pendidikan, kesejahteraan karyawan dan sebagainya
4. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia, seperti tenis, kolam renang, diskotik dan sebagainya.

Losmen adalah suatu usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan dimana setiap orang dapat menginap tanpa makan (tidak ada restoran) dengan pembayaran.

Akomodasi lainnya adalah suatu usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan

dimana setiap orang dapat menginap tanpa makan (tidak ada restoran) tetapi dapat memperoleh fasilitas lainnya dengan pembayaran. Usaha akomodasi yaitu wisma, pondok wisata/remaja, motel, bungalow, rumah pemondokan dan sebagainya.

a. Jumlah Hotel dan Pondok Wisata

Selama lima tahun terakhir, jumlah hotel dan pondok wisata di Kabupaten Wonosobo tidak banyak mengalami perubahan. Dari data yang dikumpulkan oleh BPS Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2016 di Kabupaten Wonosobo terdapat 1 buah hotel bintang IV, 1 buah hotel bintang II, 20 buah hotel nonbintang dan 26 buah pondok wisata.

Tabel 14.1. Jumlah Hotel di Kabupaten Wonosobo, 2013 – 2016

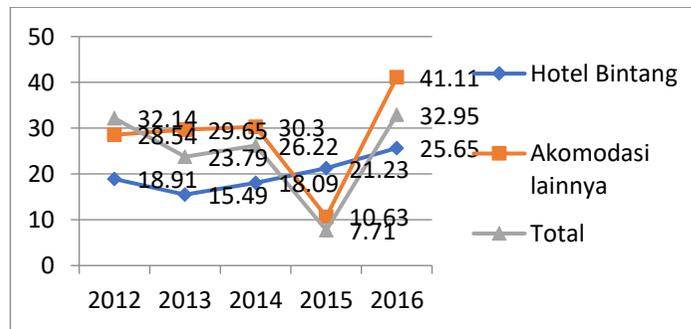
Klasifikasi Hotel	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Bintang V				
Bintang IV	1	1	1	1
Bintang III				
Bintang II	1	1	1	1
Bintang I	1	1		
Non Bintang	17	17	17	20
Pondok Wisata	19	26	26	26
Jumlah	30	45	46	48

14.2.1. Tingkat Penghunian Kamar (TPK)

TPK adalah persentase kamar yang dihuni/dipakai tamu terhadap jumlah kamar yang tersedia. TPK dihitung berdasarkan jumlah kamar yang dihuni/dipakai tamu (*room night occupied*) dibagi dengan banyaknya kamar yang tersedia/dapat dipakai (*room night available*) dikalikan 100%.

$$TPK = \frac{\text{Jumlah kamar yang dihuni tamu (room night occupied)}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia (room night available)}} \times 100\%$$

Dari TPK dapat dilihat berapa persentase kamar hotel yang terpakai dalam suatu kurun waktu tertentu. Semakin tinggi nilai TPK berarti semakin sering/semakin besar persentase kamar digunakan/disewa oleh tamu.



Sumber : BPS

Gambar 14.2. TPK Tahunan Hotel di Kabupaten Wonorejo, 2012 -2016

TPK hotel secara umum mengalami peningkatan dan juga penurunan dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Pada tahun 2012 total rata-rata Tingkat Penghunian Kamar (TPK) 32,41 pada tahun 2012 dan tahun 2013 turun menjadi 23,79 atau 8,35 . Pada tahun

2016 TPK total adalah 32,95 atau mengalami peningkatan sebesar 25,24 persen dibanding tahun sebelumnya yang turun pada angka 7,71.

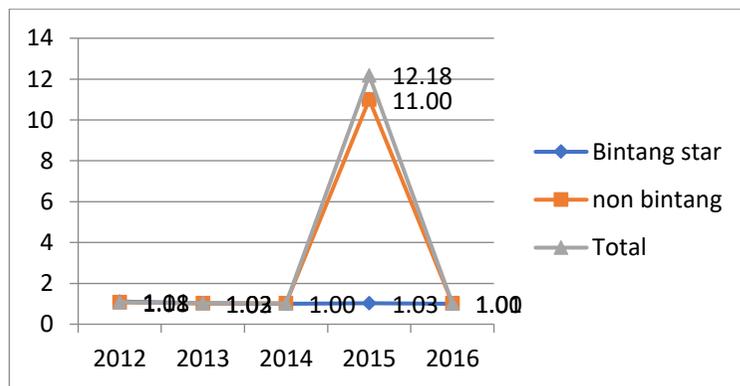
TPK hotel bintang pada tahun 2012 berada pada 18,91 kemudian tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 15,49 dan naik lagi pada tahun 2014 menjadi 18,09 dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan pada angka 25,65 atau mengalami kenaikan menjadi 4,42 dibandingkan di tahun 2015 pada bernilai 21,23.

TPK hotel non bintang, yang mana jumlah sarana akomodasinya lebih banyak daripada hotel bintang selama 2012-2016 mengalamikenaikan, baik di tahun 2012 maupun di tahun 2016. Pada tahun 2012, TPK hotel non bintang adalah 28,54 atau mengalami kenaikan pada tahun 2013 yang bernilai 29,65. Kemudian pada tahun 2014 TPK hotel non bintang mengalami kenaikan lagi menjadi 30,30 sedang pada tahun 2015 mengalami penurunan tajam menjadi 10,63 dan pada tahun 2016 naik kembali menjadi 41,11.

Jika dibanding TPK antara hotel bintang dan non bintang, secara umum TPK hotel non bintang lebih besar dibanding dengan TPK hotel bintang. Hal ini berarti pengguna hotel yang menginap, masih lebih memilih hotel non bintang dibanding dengan hotel bintang. Hal ini dapat dikarenakan tarif hotel non bintang yang lebih murah. Selain itu juga dikarenakan jumlah hotel non bintang yang lebih banyak dibandingkan hotel bintang.

14.2.2. Rata-rata Lama Menginap (RLM)

Rata-rata Lama Menginap dihitung berdasarkan banyaknya malam tempat tidur yang dihuni/dipakai (*bed night used/guest night*) dibagi dengan banyaknya tamu yang datang. Dari Data BPS untuk total rata-rata lama menginap pada tahun 2012 – 2016 tahun 2012 pada 1,08 terus tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 1,02 pada tahun 2014 ada kenaikan signifikan di angka 12,18 namun pada tahun 2016 kembali lagi turun menjadi 1.01



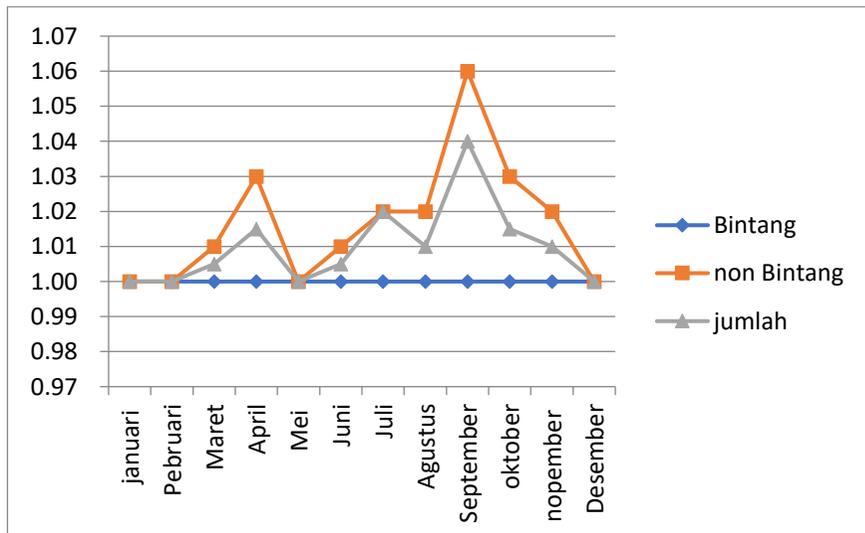
Gambar 14.3 .RLM Tahunan Hotel di Kabupaten Wonosobo,2012-2016

Tahun 2016 rata-rata menginap di hotel berbintang di sekitar angka 1.00 artinya rata-rata menginap kurang lebih satu malam .sedang pada hotel non bintang mengalami kenaikan dan juga penurunan pada setiap bulannya .

Data dari BPS RLM tamu pada akomodasi Hotel menurut bulan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 14.2. RLM Menurut Bulan Tahun 2016

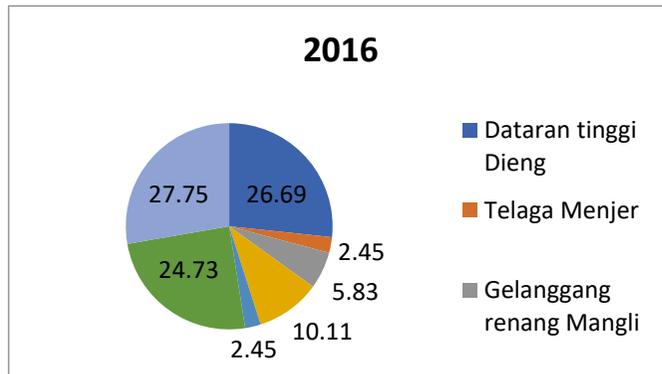
Bulan	Bintang	non Bintang	jumlah
januari	1.00	1.00	1.00
Pebruari	1.00	1.00	1.00
Maret	1.00	1.01	1.01
April	1.00	1.03	1.02
Mei	1.00	1.00	1.00
Juni	1.00	1.01	1.01
Juli	1.00	1.02	1.02
Agustus	1.00	1.02	1.01
September	1.00	1.06	1.04
oktober	1.00	1.03	1.02
nopember	1.00	1.02	1.01
Desember	1.00	1.00	1.00



Gambar 14.4. Rata-rata lama menginap pada akomodasi hotel menurut bulan di Hotel di Kabupaten Wonosobo,2016

14.2.3. Jumlah Pengunjung objek wisata menurut Wisatawan di kabupaten Wonosobo 2016

Jumlah Obyek Wisata Di kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 dan Pengunjung baik dari domestik dan Mancanegara. Jumlah kunjungan wisata terbesar di dataran Tinggi Dieng .



Sumber : BPS

Gambar 14.5. Jumlah kunjungan wisata tahun 2016

Bab 15

Keuangan Daerah

KEUANGAN DAERAH

15.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD terdiri atas:

- Anggaran pendapatan, terdiri atas
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
 - Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
 - Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
- Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Setiap daerah pemerintahan memiliki kewajiban dan kebutuhan akan pembuatan APBD sebagai pedoman/dasar perencanaan,

pengawasan, distribusi, dan stabilitas kegiatan selama satu tahun pemerintahan berjalan. Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu bagian dari pemerintah Indonesia, setiap tahunnya menyusun APBD agar kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Realisasi Kabupaten Wonosobo tahun 2014 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15.1. Realisasi APBD di Kabupaten Wonosobo, 2014 – 2016

Uraian	Tahun		
	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Pendapatan	1.277.145.669.965	1.432.159.651.029	1.575.601.833.680
1.1 Pendapatan Asli Daerah	175.319.364.867	182.607.628.797	199.894.767.510
1.2 Pendapatan Transfer	1.041.173.346.789	1.116.918.004.333	1.158.504.208.170
1.3 Pendapatan Lain yang Sah	60.652.958.309	132.634.017.899	217.202.858.000
2 Belanja	1.168.905.623.767	1.494.447.291.802	1.619.140.120.490
2.1 Belanja Operasional	960.336.642.616	1.084.642.434.145	1.091.103.428.817
2.2 Belanja Modal	206.098.010.151	257.421.064.912,8	276.909.650.835
2.3 Belanja Tak Terduga	2.470.971.000	2.266.803.000	7.448.607.458
2.4 Transfer	51.418.061.600	150.086.989.744	243.678.433.350
3 Pembiayaan	270.944.787.864	300.297.135.899	222.074.281.956

3.1	Pembiayaan Penerimaan	297.208.756.864	342.065.873.521	238.104.871.956
3.2	Pembiayaan Pengeluaran	26.263969.000	41.768.737.622	16.030.590.000

Sumber : DPPKAD Kabupaten Wonosobo

Pada tabel di atas terlihat bahwa pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo sebagian besar berasal dari dana transfer/dana perimbangan. Besarnya dana transfer pada tahun 2014 adalah 4,03 persen dari total pendapatan Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2015 sebesar 10,48 persen, dan pada tahun 2016 sebesar 15,47 persen. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Wonosobo hanya sekitar 10 persen dari total pendapatan daerah yang ada. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan PAD.

Bagian dari belanja daerah yang terbesar adalah untuk belanja transfer. Besarnya belanja transfer dibandingkan total belanja daerah Kabupaten Wonosobo adalah berturut-turut dari tahun 2014–2016 yaitu 54,00 persen, 56,21 persen, dan 60,34 persen. Dengan kata lain 50 persen lebih belanja daerah Kabupaten Wonosobo adalah untuk belanja transfer. Besarnya persentase belanja transfer ini umumnya digunakan untuk keperluan **Dana Bantuan dan Dana Cadangan**.

15.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Otonomi daerah adalah suatu pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintah. Kewenangan tersebut diberikan secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang

berkeadilan, serta perimbangan-perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998. Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah diharapkan mampu mandiri dalam mengelola keuangannya, baik dari penerimaan maupun pembiayaan. Pemerintah daerah juga harus mampu menggali potensi daerah yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerahnya.

Dalam UU No.22 Tahun 1999 Bab VIII tentang Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban anggaran.

Sumber pendapatan pemerintah daerah bersumber dari:

1. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lain yang sah
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Pendapatan lain daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan

pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Contoh pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

Retribusi daerah adalah pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma. Ditetapkannya retribusi berhubungan dengan jasa timbale (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atau permohonan dan untuk kepentingan orang atau badan yang memerlukan, baik prestasi yang berhubungan dengan kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah.

Lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain akibat penjualan pengadaan barang/jasa oleh daerah.

Seperti yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya, bahwa PAD Kabupaten Wonosobo hanya sekitar 10 persen dari total pendapatan daerah. Berikut adalah pos-pos PAD Kabupaten Wonosobo.

Dari tabel 15.2 dapat dilihat bahwa sebagian besar PAD Kabupaten Wonosobo tahun 2016 berasal dari lain-lain (PAD yang sah) yaitu sebesar 72,23 persen. Sedangkan pajak daerah memberikan sumbangan terbesar selanjutnya sebesar 15,52 persen, turun dari tahun 2014 yang mencapai sebesar 18,39 persen.

Tabel 15.2. PADS Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 – 2016

Uraian	Tahun		
	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Pajak Daerah	23.309.000.000	25.905.000.000	27.612.500.000
Retribusi Daerah	21.313.572.198	8.157.730.500	9.918.981.500
Hasil Perusda dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.879.275.000	10.203.850.000	11.876.999.390
Lain-lain (PAD yang Sah)	75.235.385.604	1.10249.084.000	128.539.088.670
Jumlah	126.737.232.802	154.515.664.500	177.947.569.560

Sumber : DPPKAD Kabupaten Wonosobo



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Tumenggung Jogonegoro No. 08

Telp. (0286) 231341, Fax. (0286) 231341